

**PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan
entitas anaknya/*and its subsidiaries***

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements
as of December 31, 2019 and for the year then ended
with independent auditors' report

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PT PELABUHAN INDONESIA III
(PERSERO) DAN ENTITAS ANAK ("KELOMPOK USAHA")
UNTUK TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER REGARDING TO THE
RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS OF PT PELABUHAN INDONESIA III
(PERSERO) AND SUBSIDIARIES ("GROUP")
AS OF DECEMBER 31, 2019 AND FOR
THE YEAR THEN ENDED**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We the undersigned:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama | Doso Agung | <i>Name</i> |
| Alamat Kantor | Jl. Tanjung Perak Timur No. 610
Surabaya | <i>Office Address</i> |
| Alamat Domisili sesuai
KTP atau Identitas | Jl H Noim No.2
Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan | <i>Domicile as stated
in ID Card</i> |
| Nomor Telepon | +62-31-3298631 | <i>Phone Number</i> |
| Jabatan | Direktur Utama / <i>President Director</i> | <i>Position</i> |
| 2. Nama | Irvandi Gustari | <i>Name</i> |
| Alamat Kantor | Jl Tanjung Perak Timur No. 610
Surabaya | <i>Office Address</i> |
| Alamat Domisili sesuai
KTP atau Identitas | Taman Bcugenville E-1 / no. 8 Jatibening,
Pondokgede, Bekasi | <i>Domicile as stated
in ID Card</i> |
| Nomor Telepon | +62-31-3298631 | <i>Phone Number</i> |
| Jabatan | Direktur Keuangan / <i>Director of Finance</i> | <i>Position</i> |

Menyatakan bahwa :

State that :

- | | |
|---|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha. | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the Group's consolidated financial statements.</i> |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. <i>The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha disajikan secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | 3. a. <i>All information contained in the Group's consolidated financial statements are complete and correct.</i>
b. <i>The Group's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts.</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Kelompok Usaha. | 4. <i>We are responsible for the Group's internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This Statement letter is made truthfully.

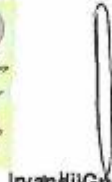
Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*

Surabaya,

23 Maret / *March 23, 2020*




Doso Agung
Direktur Utama / *President Director*



Irvandi Gustari
Direktur Keuangan / *Director of Finance*

HEAD OFFICE

Jl. Perak Timur No. 610
Surabaya 60165 - Indonesia

T: +62 31 3298631-37
F: +62 31 3295204

www.pelindo.co.id

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1 - 3 <i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	4 - 5 <i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	6 <i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	7 - 8 <i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	9 - 164 <i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Informasi keuangan tambahan	165 - 177 <i>Supplementary financial information</i>

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00287/3.0311/AU.1/06/0240-2/1/III/2020

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00287/3.0311/AU.1/06/0240-2/1/III/2020

**The Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00287/3.0311/AU.1/06/0240-2/1/III/2020 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00287/3.0311/AU.1/06/0240-2/1/III/2020 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00287/3.0311/AU.1/06/0240-2/1/III/2020 (lanjutan)

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

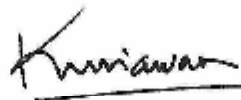
Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00287/3.0311/AU.1/06/0240-2/1/III/2020 (continued)

Other matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2019 and for the year then ended, was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (parent entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2019, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under the Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements as a whole.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Muhammad Kurniawan

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240/Public Accountant Registration No. AP.0240

23 Maret 2020/March 23, 2020

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

31 Desember/December 31,				
	2019	Catatan/ Notes	2018	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	3.644.611.039	4,6	4.612.047.296	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	27.939.981	5	57.920.390	<i>Short-term investment</i>
Piutang usaha - neto		7		<i>Trade receivables - net</i>
Pihak ketiga	514.119.258		516.377.060	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	308.955.522	6	340.360.505	<i>Related parties</i>
Piutang lain-lain - neto		8		<i>Other receivables - net</i>
Pihak ketiga	40.777.347		36.236.852	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	269.897.865	6	262.531.359	<i>Related parties</i>
Pendapatan masih akan diterima	217.280.808	9	317.662.932	<i>Accrued revenues</i>
Persediaan - neto	84.545.673	10	52.115.524	<i>Inventories - net</i>
Pajak dibayar dimuka	173.776.366	17a	146.709.690	<i>Prepaid taxes</i>
Beban dibayar dimuka	85.022.833	11	98.388.521	<i>Prepaid expense</i>
Aset lancar lainnya	40.640.205		22.518.736	<i>Other current assets</i>
TOTAL ASET LANCAR	5.407.566.897		6.462.868.865	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Investasi pada entitas asosiasi	1.156.555.890	12	1.090.565.886	<i>Investment in associates</i>
Properti investasi - neto	101.879.933	13	103.267.839	<i>Investment properties - net</i>
Aset tetap - neto	16.791.363.156	14	16.231.547.122	<i>Fixed assets - net</i>
Aset pajak tangguhan	437.436.420	17f	263.407.156	<i>Deferred tax assets</i>
Aset takberwujud - neto	6.056.750.109	15	5.147.470.056	<i>Intangible assets - net</i>
Estimasi tagihan pajak	215.984.806	17e	430.661.045	<i>Estimated claims for tax refund</i>
Aset tidak lancar lainnya	588.377.362	16	775.927.618	<i>Other non-current assets</i>
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	25.348.347.676		24.042.846.722	TOTAL NON CURRENT ASSETS
TOTAL ASET	30.755.914.573		30.505.715.587	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

		31 Desember/December 31,				
		2019	Catatan/ Notes	2018		
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY	
LIABILITAS					LIABILITIES	
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES	
Utang usaha			18		Trade payables	
Pihak ketiga	568.633.930			527.416.198	Third parties	
Pihak berelasi	61.714.668		6	79.144.186	Related parties	
Utang lain - lain			19		Other payables	
Pihak ketiga	404.348.746			439.382.061	Third parties	
Pihak berelasi	385.618.157		6	259.531.313	Related parties	
Utang pajak	164.853.576		17b	260.741.232	Tax payables	
Beban akrual	1.110.512.317		20	1.287.510.462	Accrued expenses	
Pendapatan diterima dimuka jangka pendek	292.259.965		21,6	306.552.410	Short-term unearned revenue	
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:					Current maturities of long-term liabilities:	
Utang bank	162.163.278		22	351.140.707	Bank loans	
Utang sewa pembiayaan	-			62.813.193	Finance lease liability	
Liabilitas jangka pendek lainnya	115.092.216			81.715	Other current liabilities	
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	3.265.196.853			3.574.313.477	TOTAL CURRENT LIABILITIES	
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES	
Liabilitas pajak tangguhan	59.925.820		17h	63.213.116	Deferred tax liabilities	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar:					Long-term liabilities - net of current maturities:	
Utang bank	81.764.281		22	256.387.236	Bank loans	
Surat berharga yang diterbitkan	13.784.415.230		23	14.329.612.957	Securities issued	
Liabilitas imbalan kerja	2.161.034.313		25	1.572.167.803	Employee benefits liabilities	
Pendapatan diterima dimuka jangka panjang	354.991.002		24	353.005.199	Long-term unearned revenue	
Liabilitas jangka panjang lainnya	1.723.573			1.702.002	Other non-current liabilities	
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	16.443.854.219			16.576.088.313	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES	
TOTAL LIABILITAS (dipindahkan)	19.709.051.072			20.150.401.790	TOTAL LIABILITIES (carried forward)	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2018
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember/December 31,			
	2019	Catatan/ Notes	2018	
TOTAL LIABILITAS (pindahan)	19.709.051.072		20.150.401.790	TOTAL LIABILITIES (brought forward)
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham				Share capital - par value Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal dasar - 3.200.000 saham, modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 1.018.953 saham	1.018.953.000	26	1.018.953.000	Authorized capital - 3,200,000 shares, subscribed and paid up amounting to 1,018,953 shares
Selisih atas perubahan ekuitas entitas anak dan dampak transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(476.073.010)	28	38.740.826	Difference from changes in equity in subsidiaries and effects of transaction with non-controlling interest
Saldo laba:				Retained earnings:
Ditentukan penggunaannya	7.580.565.471	26, 27	7.048.818.143	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	877.166.010		(481.116.013)	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	1.151.483.326	29	1.453.839.874	Other comprehensive income
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	10.152.094.797		9.079.235.830	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	894.768.704	30	1.276.077.967	Non-controlling interest
TOTAL EKUITAS	11.046.863.501		10.355.313.797	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	30.755.914.573		30.505.715.587	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	Catatan/ Notes	2018	
Pendapatan operasi	9.775.808.197	31	10.174.932.027	Operating revenue
Pendapatan konstruksi	871.354.794	32	603.841.389	Construction revenues
Beban operasi	(7.034.624.204)	33	(6.879.589.941)	Operating expenses
Beban konstruksi	(871.354.794)	32	(597.016.991)	Construction expenses
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto	480.676.576	34	(733.923.638)	Other operating income (expenses) - net
LABA USAHA	3.221.860.569		2.568.242.846	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	147.617.525	35	143.193.611	Finance income
Beban keuangan	(714.939.086)	36	(808.410.118)	Finance costs
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi	5.081.420	37	(30.976.449)	Equity in income (loss) of associates
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	2.659.620.428		1.872.049.890	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX
Beban pajak final	(65.000.801)	17d	(48.544.590)	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	2.594.619.627		1.823.505.300	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN				CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	(545.735.537)	17d	(597.212.172)	Current
Tangguhan	80.129.386	17d	159.109.419	Deferred
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	(465.606.151)		(438.102.753)	CORPORATE INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	2.129.013.476		1.385.402.547	INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)**

**For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	Catatan/ Notes	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Items that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(456.844.843)		Remeasurements of defined benefit plans
Efek pajak tangguhan - pengukuran kembali program imbalan pasti	114.211.211		Deferred tax effect - remeasurement of defined benefit plans
Perubahan cadangan aset revaluasi	66.891.587		Changes in asset revaluation reserves
Efek pajak tangguhan - perubahan cadangan aset revaluasi	(16.722.897)		Deferred tax effect - changes in asset revaluation reserves
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(292.464.942)		TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.836.548.534		TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	2.096.571.306		Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	32.442.170		Non-controlling interests
LABA TAHUN BERJALAN	2.129.013.476		INCOME FOR THE YEAR
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	1.803.510.328		Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	33.038.206	30	Non-controlling interests
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.836.548.534		TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	2.058	2t	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA**
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Equity attributable to owners of the parent entity

Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Selisih atas perubahan ekuitas Entitas Anak dan dampak transaksi dengan kepentingan nonpengendali/Difference from changes in equity of Subsidiaries and effects of transactions with non-controlling interest	Saldo laba/Retained earnings		Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income		Neto/Net	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Total ekuitas/ Total Equity	
			Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Surplus revaluasi aset tetap/Fixed assets revaluation gains	Pengukuran kembali program imbalan pasti/ Remeasurements of defined benefit plans				
Saldo per 31 Desember 2017	1.018.953.000	56.420.249	6.022.038.102	219.744.010	1.166.601.138	(448.253.715)	8.035.502.784	1.330.112.349	9.365.615.133	Balance as of December 31, 2017
Laba tahun berjalan	-	-	-	759.639.041	-	-	759.639.041	625.763.507	1.385.402.548	Income for the year
Saham treasury PT PEL	-	430.227	-	-	-	-	430.227	9.273	439.500	Treasury stocks of PT PEL
Penambahan agio saham	-	11.012.625	-	-	-	-	11.012.625	(11.012.625)	-	Addition of share premium
Disagio saham PMS	-	(29.122.275)	-	-	-	-	(29.122.275)	(627.725)	(29.750.000)	Share premium of PMS
Peralihan saham nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	(145.605)	(145.605)	Transfer of capital stock of non-controlling interest
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja dan revaluasi aset tetap	-	-	-	-	57.589.897	685.395.925	742.985.822	(3.313.379)	739.672.443	Remeasurement of employee benefit liability and fixed assets revaluation
Dekonsolidasi BJTI - GAMA JO	-	-	(2.563.117)	-	-	-	(2.563.117)	(83.637)	(2.646.754)	Deconsolidation BJTI - GAMA JO
Dividen tunai	27	-	-	(441.147.068)	-	-	(441.147.068)	-	(441.147.068)	Cash dividend
Pembagian dividen tunai oleh Entitas Anak untuk kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	(664.705.697)	(664.705.697)	Cash dividend paid by Subsidiaries to non-controlling interests
Pembentukan cadangan umum	-	-	1.029.343.158	(1.029.343.158)	-	-	-	-	-	Appropriation for general reserve
Pelepasan aset revaluasi oleh BJTI	-	-	-	9.991.162	(7.493.371)	-	2.497.791	81.506	2.579.297	Disposal of revaluation assets by BJTI
Saldo per 31 Desember 2018	1.018.953.000	38.740.826	7.048.818.143	(481.116.013)	1.216.697.664	237.142.210	9.079.235.830	1.276.077.967	10.355.313.797	Balance as of December 31, 2018
Laba tahun berjalan	-	-	-	2.096.571.306	-	-	2.096.571.306	32.442.170	2.129.013.476	Income for the year
Perubahan porsi kepemilikan Saham treasury PT PEL	-	(13.450)	-	-	-	-	(13.450)	13.450	-	Changes in percentage of ownership of treasury stocks of PT PEL
Perubahan porsi kepemilikan agio saham	-	114.750	-	-	-	-	114.750	(114.750)	-	Changes in percentage of ownership of share premium
Perubahan porsi kepemilikan Disagio saham PMS	-	(101.150)	-	-	-	-	(101.150)	101.150	-	Changes in percentage of ownership of Share premium of PMS
Disagio saham TPS	-	(514.813.986)	-	-	-	-	(514.813.986)	8.269.713	(506.544.273)	Share premium of TPS
Peralihan saham nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	(62.663.189)	(62.663.189)	Transfer of capital stock of non-controlling interest
Penyesuaian saldo laba hak minoritas	-	-	-	11.330.165	-	-	11.330.165	(48.684.085)	(37.353.920)	Retained earnings' adjustment of non-controlling interest
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja dan revaluasi aset tetap	-	-	-	-	50.168.690	(342.633.632)	(292.464.942)	596.036	(291.868.906)	Remeasurement of employee benefit liability and fixed assets revaluation
Dividen tunai	27	-	-	(227.891.712)	-	-	(227.891.712)	-	(227.891.712)	Cash dividend
Reatribusi penghasilan komprehensif lainnya hak minoritas	-	-	-	-	-	(2.377.088)	(2.377.088)	(5.892.625)	(8.269.713)	Reattribution of other comprehensive income of non-controlling interest
Pembagian dividen tunai oleh Entitas Anak untuk kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	(305.388.245)	(305.388.245)	Cash dividend paid by Subsidiaries to non-controlling interests
Pembentukan cadangan umum	-	-	531.747.328	(531.747.328)	-	-	-	-	-	Appropriation for general reserve
Pelepasan aset revaluasi	-	-	-	10.019.592	(7.514.518)	-	2.505.074	11.112	2.516.186	Disposal of revaluation assets
Saldo per 31 Desember 2019	1.018.953.000	(476.073.010)	7.580.565.471	877.166.010	1.259.351.836	(107.868.510)	10.152.094.797	894.768.704	11.046.863.501	Balance as of December 31, 2019

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	Catatan/ Notes	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan dan non-pelanggan	10.355.595.751		10.113.237.676	Cash received from customers and non-customers
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(4.388.247.403)		(4.395.947.181)	Payment to contractors, suppliers and others
Pembayaran kepada karyawan	(1.636.168.317)		(1.212.050.265)	Payment to employees
Pembayaran pajak penghasilan	(437.155.872)		(478.448.300)	Payment for income taxes
Penghasilan bunga	147.617.525		143.193.611	Interest received
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	4.041.641.684		4.169.985.541	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dividen	9.648.958		6.387.567	Receipt of dividend
Perolehan aset tetap dan aset takberwujud	(2.576.817.830)		(3.419.983.073)	Acquisition of fixed assets and intangible assets
Penempatan investasi jangka pendek	29.980.409	5	(46.932.200)	Placement of short-term investments
Penerimaan atas penjualan aset tetap	4.009.498		2.682.015	Proceed from sales of fixed assets
Investasi pada penyertaan saham	(648.527.175)		-	Investment in shares of stock
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(3.181.706.140)		(3.457.845.691)	Net Cash Used in Investing Activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
(continued)
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	Catatan/ Notes	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman	500.000.000		6.901.500.000 <i>Receipt of loans</i>
Pembayaran pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	(853.295.614)		(4.040.117.626) <i>Payment of bank loans and other financial institution</i>
Pembayaran beban bunga	(761.085.855)		(677.007.121) <i>Payment of interest</i>
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(62.813.193)		(444.042) <i>Payment of obligation under finance lease</i>
Pembayaran dividen	(533.279.957)	27	(1.105.852.765) <i>Payment of dividend</i>
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(1.710.474.619)		1.078.078.446 <i>Net Cash Provided by (Used for) Financing Activities</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(850.539.075)		1.790.218.296 NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(116.897.182)		71.301.529 <i>Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents</i>
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4.612.047.296		2.750.527.471 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	3.644.611.039	4	4.612.047.296 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Perusahaan") pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan III berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 16 tahun 1983. Perum Pelabuhan III merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 1991, Perum Pelabuhan III mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 5 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-9992 HT.01.01.Th.93 tanggal 30 September 1993. Sejak terbentuknya Kementerian BUMN pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 08 dari Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., di Surabaya, tanggal 13 Agustus 2012 mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-61954.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 5 Desember 2012.

Berdasarkan Akta No. 08 tersebut di atas, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Negara BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp209.730.528 yang merupakan Penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp809.222.000 menjadi sebesar Rp1.018.953.000.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("the Company") was initially established as Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan III based on Government Regulation No. 16, Year 1983. It was a State-Owned Enterprise ("SOE") under the supervision of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Based on Government Regulation No. 58 Year 1991, the legal entity of Perum Pelabuhan III was changed into a State Owned Company (Persero). As a result of such government regulation, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) was established based on Notarial Deed No. 5 of Imas Fatimah, S.H., dated December 1, 1992. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision No. C2-9992 HT.01.01.Th.93 dated September 30, 1993. Since the establishment of the Ministry of State-Owned Enterprise ("MSOE") in 1998, the Company has been under the supervision of the MSOE. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Shareholders Resolution notarized by Notarial Deed No. 08 of Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notary in Surabaya, dated August 13, 2012 regarding the Company's additional share capital issued and fully paid share capital. This amendment was registered to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Acceptance Letter No. AHU-61954.AH.01.02 Year 2012 dated December 5, 2012.

Based on the Notarial Deed No. 08 as stated above, the Government of the Republic of Indonesia which in this case represented by the Minister of State-Owned Enterprises (MSOE) increased its investment in the Company amounting to Rp209,730,528 as an Addition in State Capital Participation as stated in Government Regulation No. 8 of 2012 concerning the Addition of the State Capital Participation of the Republic of Indonesia to the Capital Stock of PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). With the additional paid-in capital of the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company's increased from Rp809,222,000 to Rp1,018,953,000.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Selain lingkup usaha tersebut di atas, Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan.

Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Kelompok Usaha") bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa transportasi laut, jasa rumah sakit, jasa perbaikan, jasa kepelatihan dan lainnya.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Perak Timur No.610, Surabaya 60165, Indonesia.

Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan mengelola 4 kantor regional yang meliputi 28 Terminal Pelabuhan yang terdiri dari:

<u>Regional</u>	<u>Cabang/Branch</u>	<u>Region</u>
Jawa Timur	Tanjung Perak, Gresik, Tanjung Tembaga, Kalianget	East Java
Bali Nusra	Bima, Celukan Bawang, Maumere, Bena, Tenau Kupang, Lembar, Tanjung Wangi, Badas, Waingapu, Kalabahi, Ende	Bali Nusra
Jawa Tengah	Tanjung Emas, Terminal Petikemas Semarang, Tanjung Intan, Tegal	Central Java
Kalimantan	Sampit, Banjarmasin, Pulang Pisau, Kotabaru, Batulicin, Mekar Putih, Bagendang, Kumai, Bumiharjo	Kalimantan

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The Company's purposes and objectives are managing and operating port services and optimizing resource utilization owned by the Company to produce competitive and high quality goods and/or services to gain profits in order to increase the Company's value by applying the limited liability company principles.

Other than the above-mentioned scope of activities, the Company may establish and manage other businesses related to port business.

Currently, the Company and its subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Group") are involved in several businesses consisting of port services, logistic, sea transportation services, hospital services, repair services, training services and others.

The Company's head office is located at Jl. Perak Timur No.610, Surabaya 60165, Indonesia.

The Company's parent and ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

The Company manages 4 regional offices which includes 28 Port Terminal as follows:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Berikut adalah izin-izin penting yang diperoleh Perusahaan sehubungan dengan operasional pelabuhan:

- Keputusan Menteri Perhubungan No. 10/1/30-Pelabuhan/PMDN/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan ("BUP").
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 603 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.
- Perjanjian konsesi (Catatan 41).

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut:

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
				2019	2018	2019	2018
PT Terminal Petikemas Surabaya ("PT TPS")	Surabaya	Layanan Terminal Petikemas/ Container Port Services	1999	99,50%	50,50%	1.789.406.335	1.906.460.765
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ("PT BJTI")	Surabaya	Layanan Terminal Petikemas/ Container Port Services	1999	96,84%	96,84%	3.696.174.378	3.614.637.234
PT Pelindo Husada Citra ("PT PHC")	Surabaya	Layanan Jasa Kesehatan/ Health Care Services	1999	98,73%	98,73%	396.148.132	307.164.679
PT Pelindo Marine Service ("PT PMS")	Surabaya	Pelayanan Jasa Perkapalan/ Shipping services	2011	98,23%	97,89%	1.638.141.996	1.515.961.390
PT Terminal Teluk Lamong ("PT TTL")	Surabaya	Layanan Terminal Petikemas dan Curah Kering/ Container Port Service and Dry Bulk	2013	99,50%	99,50%	667.177.840	584.691.292
PT Pelindo Daya Sejahtera ("PT PDS")	Surabaya	Layanan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/ Human Resources Services	2013	90,00%	90,00%	167.539.358	110.814.712

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The following are significant permits obtained by the Company in relation to port operations:

- Decree of Minister of Transportation No 10/1/30-Pelabuhan/PMDN/2018 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as Port Operation Entity ("BUP").
- Decree of Minister of Transportation No. KP 603 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.
- Concession agreements (Notes 41).

b. Subsidiaries and Associates

As of December 31, 2019 and 2018, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

b. Subsidiaries and Associates (continued)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
				2019	2018	2019	2018
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership</u>							
<u>Dimiliki melalui/Owned through PT TPS</u>							
PT Berlian Manyar Stevedore ("PT BMST")	Gresik	Jasa Bongkar Muat/ Stevedoring Service	2016	99,00%	60,00%	667.790	688.268
<u>Dimiliki melalui/Owned through PT BJTJ</u>							
PT Berlian Manyar Sejahtera ("PT BMS")	Surabaya	Layanan Terminal/ Port Services	2012	60,00%	60,00%	990.995.604	876.948.065
PT Pelindo Properti Indonesia ("PT PPI")	Surabaya	Pengelolaan Properti/ Property Management	2014	99,91%	99,91%	138.227.647	139.085.277
PT Berkah Industri Mesin Angkat ("PT BIMA")	Surabaya	Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Pelabuhan/ Port Equipment Maintenance and Repair Service	2015	90,00%	90,00%	109.595.952	83.307.537
PT Terminal Curah Semarang ("PT TCS")	Semarang	Jasa Pelayanan Curah Cair dan Gas/ Liquid Bulk and Gas Service	2015	51,00%	51,00%	53.765.258	53.040.445
<u>Dimiliki melalui/Owned through PT PHC</u>							
PT Prima Citra Nutrindo ("PT PCN")	Surabaya	Layanan Jasa Katering/ Catering Business	2016	70,00%	70,00%	11.118.057	8.295.363
<u>Dimiliki melalui/Owned through PT PMS</u>							
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya ("PT APBS")	Surabaya	Jasa Pengerukan, Jasa Reklamasi dan Pengelolaan Alur Pelayaran/ Dredging Service, Reclamation Service and Management of Shipping Channel	2014	90,00%	90,00%	528.097.719	456.100.756
PT Pelindo Energi Logistik ("PT PEL")	Surabaya	Perdagangan Jasa/ Trading Services	2014	90,00%	90,00%	551.284.560	562.992.029
PT Berkah Multi Cargo ("PT BMC")	Surabaya	Jasa Angkutan Multi Moda/ Loading and Unloading of Goods to and from Ship Services	2015	99,80%	90,00%	119.883.956	44.278.709
<u>Dimiliki melalui/Owned through PT TTL</u>							
PT Lamong Energi Indonesia ("PT LEGI")	Surabaya	Penyediaan Energi/ Energy Provider	2014	99,00%	99,00%	135.330.012	84.423.327

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries dan Associates (continued)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Tahun pendirian/ Year of Establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
				2019	2018	2019	2018
<u>Dimiliki melalui/Owned through PT PDS</u>							
PT Tanjung Emas Daya Sejahtera ("PT TEDS")	Surabaya	Kegiatan Tally/ Tally Activity	2014	99,00%	99,00%	16.039.950	12.507.042
<u>Entitas Asosiasi/Associates Entities</u>							
PT Portek Indonesia	Surabaya	Pemeliharaan Peralatan Bongkar Muat/ Stevedoring Equipment Maintenance	1998	49,00%	49,00%	11.517.531	45.545.658
PT Terminal Petikemas Indonesia ("PT TPI")	Surabaya	Layanan Terminal Petikemas/ Container Port Service	1999	25,00%	25,00%	133.111.708	131.715.920
PT Ambang Barito Nusapersada ("PT Ambapers")	Banjarmasin	Pengelolaan Alur Pelayaran Sungai Barito/ Management of Shipping Barito River	2004	40,00%	40,00%	124.947.401	119.302.049
PT Jasa Marga Bali Tol ("PT JBTT")	Bali	Pengelolaan Jalan Tol/ Toll Operator	2011	17,58%	17,58%	1.890.157.490	1.949.801.148
<u>Dimiliki melalui/Owned through PT BJTI</u>							
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera ("PT BKMS")	Surabaya	Pengelolaan Kawasan Industri JIPE/ JIPE Industrial Estate Management	2012	40,00%	40,00%	6.187.896.430	4.969.892.546
PT Terminal Nilam Utara ("PT TNU")	Surabaya	Layanan Terminal Curah Cair dan Gas/ Liquid Bulk and Gas Terminal Service	2013	40,00%	40,00%	434.556.428	450.049.481
PT Energi Manyar Sejahtera ("PT EMS")	Surabaya	Jasa Pembangkit Listrik/ Power Plant Service	2015	30,00%	30,00%	1.101.762	1.070.672
<u>Dimiliki melalui/Owned through PT PEL</u>							
PT Lamong Nusantara Gas ("PT LNG")	Surabaya	Pembangunan, pengelolaan, dan pengoperasian terminal LNG Jawa Timur/ Development, management and operation of LNG terminal in East Java	2019	49,00%	0,00%	144.630.705	-

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT TPS

PT TPS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 April 1999 oleh Notaris Rahmat Santoso, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan No.C-6465 HT.01.01 Th.99 tanggal 9 April 1999.

Modal dasar PT TPS sebesar Rp127.884.057 terdiri dari 255.768.116 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 50,50% atau sebanyak 129.162.897 saham dengan nilai nominal Rp64.581.448.
- P&O Dover memiliki 49,00% atau sebanyak 125.326.377 saham dengan nilai nominal Rp62.663.188.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 0,50% atau sebanyak 1.278.841 saham dengan nilai nominal Rp639.420.

Berdasarkan Akta Notaris No. 143 tanggal 28 April 2019, oleh Notaris Yatiningsih, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, mengenai Perjanjian Pemindahan Hak (Jual Beli) Saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 99,50% atau sebanyak 254.489.274 saham dengan nilai nominal Rp127.244.637.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 0,50% atau sebanyak 1.278.841 saham dengan nilai nominal Rp639.420.

PT BJTI

PT BJTI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 9 Januari 2002 oleh Notaris Moendjiati Soegito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-03606 HT.01.01 Th.2002 tanggal 5 Maret 2002.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT TPS

PT TPS was established under the Notarial Deed No. 1 dated April 1, 1999 of Notary Rahmat Santoso, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-6465 HT.01.01 Th.99 dated April 9, 1999.

The authorized capital of PT TPS amounted to Rp127,884,057 composed of 255,768,116 shares with par value of Rp500 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- *The Company owns 50.50% or 129,162,897 shares with total amount of Rp64,581,448.*
- *P&O Dover owns 49.00% or 125,326,377 shares with total amount of Rp62,663,188.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.50% or 1,278,841 shares with total amount of Rp639,420.*

Based on Notarial Deed No. 143 dated April 28, 2019, by Notary Yatiningsih, S.H., M.Kn., Notary in Surabaya, regarding the Agreement on Transfer of Rights (Sale and Purchase) of Shares. The composition of the issued and fully paid capital as of December 31, 2019 are as follows:

- *The Company owns 99.50% or 254,489,274 shares with total amount of Rp127,244,637.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.50% or 1,278,841 shares with total amount of Rp639,420.*

PT BJTI

PT BJTI was established under the Notarial Deed No. 1 dated January 9, 2002 of Notary Moendjiati Soegito S.H., Notary in Jakarta, and was approved Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-03606 HT.01.01 Th.2002 dated March 5, 2002.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT BJTI (lanjutan)

Anggaran Dasar PT BJTI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 1 tanggal 1 Maret 2017 oleh Mira Irani, SH., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, mengenai pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahun 2017 dan peningkatan modal dasar menjadi Rp4.000.000.000 terbagi atas 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham dan persetujuan reklasifikasi sebagian saldo cadangan modal menjadi modal saham sehingga nilai modal disetor seluruhnya menjadi Rp1.114.310.000 terbagi atas 1.114.310 saham. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-0006656.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 18 Maret 2017.

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 96,84% atau sebanyak 1.079.138 saham dengan nilai sebesar Rp1.079.138.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 3,16% atau sebanyak 35.172 saham dengan nilai nominal sebesar Rp35.172.000.

PT PHC

PT PHC didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 September 1999 oleh Notaris Syafran, S.H., Notaris di Semarang, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-16306 HT.01.01 TH.1999, tanggal 13 September 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 11 tanggal 13 September 1999.

Modal dasar PT PHC sebesar Rp142.000.000 terdiri dari 284.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT BJTI (continued)

PT BJTI's Articles of Association has been amended several times, most recently by notarial deed of Annual General Meeting of Shareholders No. 1 dated March 1, 2017 by Mira Irani, SH., M.Kn., Notary in Sidoarjo, regarding the approval of Company's Budget Plan (RKAP) year 2017 and increase of authorized capital to become Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares at par value of Rp1,000,000 (full amount) per share and approval of reclassification of the balance of capital reserve to become share capital so that the total paid up capital becomes Rp1,114,310,000 divided into 1,114,310 shares. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-0006656.AH.01.02. Year 2017 dated March 18, 2017.

The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 96.84% or 1,079,138 shares amounting to Rp1,079,138,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 3.16% or 35,172 shares amounting to Rp35,172,000.

PT PHC

PT PHC was established under Notarial Deed No. 1 dated September 1, 1999 of Notary Syafran, S.H., Notary at Semarang, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-16306 HT.01.01 TH.1999, dated September 13, 1999 and was published in the State Gazette No. 11, dated September 13, 1999.

The authorized capital of PT PHC amounted to Rp142,000,000 composed of 284,000,000 shares with par value of Rp500 (full amount) per share. The composition share ownership issued and fully paid shares is as follows:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT PHC (lanjutan)

- Perusahaan memiliki sebesar 98,73% atau sebanyak 280.400.000 saham dengan nilai nominal Rp140.200.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 1,27% atau sebanyak 3.600.000 saham dengan nilai nominal Rp1.800.000.

PT PMS

PT PMS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 31 Desember 2011 oleh Notaris Stephanus R. Agus Purwanto, SH., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-34988.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012.

Modal dasar PT PMS sebesar Rp260.500.000 terdiri dari 260.500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 97,89% atau sebanyak 255.000.000 saham dengan nilai nominal Rp255.000.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 2,11% atau sebanyak 5.500.000 saham dengan nilai nominal Rp5.500.000.

Anggaran Dasar PT PMS telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 1 tanggal 18 November 2019 oleh Heni Yuniyanting, SH., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, mengenai pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar menjadi Rp310.500.000.000 terbagi atas 310.500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-AH.01.03-0361631 Tahun 2019 tanggal 19 November 2019.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT PHC (continued)

- The Company owns 98.73% or 280,400,000 shares with total amount of Rp140,200,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.27% or 3,600,000 shares with total amount of Rp1,800,000.

PT PMS

PT PMS was established under the Notarial Deed No. 8 dated December 31, 2011, of Notary Stephanus R. Agus Purwanto, SH., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-34988.AH.01.01 Year 2012 dated September 27, 2012.

The authorized capital of PT PMS amounted to Rp260,500,000 composed of 260,500,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 97.89% or 255,000,000 shares with total amount of Rp225,000,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 2.11% or 5,500,000 shares with total amount of Rp5,500,000.

PT PMS's Articles of Association has been amended, most recently by notarial deed of Annual General Meeting of Shareholders No. 1 dated November 18, 2019 by Heni Yuniyanting, SH., M.Kn., Notary in Sidoarjo, regarding the notification amendment of the Articles of Association to become Rp310,500,000,000 divided into 310,500,000 shares at par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-AH.01.03-0361631 Year 2019 dated November 19, 2019.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT PMS (lanjutan)

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 98,23% atau sebanyak 305.000.000 saham dengan nilai sebesar Rp305.000.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 1,77% atau sebanyak 5.500.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.500.000.

PT TTL

PT TTL didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 309 tanggal 30 Desember 2013, oleh Notaris Yatiningsih, S.H., Magister Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-10997.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014.

Modal dasar PT TTL sebesar Rp400.000 terdiri dari 400.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 99,50% atau sebanyak 134.325 saham dengan nilai nominal Rp134.325.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 0,50% atau 675 saham dengan nilai nominal Rp675.000.

PT PDS

PT PDS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 41 tanggal 10 Maret 2008 oleh Notaris Inas Abdullah Thalib, S.H., Notaris di Gresik, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-18839AH.01.01.TH.2008 tanggal 16 April 2008.

Modal dasar PT PDS sebesar Rp17.500.000 terdiri dari 35.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT PMS (continued)

The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 98.23% or 305,000,000 shares amounting to Rp305,000,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.77% or 5,500,000 shares amounting to Rp5,500,000.

PT TTL

PT TTL was established under Notarial Deed No. 309 dated December 30, 2013, of Notary Yatiningsih, S.H., Master of Laws, Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-10997.AH.01.01 Year 2014 dated March 13, 2014.

The authorized capital of PT TTL amounted to Rp400,000 composed of 400,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 99.50% or 134,325 shares with total amount of Rp134,325,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.50% or 675 shares with total amount of Rp675,000.

PT PDS

PT PDS was established under Notarial Deed No. 41 dated March 10, 2008 of Notary Inas Abdullah Talib, S.H., Notary in Gresik, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-18839AH.01.01.TH.2008 dated April 16, 2008.

The authorized capital of PT PDS amounted to Rp17,500,000 composed of 35,000 shares with par value of Rp500,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT PDS (lanjutan)

- Perusahaan memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 31.500 saham dengan nilai nominal Rp15.750.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 10,00% atau sebanyak 3.500 saham dengan nilai nominal Rp1.750.000.

PT BMST

PT BMST didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 241 tanggal 28 Januari 2016, oleh Notaris Mira Irani, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0013280.AH.01.11 tanggal 30 Januari 2016.

Modal dasar PT BMST adalah sebesar Rp2.000.000 terdiri dari 2.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 60,00% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.
- PT UEPN memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 200 saham dengan nilai nominal sebesar Rp200.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 6 September 2019, dan Akta Notaris No. 08 tanggal 31 Oktober 2019, oleh Notaris Mira Irani, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, mengenai Perjanjian Jual Beli saham "PT Berlian Manyar Stevedore". Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- PT TPS memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 495 saham dengan nilai sebesar Rp495.000.
- PT UEPN memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 5 saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT PDS (continued)

- The Company owns 90.00% or 31,500 shares with total amount of Rp15,750,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 10.00% or 3,500 shares with total amount of Rp1,750,000.

PT BMST

PT BMST was established under Notarial Deed No.241 dated January 28, 2016 by Notary Mira Irani, S.H., M.Kn., Notary in Gresik, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0013280.AH.01.11 dated January 30, 2016.

The authorized capital of PT BMST amounted to Rp2,000,000 composed of 2,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT BJTI owns 60.00% or 300 shares amounting to Rp300,000.
- PT UEPN owns 40.00% or 200 shares amounting to Rp200,000.

Based on Notarial Deed No. 02 dated September 6, 2019, and Notary Deed No. 08 dated October 31, 2019, by Notary Mira Irani, S.H., M.Kn., Notary in Sidoarjo, regarding the Agreement of Sale and Purchase of shares "PT Berlian Manyar Stevedore". The composition of the issued and fully paid capital as of December 31, 2019 are as follows:

- PT TPS owns 99.00% or 495 shares amounting to Rp495,000.
- PT UEPN owns 1.00% or 5 shares amounting to Rp5,000.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT BMS

PT BMS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 12 Juni 2012 oleh Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notaris di Surabaya. PT BMS secara resmi telah menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.164 Tahun 2013 tanggal 15 Februari 2013.

Modal dasar PT BMS adalah sebesar Rp1.000.000.000 terdiri dari 1.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 60,00% atau sebanyak 432.600 saham dengan nilai sebesar Rp432.600.000.
- PT Usaha Era Pratama Nusantara ("PT UEPN") memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 288.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp288.400.000.

PT PPI

PT PPI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 5 Desember 2014 oleh Notaris Yahya Abdullah Waber, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0130014.40.80.2014 tanggal 12 Desember 2014.

Modal dasar PT PPI adalah sebesar Rp220.000.000 terdiri dari 220.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 99,91% atau sebanyak 84.920.000 saham dengan nilai sebesar Rp84.920.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 0,09% atau sebanyak 80.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp80.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT BMS

PT BMS was established under Notarial Deed No. 12 dated June 12, 2012 of Notary Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notary in Surabaya. PT BMS had officially become Badan Usaha Pelabuhan (BUP), by Minister of Transportation under Decision Letter No. KP.164 Year 2013 dated February 15, 2013.

The authorized capital of PT BMS amounted to Rp1,000,000,000 composed of 1,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PT BJTI owns 60.00% or 432,600 shares amounting to Rp432,600,000.*
- *PT Usaha Era Pratama Nusantara ("PT UEPN") owns 40.00% or 288,400 shares amounting to Rp288,400,000.*

PT PPI

PT PPI was established under Notarial Deed No. 5 dated December 5, 2014 by Notary Yahya Abdullah Waber, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0130014.40.80.2014 dated December 12, 2014.

The authorized capital of PT PPI amounted to Rp220,000,000 composed of 220,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PT BJTI owns 99.91% or 84,920,000 shares amounting to Rp84,920,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.09% or 80,000 shares amounting to Rp80,000.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT BIMA

PT BIMA didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 11 November 2015 oleh Notaris Yahya Abdullah Waber, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-2468002.AH.01.01 tanggal 23 November 2015.

Modal dasar PT BIMA adalah sebesar Rp10.000.000 terdiri dari 10.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 90,00% atau 6.750 saham dengan nilai sebesar Rp6.750.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 10,00% atau sebanyak 750 saham dengan nilai nominal sebesar Rp750.000.

PT TCS

PT TCS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 189 tanggal 15 Desember 2015, oleh Notaris Mira Irani, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0003534.AH.01.01 tanggal 21 Januari 2016.

Modal dasar PT TCS adalah sebesar Rp240.000.000 terdiri dari 240.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 51,00% atau sebanyak 30.600 saham dengan nilai sebesar Rp30.600.000.
- PT Andahanesa Abadi memiliki sebesar 49,00% atau sebanyak 29.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp29.400.000.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT BIMA

PT BIMA was established under Notarial Deed No. 6 dated November 11, 2015, by Notary Yahya Abdullah Waber, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-2468002.AH.01.01 dated November 23, 2015.

The authorized capital of PT BIMA amounted to Rp10,000,000 composed of 10,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PT BJTI owns 90.00% or 6,750 shares amounting to Rp6,750,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 10.00% or 750 shares amounting to Rp750,000.*

PT TCS

PT TCS was established, under Notarial Deed No. 189 dated December 15, 2015, by Notary Mira Irani, S.H., M.Kn., Notary in Sidoarjo, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0003534.AH.01.01 dated January 21, 2016.

The authorized capital of PT TCS amounted to Rp240,000,000 composed of 240,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PT BJTI owns 51.00% or 30.600 shares amounting to Rp30,600,000.*
- *PT Andahanesa Abadi owns 49.00% or 29,400 shares amounting to Rp29,400,000.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT PCN

PT PCN didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 35 tanggal 11 Januari 2016, oleh Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0002328.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016.

Modal dasar PT PCN adalah sebesar Rp20.000.000 terdiri dari 40.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT PHC memiliki sebesar 70,00% atau sebanyak 7.000 saham dengan nilai sebesar Rp3.500.000.
- PT BJTI memiliki sebesar 30,00% atau sebanyak 3.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.

PT APBS

PT APBS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 21 April 2014 oleh Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Depok, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-06051.40.10.2014 tanggal 25 April 2014.

Modal dasar PT APBS adalah sebesar Rp750.000.000 terdiri dari 750.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT PMS memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 168.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp168.750.000.
- Van Oord memiliki sebesar 5,00% atau sebanyak 9.375.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp9.375.000.
- Gerbang Sarana Utama memiliki sebesar 5,00% atau sebanyak 9.375.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp9.375.000.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT PCN

PT PCN was established under Notarial Deed No. 35 dated January 11, 2016, by Notary Kukuh Muljo Rahardjo, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0002328.AH.01.01 Year 2016 dated January 15, 2016.

The authorized capital of PT PCN amounted to Rp20,000,000 composed of 40,000 shares with par value of Rp500,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PT PHC owns 70.00% or 7,000 shares amounting to Rp3,500,000.*
- *PT BJTI owns 30.00% or 3,000 shares amounting to Rp1,500,000.*

PT APBS

PT APBS was established under Notarial Deed No. 9 dated April 21, 2014 by Notary Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn, Notary in Depok, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-06051.40.10.2014 dated April 25, 2014.

The authorized capital of PT APBS amounted to Rp750,000,000 composed of 750,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PT PMS owns 90.00% or 168,750,000 shares amounting to Rp168,750,000.*
- *Van Oord owns 5.00% or 9,375,000 shares amounting to Rp9,375,000.*
- *Gerbang Sarana Utama owns 5.00% or 9,375,000 shares amounting to Rp9,375,000.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT PEL

PT PEL didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 9 September 2014 oleh Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-2963.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014.

Modal dasar PT PEL adalah sebesar Rp40.000.000 terdiri dari 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT PMS memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 9.000.000 saham dengan nilai sebesar Rp9.000.000.
- PT PEL (pembelian kembali) memiliki sebesar 9,00% atau sebanyak 900.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp900.000.
- PT BJTI memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 100.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

PT BMC

PT BMC didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 17 tanggal 16 Desember 2015, oleh Notaris Yohana S. Aminah Hadijanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kendal, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU.2473417.AH.01.01 tanggal 21 Desember 2015.

Modal dasar PT BMC adalah sebesar Rp1.000.000 terdiri dari 1.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT PMS memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 900 saham dengan nilai sebesar Rp900.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 10,00% atau sebanyak 100 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT PEL

PT PEL was established under Notarial Deed No. 2 dated September 9, 2014, by Notary Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-2963.40.10.2014 dated October 14, 2014.

The authorized capital of PT PEL amounted to Rp40,000,000 composed of 40,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PT PMS owns 90.00% or 9,000,000 shares amounting to Rp9,000,000.*
- *PT PEL (buyback) owns 9.00% or 900,000 shares amounting to Rp900,000.*
- *PT BJTI owns 1.00% or 100,000 shares amounting to Rp100,000.*

PT BMC

PT BMC was established under Notarial Deed No. 17 dated December 16, 2015, by the Notary Yohana S. Aminah Hadijanto, S.H., M.Kn., Notary in Kendal, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU.2473417.AH.01.01 dated December 21, 2015.

The authorized capital of PT BMC amounted to Rp1,000,000 composed of 1,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PT PMS owns 90.00% or 900 shares amounting to Rp900,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 10.00% or 100 shares amounting to Rp100,000.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT BMC (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 29 November 2019, oleh Notaris Amanda Mirza Ervariana, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik, dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0102677.AH.01.02 Tahun 2019. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- PT PMS memiliki sebesar 99,80% atau sebanyak 50.900 saham dengan nilai sebesar Rp50.900.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 0,20% atau sebanyak 100 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

PT LEGI

PT LEGI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 58 tanggal 8 Desember 2014, oleh Notaris Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0005031.AH.01.01 tanggal 3 Februari 2015.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam Akta Notaris No. 35 oleh Notaris Yatiningsih, S.H., M.H., tanggal 7 Juni 2017, para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan pemindahan hak saham PT TTL pada Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebanyak 91 saham atau sebesar Rp91.000. Penjualan saham tersebut telah disahkan dengan Akta Jual Beli saham No. 36 tanggal 7 Juni 2017 oleh Yatiningsih, S.H., M.H..

Modal dasar PT LEGI adalah sebesar Rp36.000.000 terdiri dari 36.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT TTL memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 9.009 saham dengan nilai sebesar Rp9.009.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT BMC (continued)

Based on Notarial Deed No. 5 dated November 29, 2019, by Notary Amanda Mirza Ervariana, S.H., M.Kn., Notary in Gresik, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter AHU-0102677.AH.01.02 Year 2019. The composition of the issued and fully paid capital as of December 31, 2019 are as follows:

- PT PMS owns 99.80% or 50,900 shares amounting to Rp50,900,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.20% or 100 shares amounting to Rp100,000.

PT LEGI

PT LEGI was established under Notarial Deed No. 58 dated December 8, 2014 by Notary Yatiningsih, S.H., M.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0005031.AH.01.01 on February 3, 2015.

Based on Extraordinary General Shareholders Meeting as stated in Notarial Deed No. 35 dated June 7, 2017 by Yatiningsih, S.H., M.H., the shareholders approved and authorized the transfer of shares from PT TTL to Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) amounting to 91 shares or equivalent to Rp91,000. The transfer of shares was approved by Deed of Sale and Purchase of shares No. 36 dated June 7, 2017 by Yatiningsih, S.H., M.H..

The authorized capital of PT LEGI amounted to Rp36,000,000 composed of 36,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT TTL owns 99.00% or 9,009 shares amounting to Rp9,009,000.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT LEGI (lanjutan)

Modal dasar PT LEGI adalah sebesar Rp36.000.000 terdiri dari 36.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut: (lanjutan)

- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 91 saham dengan nilai nominal sebesar Rp91.000.

PT TEDS

PT TEDS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 360 tanggal 29 September 2014, oleh Notaris Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-306131.40.10.2014 tanggal 21 Oktober 2014.

Modal dasar PT TEDS adalah sebesar Rp5.000.000 terdiri dari 10.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT PDS memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 3.960 saham dengan nilai sebesar Rp1.980.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 40 saham dengan nilai nominal sebesar Rp20.000.

PT Portek Indonesia

PT Portek Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 175 tanggal 21 September 1999 oleh Notaris Rahmat Santoso, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-2242 HT.01.01 TH2000 tanggal 14 Februari 2000.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT LEGI (continued)

The authorized capital of PT LEGI amounted to Rp36,000,000 composed of 36,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows: (continued)

- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.00% or 91 shares amounting to Rp91,000.*

PT TEDS

PT TEDS was established under Notarial Deed No. 360 dated September 29 2014, by Notary Yatiningsih, S.H., M.H., Notary in Surabaya, and was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-306131.40.10.2014 dated October 21, 2014.

The authorized capital of PT TEDS amounted to Rp5,000,000 composed of 10,000 shares with par value of Rp500,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PT PDS owns 99.00% or 3,960 shares amounting to Rp1,980,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.00% or 40 shares amounting to Rp20,000.*

PT Portek Indonesia

PT Portek Indonesia was established under Notarial Deed No. 175 dated September 21, 1999 by Notary Rahmat Santoso, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-2242 HT.01.01 TH2000 dated February 14, 2000.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT Portek Indonesia (lanjutan)

Modal dasar PT Portek Indonesia adalah sebesar USD2.000.000 (angka penuh) terdiri dari 400 saham dengan nilai nominal USD5.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 49,00% atau sebanyak 49 saham dengan nilai sebesar Rp2.670.500.
- Portek System & Equipment Pte Ltd., Singapura memiliki 51,00% atau sebanyak 51 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.779.500.

PT TPI

PT TPI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 10 April 2013, oleh Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-21873.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 24 April 2013.

Modal dasar PT TPI adalah sebesar Rp500.000.000 terdiri dari 500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT Portek Indonesia (continued)

The authorized capital of PT Portek Indonesia amounted to USD2,000,000 (full amount) composed of 400 shares with par value of USD5,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 49.00% or 49 shares amounting to Rp2,670,500.
- Portek System & Equipment Pte Ltd., Singapore owns 51.00% or 51 shares amounting to Rp2,779,500.

PT TPI

PT TPI was established under Notary Deed No. 36 dated April 10, 2013 by Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-21873.AH.01.01. Year 2013 dated April 24, 2013.

The authorized capital of PT TPI amounted to Rp500,000,000 composed of 500,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT Ambapers

PT Ambapers didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 26 Maret 2004 oleh Notaris Grace Senda Sardjito, S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-14469 HT.01.TH.2004 11 Juni 2004.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Akta Notaris No. 16 oleh Notaris Neddy Farmanto, S.H., tanggal 9 Maret 2018, para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan reklasifikasi sebagian saldo cadangan modal menjadi modal saham sehingga nilai modal disetor seluruhnya menjadi Rp5.000.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Akta Notaris No. 33 oleh Notaris Neddy Farmanto, S.H., tanggal 21 Maret 2017, para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan reklasifikasi sebagian saldo cadangan modal menjadi modal saham sehingga nilai modal disetor seluruhnya menjadi Rp6.000.000.

Modal dasar PT Ambapers adalah sebesar Rp20.000.000 terdiri dari 20.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 6.000 saham dengan nilai sebesar Rp6.000.000.
- PT Bangun Banua Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 60,00% atau sebanyak 9.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp9.000.000.

PT JBT

PT JBT didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 22 Agustus 2011 oleh Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H. dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-57740.AH.01.01.TH.2011 tanggal 25 November 2011.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT Ambapers

PT Ambapers was established under Notarial Deed No. 9 dated March 26, 2004 by Notary Grace Senda Sardjito, S.H., Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-14469 HT.01.TH.2004 dated June 11, 2004.

Based on General Shareholders Meeting as stated in Notarial Deed No. 16 dated March 9, 2018 by Neddy Farmanto, S.H., the shareholders approved and authorized the reclassification of the balance of capital reserve to become share capital so that the total paid up capital becomes Rp5,000,000.

Based on General Shareholders Meeting as stated in Notarial Deed No. 33 dated March 21, 2017 by Neddy Farmanto, S.H., the shareholders approved and authorized the reclassification of the balance of capital reserve to become share capital so that the total paid up capital becomes Rp6,000,000.

The authorized capital of PT Ambapers amounted to Rp20,000,000 composed of 20,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *The Company owns 40.00% or 6,000 shares amounting to Rp6,000,000.*
- *PT Bangun Banua Provinsi Kalimantan Selatan owns 60.00% or 9,000 shares amounting to Rp9,000,000.*

PT JBT

PT JBT was established under Notarial Deed No. 2 dated August 22, 2011 by Notary Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H. and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-57740.AH.01.01.TH.2011 dated November 25, 2011.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT JBT (lanjutan)

Modal dasar PT JBT adalah sebesar Rp745.434.000 terdiri dari 745.434 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 17,58% atau sebanyak 131.048 saham dengan nilai sebesar Rp131.048.000.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk memiliki 55,00% atau sebanyak 409.993 saham dengan nilai nominal sebesar Rp409.993.000.
- Pemerintah Provinsi Bali memiliki 8,01% atau sebanyak 59.707 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.707.000.
- Pemerintah Kabupaten Badung memiliki 8,01% atau sebanyak 59.707 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.707.000.
- PT Angkasa Pura I memiliki 8,00% atau sebanyak 59.635 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.635.000.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk memiliki 1,00% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Utama Karya (Persero) memiliki 1,00% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) memiliki 1,00% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki 0,40% atau sebanyak 2.982 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.982.000.

PT BKMS

PT BKMS didirikan dengan Akta Notaris No. 56 tanggal 18 Mei 2012 oleh Notaris Ardi Kristiar berkedudukan di Jakarta dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Notaris Andayani Risilawati SH., MH.,CN., No. 01 tanggal 19 Maret 2014 berkedudukan di Gresik, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0019775 tanggal 27 Maret 2015.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT JBT (continued)

The authorized capital of PT JBT amounted to Rp745,434,000 composed of 745,434 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 17.58% or 131,048 shares amounting to Rp131,048,000.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk owns 55.00% or 409,993 shares amounting to Rp409,993,000.
- Government of Bali Province owns 8.01% or 59,707 shares amounting to Rp59,707,000.
- Government of Badung District owns 8.01% or 59,707 shares amounting to Rp59,707,000.
- PT Angkasa Pura I owns 8.00% or 59,635 shares amounting to Rp59,635,000.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk owns 1.00% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.
- PT Utama Karya (Persero) owns 1.00% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.
- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) owns 1.00% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk owns 0.40% or 2,982 shares amounting to Rp2,982,000.

PT BKMS

PT BKMS was established Notarial Deed, No. 56 dated May 18, 2012 by Notary Ardi Kristiar, in Jakarta and has recent amended by Notary Andayani Risilawati, SH., MH., CN., No. 01 dated March 19, 2014 domiciled in Gresik, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0019775 dated March 27, 2015.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (lanjutan)**

PT BKMS (lanjutan)

Modal dasar PT BKMS adalah sebesar Rp4.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 800.000 saham dengan nilai sebesar Rp800.000.000.
- PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN) memiliki 60,00% atau sebanyak 1.200.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.200.000.000.

PT TNU

PT TNU didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 89 tanggal 23 Agustus 2013 oleh Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-13479.AH.01.01 tahun 2014.

Modal dasar PT TNU adalah sebesar Rp40.000.000 terdiri dari 40.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 68.500 saham dengan nilai sebesar Rp68.500.000.
- PT Andahanesa Abadi memiliki 60,00% atau sebanyak 102.750 saham dengan nilai nominal sebesar Rp102.750.000.

PT EMS

PT EMS didirikan berdasarkan Akta No.14 tanggal 5 Maret 2015 dari Yulia, SH., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010566.AH.01.01 tanggal 6 Maret 2015.

1. GENERAL (continued)

**b. Subsidiaries, Associates and Joint
Operation (continued)**

PT BKMS (continued)

The authorized capital of PT BKMS amounted to Rp4,000,000,000 composed of 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT BJTI owns 40.00% or 800,000 shares amounting to Rp800,000,000.
- PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN) owns 60.00% or 1,200,000 shares amounting to Rp1,200,000,000.

PT TNU

PT TNU was established under Notarial Deed No. 89 dated August 23, 2013 of Notary Yulia, SH., Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-13479.AH.01.01 2014.

The authorized capital of PT TNU amounted to Rp40,000,000 composed of 40,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT BJTI owns 40.00% or 68,500 shares amounting to Rp68,500,000.
- PT Andahanesa Abadi owns 60.00% or 102,750 shares amounting to Rp102,750,000.

PT EMS

PT EMS was established under Notarial Deed No. 14 dated March 5, 2015 by Yulia, SH., Notary in Jakarta., and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0010566.AH.01.01 dated March 6, 2015.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT EMS (lanjutan)

Modal dasar PT EMS adalah sebesar Rp4.000.000 terdiri dari 4.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 30,00% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.
- PT UEPN memiliki 45,00% atau sebanyak 450 saham dengan nilai nominal sebesar Rp450.000.
- PT Santiniluwansa Lestari memiliki 15,00% atau sebanyak 150 saham dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.
- PT Amanah Indo Invest memiliki 10,00% atau sebanyak 100 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

PT LNG

PT LNG didirikan berdasarkan Akta No.01 tanggal 1 Oktober 2019 dari Heni Yuniartin, SH., M.Kn., Notaris di Sidoarjo dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0051386.AH.01.01 tanggal 5 Oktober 2019.

Modal dasar dan disetor PT LNG masing-masing sebesar Rp580.000.000.000 dan Rp145.000.000.000, yang terdiri dari 145.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- PT PGN LNG Indonesia (PLI) memiliki sebesar 51,00% atau sebanyak 73.950 saham dengan nilai sebesar Rp73.950.000.
- PT PEL memiliki sebesar 49,00% atau sebanyak 71.050 saham dengan nilai sebesar Rp71.050.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT EMS (continued)

The authorized capital of PT EMS amounted to Rp4,000,000 composed of 4,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT BJTI owns 30.00% or 300 shares amounting to Rp300,000.
- PT UEPN owns 45.00% or 450 shares amounting to Rp450,000.
- PT Santiniluwansa Lestari owns 15.00% or 150 shares amounting to Rp150,000.
- PT Amanah Indo Invest owns 10.00% or 100 shares amounting to Rp100,000.

PT LNG

PT LNG was established under Notarial Deed No. 01 dated October 1, 2019 by Heni Yuniartin, SH., M.Kn., Notary in Sidoarjo, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0051386.AH.01.01 dated October 5, 2019.

The authorized capital and issued and paid capital of PT LNG totaling Rp580,000,000,000 and Rp145,000,000,000 respectively, which consists of 145,000 shares with nominal value per share of Rp1,000,000 (full amount). The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT PGN LNG Indonesia (PLI) owns 51.00% or 73,950 shares amounting to Rp73,950,000.
- PT PEL owns 49.00% or 71,050 shares amounting to Rp71,050,000.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

- c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Negara BUMN sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK-206/MBU/09/2019 tanggal 30 September 2019 dan No. SK-219/MBU/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Ahmad Bambang
Komisaris Independen	Heddy Lugito
Komisaris Independen	Zainal Abidin
Komisaris	Wahju Satrio Utomo
Komisaris	Dedi Syarif Usman

Dewan Direksi

Direktur Utama	Doso Agung
Direktur Operasi dan Komersial	Putut Sri Mulyanto
Direktur Teknik	Joko Noerhudha
Direktur Sumber Daya Manusia	Toto Heliyanto
Direktur Keuangan	Irvandi Gustari
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Toto Nugroho

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Negara BUMN sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 20 September 2018 dan SK-289/MBU/11/2018 tanggal 9 November 2018, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Hari Bowo
Komisaris Independen	Heddy Lugito
Komisaris Independen	Zainal Abidin
Komisaris	Wahju Satrio Utomo
Komisaris	Dedi Syarif Usman

Dewan Direksi

Direktur Utama	Doso Agung
Direktur Operasi dan Komersial	Putut Sri Mulyanto
Direktur Teknik	Joko Noerhudha
Direktur Sumber Daya Manusia	Toto Heliyanto
Direktur Keuangan	Iman Rachman
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Toto Nugroho

1. GENERAL (continued)

- c. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Good Corporate Governance Committee and Risk Management, Corporate Secretary and Employees

Based on the Statement of Decree of the Minister of State Owned Enterprise (SOE) in lieu of the General Meeting of the Company's Shareholders No. SK-206/MBU/09/2019 dated September 30, 2019 and No. SK-219/MBU/10/2019 dated October 23, 2019, the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2019 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Operational and Commercial Director
Technical Director
Human Resources Director
Finance Director
Business Transformation and Development Director

Based on the Statement of Decree of the Minister of State Owned Enterprise (SOE) in lieu of the General Meeting of the Company's Shareholders No. SK-244/MBU/09/2018 dated September 20, 2018, and SK-289/MBU/11/2018 dated November 9, 2018, the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2018 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Operational and Commercial Director
Technical Director
Human Resources Director
Finance Director
Business Transformation and Development Director

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

- c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)**

Susunan Komite Audit, Komite *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Zainal Abidin
Anggota	Andi Sudhana
Anggota	Mohammad Rizqa

Komite Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko

Ketua	Heddy Lugito
Anggota	Darmansyah
Anggota	Tubagus Arief Fahmi

Sekretaris Perusahaan

Ardhy Wahyu Basuki

Susunan Komite Audit, Komite *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Zainal Abidin
Anggota	Andi Sudhana
Anggota	Amilin

Komite Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko

Ketua	Heddy Lugito
Anggota	Pandu Fajar Wisudha
Anggota	Tubagus Arief Fahmi

Sekretaris Perusahaan

Faruq Hidayat

Total karyawan tetap Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebanyak 4.573 dan 4.855 karyawan (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

- c. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Good Corporate Governance Committee and Risk Management, Corporate Secretary and Employees (continued)**

The Company's Audit Committee, Good Corporate Governance Committee and Risk Management and Corporate Secretary as of December 31, 2019 are as follows:

Audit Committee

Chairman
Member
Member

Good Corporate Governance Committee and Risk Management

Chairman
Member
Member

Corporate Secretary

The Company's Audit Committee, Good Corporate Governance Committee and Risk Management and Corporate Secretary as of December 31, 2018 are as follows:

Audit Committee

Chairman
Member
Member

Good Corporate Governance Committee and Risk Management

Chairman
Member
Member

Corporate Secretary

Total permanent employees of the Group as of December 31, 2019 and 2018 are 4,573 and 4,855 employees, respectively (unaudited).

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Mata Uang Pelaporan

Mata uang pelaporan Kelompok Usaha adalah Rupiah.

e. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 23 Maret 2020. Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam Catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

1. GENERAL (continued)

d. Reporting Currency

The Group's reporting currency is Rupiah.

e. Completion of consolidated financial statements

The consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2019 and for the year then ended are completed and authorized for issuance on March 23, 2020. The Company's Directors are responsible for the fair preparation and presentation of such consolidated financial statements.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which comprises the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared on an accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts that were measured by using a basis as disclosed in the relevant Notes.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Kelompok Usaha seperti yang disebutkan pada Catatan 1.

Perusahaan memiliki kontrol atas entitas anak apabila Perusahaan memiliki dampak dari atau memiliki hak atas penerimaan/imbalance hasil variabel dari hubungannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk penerimaan tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang material telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Nonpengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak.
- menghentikan pengakuan nilai tercatat setiap KNP.
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada.
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima.
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya.
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Group mentioned in Note 1.

The Company have control over the subsidiaries when the Company have an impact to, or has right of, variable return from its involvement with the subsidiaries and has the ability to affect those returns through its power over the subsidiaries.

All material intercompany transactions and balances have been eliminated in the consolidated financial statements.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtained control and continue to be consolidated until the date such control ceases.

Losses of a subsidiary that is not fully owned by the Company are attributed to Non-controlling Interest (NCI) even if that will result in a deficit balance.

If it loses control over a subsidiary, the Group:

- derecognizes the assets (including any *goodwill*) and liabilities of the subsidiaries.
- derecognizes the carrying amount of any NCI.
- derecognizes any cumulative translation differences recorded in equity.
- recognizes the fair value of the consideration received.
- recognizes the fair value of any investment retained.
- recognizes any surplus or deficit in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and
- reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh entitas induk yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Kelompok Usaha pada suatu entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Kelompok Usaha dan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah KNP disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing".

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian dan aset takberwujud.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

NCI reflects the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries entity that not attributable directly or indirectly by the parent company which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.

Changes in the Group's ownership interest in a subsidiary that do not impact in loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's and non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. Any differences between the amount by which the NCI are adjusted and the fair value of consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent entity.

c. Foreign currency transactions and balances

The Group applied PSAK 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates".

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency and presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, except for foreign exchange difference that can be attributed to qualifying assets which are capitalized to construction in progress and intangible assets.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
(lanjutan)**

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (nilai penuh):

	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Dolar Amerika Serikat (USD) 1	13.901

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Kelompok Usaha memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, seperti yang dijelaskan dalam PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

f. Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Persediaan terdiri dari suku cadang kapal dan crane, bahan bakar, alat tulis kantor, obat dan alat-alat medis.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**c. Foreign currency transactions and balances
(continued)**

Below are the major exchange rates used for translation as of December 31, 2019 and 2018 (full amount):

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	14.481	United States Dollar (USD) 1

Exchange differences arising on the settlement of monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

d. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties, as defined in PSAK 7 (revised 2010), "Related Party Disclosures".

The transactions are made based on terms agreed by the parties.

e. Cash and cash equivalent

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all investments with maturities of three months or less from the date of placement that were not used as collateral and are unrestricted.

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year are presented as short-term investments.

f. Inventory

Inventory was recorded using the weighted average method. Inventories consists of ship and crane spare part, fuels, office supplies, medicine and medical instruments.

Allowance for inventory obsolescence is defined based on analysis of inventory condition on the date of reporting of financial position.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

g. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka dibebankan pada operasi sesuai dengan masa manfaatnya.

h. Investasi pada entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh perusahaan di mana Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendali. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas dan pada awalnya diakui sebesar harga perolehan. Investasi pada entitas asosiasi tersebut termasuk *goodwill* diidentifikasi ketika akuisisi dikurangi rugi penurunan nilai.

Bagian Kelompok Usaha atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca-akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lainnya pasca-akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lainnya. Mutasi penghasilan komprehensif pasca-akuisisi disesuaikan terhadap nilai tercatat investasinya, jika bagian Kelompok Usaha atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan.

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Kelompok Usaha memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul dari investasi pada entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kelompok Usaha menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal Kelompok Usaha tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi dan mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang mana hilangnya pengaruh signifikan tersebut tidak mengakibatkan entitas asosiasi menjadi entitas anak atau pengaturan bersama sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 66, "Pengaturan Bersama".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Prepaid expenses

Prepaid expenses are charged to operations over the benefit periods.

h. Investment in associates

Associates entities over which the Group has significant influence but not control. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting and are initially recognized at cost. The Group's investment in associates including goodwill is identified on acquisition, net of impairment loss.

The Group's share of profits or losses in its associates post acquisition is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. Their share of post acquisition movement in other comprehensive income is recognized as other comprehensive income. The cumulative post-acquisition movements are adjusted against the carrying amount of the investment, when the Group's share of losses in an associate exceeds its interest in the associates, including any unsecured receivable.

The Group does not recognize for the losses unless they have incurred obligation or made payments on behalf of the associates. Diluted gains and losses arising in investments in associates are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the Group ceases to have significant influence over an associate and records for the investment in accordance with PSAK 55 (Revised 2014), "Financial Instrument: Recognition and Measurement", from that date, provided the associate does not become a subsidiary or a joint arrangement as defined in PSAK 66, "Joint Arrangement".

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

h. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Ketika kehilangan pengaruh signifikan, maka Kelompok Usaha mengukur setiap investasi yang tersisa pada entitas asosiasi pada nilai wajar. Kelompok Usaha mengakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian setiap selisih antara:

- nilai wajar investasi yang tersisa dan hasil pelepasan sebagian kepemilikan pada entitas asosiasi; dengan
- jumlah tercatat investasi dalam tanggal ketika hilangnya pengaruh signifikan.

Ketika investasi dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dan dicatat sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2014), maka nilai wajar investasi ketika dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2014).

i. Properti investasi

Properti investasi merupakan properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai Kelompok Usaha untuk menghasilkan *rental* atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi tersebut.

Kelompok Usaha telah memilih model biaya untuk mencatat properti investasinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi yang berupa tanah dan bangunan (10-50 tahun).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Investment in associates (continued)

On the loss of significant influence, the Group shall measure at fair value any investment the investor retains in the former associate. The Group shall recognize in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income any difference between:

- *the fair value of any retained investment and any proceeds from disposing of the part of the interest in the associate; and*
- *the carrying amount of the investment at the date when significant influence is lost.*

When an investment ceases to be an associate and is recorded for in accordance with PSAK 55 (Revised 2014), the fair value of the investment at the date when it ceases to be an associate shall be regarded as its fair value on initial recognition as a financial asset in accordance with PSAK 55 (Revised 2014).

i. Investment properties

Investment properties represent properties (land or building - or part of a building - or both) held by the Group to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. The carrying amount includes the cost of replacement of an existing investment property in the year such costs are incurred, if the recognition criteria are met and does not include the cost of daily use of the investment property.

The Group has chosen the cost model to record for its investment properties.

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of investment properties which consist of land and building (10-50 years).

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

i. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

j. Aset tetap

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan yang lebih pendek antara estimasi umur manfaat ekonomis dan masa konsesi sebagai berikut:

Jenis Aset	Tahun/Years
Bangunan fasilitas pelabuhan	2 - 50
Kapal	4 - 20
Alat fasilitas pelabuhan	2 - 20
Instalasi fasilitas pelabuhan	2 - 50
Jalan dan bangunan	2 - 50
Peralatan	3 - 25
Kendaraan	4 - 5
Emplasemen	3 - 50

Sejak 1 Juli 2016, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Alat Fasilitas Pelabuhan dicatat pada nilai revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup berkala untuk memastikan bahwa jumlah yang tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Investment properties (continued)

Investment properties are derecognized when either it has been disposed of or when it is permanently withdrawn from use and no future benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the retirement or disposal of investment properties are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the period of retirement or disposal.

j. Fixed assets

All fixed assets are initially recognized at cost which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for the assets to be capable of operating in the manner intended by management.

After initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation of fixed assets starts when it is available for intended use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets whichever lower between the estimated economic useful life and concession period as follows:

Type of Assets
Port facility
Ships
Port facility equipment
Port facility installation
Building and roads
Equipments
Vehicles
Emplacement

Since July 1, 2016, Port Facility Buildings and Port Facility Equipments are stated at their revalued amount. Revaluations are performed with sufficient regularity such that the carrying amount is not different materially from that which would be determined using fair values at the statement of financial position.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

j. Aset tetap (lanjutan)

Kenaikan yang berasal dari revaluasi Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Alat Fasilitas Pelabuhan tersebut langsung dikreditkan ke surplus revaluasi pada bagian penghasilan komprehensif lain, kecuali sebelum penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini, kenaikan revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi aset tetap dibebankan dalam laba rugi apabila penurunannya tersebut melebihi saldo akun surplus revaluasi aset tetap yang berasal dari revaluasi sebelumnya, jika ada.

Kelompok Usaha menetapkan bahwa:

- Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan cara dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut.
- Surplus revaluasi aset tetap yang termasuk dalam ekuitas dipindahkan ke dalam saldo laba pada saat penghentian/pelepasan aset oleh entitas. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laba rugi.

Perusahaan menerapkan ISAK 25 tentang "Hak Atas Tanah", yang menyatakan bahwa hak atas tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Biaya pengurusan legal atas hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari perolehan tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Fixed assets (continued)

Any revaluation increase arising from the revaluation of such Building Port Facility and Port Facility Tool is credited to fixed asset revaluation surplus in the other comprehensive income section, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which case the increase is credited to profit or loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising from the evaluation of such fixed asset is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any, held in the fixed asset revaluation surplus relating to a previous revaluation of such fixed asset, if any.

The Group's decided to:

- Accumulated depreciation at the date of revaluation to be treated by eliminating the gross carrying amount and the carrying amount of net assets after elimination is restated as revaluation amount of assets.
- The revaluation surplus included in equity is transferred to retained earnings upon termination/disposal of assets by the entity. Transfer of revaluation surplus to retained earnings is not made through profit or loss.

The Company adopted Interpretation of ISAK 25 on "Land Rights", which states that land rights are stated at cost and not depreciated, unless there is contrary evidence indicating that the extension or renewal of land is likely or definitely not be obtained. The cost of legal rights to land when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition of land. The cost of the extension or renewal of legal rights to land is recognized as intangible assets and amortized over the life of the legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

j. Aset tetap (lanjutan)

Biaya perbaikan dan pemugaran terminal pelabuhan dan lahan penumpukan yang dioperasikan oleh entitas anak dalam jangka waktu tertentu dikapitalisasi pada saat terjadinya dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sampai dengan masa perbaikan berikutnya atau jangka waktu operasional entitas anak berakhir.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada perhitungan laba (rugi) pada saat terjadinya. Pemugaran yang menambah masa manfaat suatu aset tetap dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tingkat penyusutan aset yang bersangkutan.

Biaya pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan

Masa manfaat dalam mempertahankan kedalaman alur dan kolam pelabuhan tersebut adalah 5 tahun dan sisa masa amortisasi akan dibebankan sekaligus apabila pekerjaan pengerukan tersebut perlu dilakukan kembali.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

k. Sewa

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau mengandung sewa adalah berdasarkan substansi dari perjanjian tersebut pada penetapan awal. Perjanjian dievaluasi apakah pemenuhannya tergantung kepada penggunaan aset atau aset-aset tertentu secara spesifik atau perjanjian mengalihkan hak untuk menggunakan aset atau aset-aset, walaupun hak tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Fixed assets (continued)

The costs of repairs and restoration of port terminals and container yard operated by the subsidiaries within a certain period of time are capitalized when incurred and amortized on a straight line basis until the time of the next repair or operating period of the subsidiaries ends.

The routine repair and maintenance are expensed to profit (loss) as incurred. Repairs which add useful life of the fixed assets are capitalized and depreciated at their applicable depreciation rates.

Dredging costs of shipping channels and port waters

The useful life of depths obtained on the dredged channels and port waters is 5 years and the remaining amortization period will be expensed off at a point when the dredging works need to be done before that period ends.

Major spare parts and stand-by equipments are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

k. Lease

In determining of whether an arrangement is, or contains, a lease, is based on the substance of the arrangement at the inception date. The arrangement is assessed for whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets or the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

k. Sewa (lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai lessee

Sewa pembiayaan yang mengalihkan kepada Kelompok Usaha secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar dari aset sewaan atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dipisahkan antara beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Beban keuangan diakui sebagai beban pendanaan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Sebuah aset sewaan disusutkan selama masa manfaat dari aset tersebut. Tetapi, jika tidak terdapat kepastian memadai bahwa Kelompok Usaha akan memperoleh kepemilikan di akhir masa sewa, maka aset disusutkan selama mana yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat aset dan masa sewa.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian secara garis lurus selama masa sewa.

Kelompok Usaha sebagai lessor

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasional jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut.

Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Lease (continued)

The Group as a lessee

A finance lease that transfers to the Group substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item is capitalized at the commencement of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognized as financing cost in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognized as an operating expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the lease term.

The Group as a lessor

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership. Leases are classified as operating leases if the lease does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

In a finance lease, the lessor recognizes finance lease assets such as receivables in the consolidated statements of financial position at an amount equal to the net lease investment.

The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the lessor's net investment in the finance lease.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

I. Aset takberwujud

Aset takberwujud Kelompok Usaha terdiri dari aset hak atas tanah, aset hak konsesi, piranti lunak, *goodwill*, merk dagang dan biaya ditanggungkan.

Aset takberwujud diakui jika Kelompok Usaha kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat: i) dilepaskan; atau ii) ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya-biaya sehubungan dengan perolehan sistem perangkat lunak yang mempunyai masa manfaat 4-5 tahun, ditanggungkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih biaya perolehan atas kepemilikan Kelompok Usaha terhadap nilai wajar aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali diukur pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pada tanggal akuisisi.

Goodwill tidak diamortisasi namun penurunan nilainya dievaluasi setidaknya secara tahunan atau lebih, bila terdapat indikasi penurunan nilai. Untuk keperluan pengujian penurunan nilai, *goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas yang diharapkan dapat memanfaatkan sinergi dari kombinasi bisnis.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Intangible assets

Intangible assets of the Group consist of land rights, concession rights asset, software, goodwill, trademark and deferred charges.

Intangible assets are recognized if the Group will obtain useful economic benefit from the intangible assets and the cost of assets can be reliably measured.

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and impairment loss, if any.

An intangible asset shall be derecognized: i) on disposal; or ii) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Software

Software represents expenses relating to systems software cost, whose benefits extend over a period of 4-5 years, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

Goodwill

Goodwill represents the excess of acquisition cost of the Group ownership over the fair value of the acquiree's net asset. Non-controlling interest is measured at proportional of non-controlling interest ownership over net asset which identified on the acquisition date.

Goodwill is not amortized but the impairment value is reviewed at least annually or more frequently when there is an indication of impairment value. For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the cash-generating units expected to benefit from the synergies of the business combination.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

I. Aset takberwujud (lanjutan)

Jika jumlah tercatat dari unit penghasil kas tersebut kurang dari nilai tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan terlebih dahulu untuk mengurangi nilai tercatat *goodwill* pada unit penghasil kas tersebut dan kemudian pada aset lainnya dari unit penghasil kas tersebut atas dasar proporsional. Kerugian penurunan nilai *goodwill* tidak dipulihkan pada tahun berikutnya.

Goodwill dievaluasi dengan mempertimbangkan hasil usaha tahun berjalan dan prospek di masa yang akan datang dari entitas anak secara berkala.

Aset Hak Konsesi

Kelompok Usaha telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" sehubungan dengan Hak Konsesi.

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Kelompok Usaha membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset hak konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset hak konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jasa kepelabuhanan yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi diakui sebagai aset hak konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset hak konsesi tersebut siap digunakan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Intangible assets (continued)

If the recorded amount of the cash generating unit is less than its carrying amount, the impairment losses are allocated firstly to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets using prorata basis. An impairment loss of goodwill is not reversed in the subsequent period.

Goodwill is evaluated periodically by considering the current year operating results and future prospects of the subsidiary.

Concession Rights Assets

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" related to the concession rights.

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession rights assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession rights assets are sea port services concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation. During the construction period, the accumulated construction cost is recognized as concession rights assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession rights assets are ready to be operated.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

I. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Aset hak konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset hak konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tanpa syarat.

Kelompok Usaha mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Kelompok Usaha menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Kelompok Usaha diakui pada nilai wajar.

Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS")

Kontrak konstruksi APBS merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan yang dikeluarkan sehubungan dengan proses persiapan pembangunan dan seluruh biaya konstruksi pembangunan pengerukan alur (*Capital Dredging*) dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung serta biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong ("TMTL")

Kontrak konstruksi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan aset hak konsesi TMTL yang meliputi biaya pengadaan tanah, proses studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Intangible assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

The concession rights assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession rights assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Kementerian Perhubungan Republik Indonesia for no consideration.

The Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS")

Construction contract of APBS is the cost directly attributable to the construction incurred in relation to the preparation process for construction, the entire cost of dredging construction (*Capital Dredging*), other costs related directly, and costs of borrowing related directly used to fund these asset constructions are capitalized until the construction is completed and in operation.

Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong ("TMTL")

Construction contract is the cost directly attributable to the construction of TMTL concession rights assets which includes land acquisition, feasibility studies and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required, plus costs of borrowing directly used for financing the construction of concession rights asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

I. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

**Terminal Multipurpose Teluk Lamong
("TMTL") (lanjutan)**

Aset hak konsesi dicatat sebesar nilai wajar, yaitu sebesar biaya konstruksi pembangunan aset hak konsesi ditambah dengan margin konstruksi yang ditentukan manajemen.

Aset hak konsesi APBS dan TMTL akan diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode garis lurus.

**Terminal Pelabuhan Manyar Gresik
("TPMG")**

Aset hak konsesi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan aset hak konsesi TPMG yang meliputi biaya pembangunan fasilitas pelabuhan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan.

Aset konsesi diamortisasi selama periode aset diharapkan dapat digunakan oleh Perusahaan dengan metode garis lurus selama periode umur aset sampai dengan akhir periode konsesi

Kelompok Usaha mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset hak konsesi sebagai aset takberwujud di mana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Intangible assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

**Terminal Multipurpose Teluk Lamong
("TMTL") (continued)**

Concession rights assets are recorded at fair value, i.e. construction cost of concession rights assets plus a profit margin determined by the management.

Concession rights asset of APBS and TMTL are amortized over the concession period using the straight-line method.

Manyar Gresik Terminal Port ("TPMG")

Concession rights asset is the cost directly attributable to the construction of concession rights assets TPMG which includes cost of port development and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required.

The concession assets are amortized over the period of assets can be used by the Company on a straight-line method over the period of the asset until the end of the concession period.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession rights asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract.

Construction cost is the value of the construction contract.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

l. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

**Terminal Pelabuhan Manyar Gresik
("TPMG") (lanjutan)**

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Aset takberwujud yang melekat pada suatu komponen fisik dan bukan merupakan bagian yang signifikan dari suatu aset fisik, diakui sebagai bagian dari aset berwujud dan diperlakukan sebagai aset tetap.

Umur manfaat suatu aset takberwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya tidak boleh melebihi periode hak kontraktual atau hak hukum lainnya tersebut. Akan tetapi, jika hak kontraktual atau hak hukum lainnya tersebut dapat diperbarui, maka umur manfaat mencakup periode yang diperbarui, hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan yang dilakukan oleh estimasi tanpa biaya yang signifikan.

m. Kapitalisasi biaya pinjaman

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 26 (Revisi 2011), "Biaya Pinjaman".

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan pinjaman dana.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

l. Intangible assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

**Manyar Gresik Terminal Port ("TPMG")
(continued)**

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.

Intangible assets that are attached to a physical component and are not a significant part of a physical asset, is recognized as part of the tangible assets and treated as fixed assets.

Useful life of an intangible asset that arises from contractual or other legal rights shall not exceed the period of the contractual or other legal rights. However, if the contractual or other legal rights can be renewed, the useful life shall include renewal period, only if there is an evidence to support that renewal is performed without significant cost.

m. Capitalization of borrowing costs

The Group implemented PSAK 26 (Revised 2011), "Borrowing Costs".

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction and production of the qualifying assets are capitalized as a part of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

m. Kapitalisasi biaya pinjaman (lanjutan)

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai maksudnya.

n. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka atas pemakaian lahan dan bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar atas pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

o. Pendapatan dan beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara andal.

Berikut merupakan kriteria pengakuan pendapatan yang harus dipenuhi sehingga pengakuan dapat diakui:

- Pendapatan jasa kapal, jasa terminal petikemas, jasa barang, jasa terminal dan logistik diakui pada saat transaksi jasa telah selesai dilakukan.
- Pendapatan pelayanan kesehatan diakui pada saat jasa telah diberikan atau saat barang medis telah diserahkan kepada pasien.
- Penghasilan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang sesuai.
- Pendapatan sewa tanah dan bangunan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.
- Pendapatan dividen diakui pada saat hak Kelompok Usaha untuk menerima pembayaran dividen ditetapkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Capitalization of borrowing costs
(continued)**

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are completed for their intended use.

n. Unearned revenues

Unearned revenues from usage of land and buildings are amortized over the usage term using the straight-line method. The non-current portion of unearned revenues is shown as part of "long-term liabilities" in the consolidated statements of financial position.

o. Revenues and expenses

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured.

The criteria of revenue recognition are as follows:

- *Revenue from ship services, container services, goods services, terminal services and logistic are recognized when the transactions have been performed.*
- *Revenue from medical services is recognized when the services rendered or when the medical items have been delivered to the patients.*
- *Interest income is accrued on time basis, with reference to the outstanding principal and the applicable interest rate.*
- *Land and building rental revenue is recognized on a straight line basis over the term of the lease contracts.*
- *Dividend revenue is recognized when the Group's right to receive the dividend payment is established.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Pendapatan dan beban (lanjutan)

- Pendapatan jasa pengerukan diakui berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan aktual. Persentase pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan tetapi belum ditagihkan dicatat sebagai pendapatan masih akan diterima. Selisih lebih antara pembayaran yang diterima dan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka.
- Pendapatan Kerjasama Mitra: Perusahaan bekerja sama dengan mitra bisnis untuk melakukan pekerjaan tertentu atau operasi tanah dan wadah kegiatan bongkar muat. Kerjasama dengan mitra usaha adalah berdasarkan perjanjian kontrak dengan periode waktu yang disepakati bersama. Pendapatan dari mitra usaha patungan diakui berdasarkan faktur bruto (*invoice*) yang diterbitkan oleh perusahaan kepada pihak ketiga. Biaya yang berkaitan dengan pendapatan usaha bersama mitra disajikan dalam "biaya operasional".
- Pendapatan konstruksi. Kelompok Usaha mengakui aset takberwujud atas jasa konstruksi dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan basis kontrak biaya-plus.
- Pendapatan atau penjualan barang diakui pada saat risiko dan hak atas kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pembeli.

Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Revenues and expenses (continued)

- Revenue from dredging services is recognized based on actual percentage of work completion. Percentage of work that has been completed based on memorandum of work completion but not yet been billed are recorded as accrued income. The excess of payments received and the value of work completed are recorded as unearned revenue.
- Revenue of Partner Cooperation: The Company is cooperating with business partners to carry out a particular job or operation of land and container loading and unloading activities. Cooperation with business partners is based on contractual agreements with mutually agreed time period. Revenue from joint venture partners are recognized based on gross invoices issued by the Company to third parties. Expenses which relate to the revenue of the joint venture partners are presented as "operating expenses".
- Construction revenues. The Group recognizes intangible assets of construction services in which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. In the construction period, the Group recorded intangible assets and recognize revenues and costs of construction by using cost-plus contract basis.
- Revenue or sales of goods are recognized when the risks and rights of ownership of goods have passed significantly to the buyer.

Expenses are recognized when incurred on accrual basis.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Beban konstruksi diakui sejak kegiatan konstruksi dimulai sampai dengan proses pembangunan aset selesai dan siap untuk digunakan.

Kelompok Usaha mencatat pendapatan dan beban konstruksi bersamaan dengan pengakuan aset takberwujud pada tahap konstruksi.

p. Imbalan kerja

Imbalan pascakerja

Kelompok Usaha menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetapnya yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai yang ditentukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku. Liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai tersebut dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia normal pensiun dari Program Pensiun dengan imbalan sesuai dengan KKB, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi pemberi kerja dan hasil pengembangannya. Jika bagian pemberi kerja pada imbalan Program Pensiun kurang dari imbalan yang diharuskan oleh KKB, Perusahaan akan mencadangkan kekurangan tersebut.

Kelompok Usaha memberikan imbalan kerja lainnya, seperti imbalan kesehatan dan uang penghargaan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini diakru sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Revenues and expenses (continued)

Construction cost are recognized during construction stage up to construction activity was finished and asset ready to use.

The Group accounted for construction revenue and construction cost at the same time of recognition of intangible asset during construction phase.

p. Employee benefits

Post-employment benefits

The Group has a defined contribution retirement plan (Pension Plan) covering all of its qualified permanent employees and an unfunded employee benefit liability determined in accordance with the existing Collective Labor Agreement (CLA). The unfunded employee benefit liability is calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the Pension Plan with the benefit as stipulated in the CLA, after deducting the accumulated employer contribution and the related investment results. If the employer-funded portion of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by the CLA, the Company reserves for such shortfall.

The Group also provides other post-employment benefits, such as healthcare benefits and service pay to their retirees. The entitlement to these benefits is usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The estimation costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to defined benefit pension plans.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

p. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Beban untuk imbalan kerja berdasarkan KKB/UU/imbalan kesehatan pascakerja ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Laba atau rugi aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi total 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (*present value of the defined benefit obligation*) pada tanggal tersebut.

Keuntungan atau kerugian yang melebihi ketentuan 10% diakui selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang terjadi ketika Perusahaan memperkenalkan program imbalan pasti atau terjadinya perubahan atas imbalan yang terutang dari program yang berlaku saat ini harus diamortisasi selama periode sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan (*vested*).

Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and prior service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

The costs of providing employee benefits under the CLA/Law/post-retirement healthcare benefits plan are determined using the projected-unit-credit method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date.

These gains or losses in excess of the 10% threshold are amortized on a straight-line basis over the average of remaining working period of the employees estimates. Further, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Other long-term employment benefits including the long services leave benefit are determined in compliance with the Company's Regulation. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the year of employment, using the method which is applied in calculating obligation for post-employment benefits. These obligations are calculated on a minimum once a year by an independent actuary. Other long-term employment benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

p. Imbalan kerja (lanjutan)

Program iuran pasti

Program iuran pasti merupakan program imbalan pascakerja, di mana entitas membayar iuran tetap kepada suatu entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum ataupun konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Kewajiban untuk membayar iuran secara berkala merupakan biaya imbalan kerja karyawan untuk periode di mana jasa diberikan oleh pekerja.

q. Perpajakan

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46. Oleh karena itu, Kelompok Usaha memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penghasilan sewa tanah dan bangunan sebagai pos tersendiri.

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasi dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Employee benefits (continued)

Defined contribution plans

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan in which the entity pays fixed contributions into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for the regular contributions constitute employee benefit costs for the period during which services are rendered by employees.

q. Taxation

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determines that certain taxable income is subjected to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to revised PSAK 46 as mentioned above, final tax is no longer governed by PSAK 46. Therefore, the Group has decided to present all of the final tax arising from land and building rent revenue as separate line item.

The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

q. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Kelompok Usaha mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Taxation (continued)

Current Tax (continued)

Underpayment/overpayment of income tax is presented as part of "Corporate Income Tax - Current" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if filed an objection, when the result of the objection is determined.

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Group reassesses unrecognized deferred tax assets. The Group recognizes a previous unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

q. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

r. Instrumen keuangan

i). Aset keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika dibolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.

Semua aset keuangan diakui pertama kali pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali apabila aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan Kelompok Usaha mencakup kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi jangka panjang dan aset tidak lancar lainnya diklasifikasikan sebagai "Pinjaman yang diberikan dan Piutang".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to the items that are previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statements of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

r. Financial instruments

i). Financial assets

Initial recognition

Financial assets within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments and available-for-sale financial assets, as appropriate. The Group determines the classification of the financial assets upon initial recognition and, if allowed and appropriate, will re-evaluate this designation at the end of each financial year.

Financial assets are recognized initially at fair value plus directly attributable transaction costs, except if the financial assets are recorded at fair value through profit or loss.

The financial assets of the Group, which include cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, accrued revenues, long-term investment and other non-current assets, are all classified as "Loans and Receivables".

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

i). Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- (a). Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk dijual dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset derivatif diklasifikasikan sebagai kelompok untuk dijual kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui sebagai laba atau rugi.

Kelompok Usaha memiliki investasi jangka pendek dalam kategori ini.

- (b). Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan dan kerugian terkait diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

i). Financial assets (continued)

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- (a). Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Derivative assets are classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair value through profit or loss are presented in the consolidated statements of financial position at fair value with gains or losses recognized as profit or loss.

The Group has short-term investment classified under this category.

- (b). Loan and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or defined payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are recorded at amortized cost using the effective interest rate method, and gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

i). Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)

(b). Pinjaman yang diberikan dan piutang
(lanjutan)

Kelompok Usaha memiliki kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset tidak lancar lainnya dalam kategori ini.

ii). Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi atau sebagai derivatif yang dirancang sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang lebih sesuai. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha yang mencakup pinjaman bank, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya, sewa pembiayaan, utang obligasi serta liabilitas jangka panjang lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

i). Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

(b). Loan and receivables (continued)

The Group has cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, accrued revenue and other non-current assets that are classified under this category.

ii). Financial liabilities

Initial recognition

Financial liabilities within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities at fair value through the profit or loss, financial liabilities measured at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Group determines the classification of financial liabilities upon initial recognition. Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, included directly attributable transaction costs.

The financial liabilities of the Group, which include bank loans, trade payables, accrued expenses, other current liabilities, finance lease, bonds payable and other non-current liabilities, are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Subsequent measurement

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii). Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)

Keuntungan atau kerugian harus diakui sebagai laba atau rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasinya.

iii). Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

iv). Biaya perolehan yang diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan ini mencakup seluruh premi atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi serta komisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

v). Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

ii). Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

Gains and losses are recognized as profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

iii). Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a current enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

iv). Amortized cost of financial instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method deducted by allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

v). Impairment of financial assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

**v). Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan)**

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Kelompok Usaha terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

**v). Impairment of financial assets
(continued)**

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and on which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

**v). Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan)**

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan untuk pengukuran rugi penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Kelompok Usaha. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Pemulihan tidak akan menghasilkan nilai tercatat dari aset keuangan melebihi biaya perolehan yang diamortisasi, jika penurunan nilai tidak diakui pada saat penurunan nilai tersebut dipulihkan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui sebagai laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

**v). Impairment of financial assets
(continued)**

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized as profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Loans and receivables, together with the associated allowances, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Group. If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a condition that the carrying amount of the financial assets exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized as profit or loss.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

**vi). Penghentian pengakuan aset dan
liabilitas keuangan**

Aset keuangan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (2) Kelompok Usaha memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a) Kelompok Usaha secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Kelompok Usaha secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

Apabila Kelompok Usaha mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, atau tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

**vi). Derecognition of financial assets and
liabilities**

Financial assets

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired, or (2) the Group have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

If the Group has transferred their rights to receive cash flows from a financial asset or have entered into a pass-through arrangement, or has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset but has transferred control of the financial asset, a new financial asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

**vi). Penghentian pengakuan aset dan
liabilitas keuangan (lanjutan)**

Aset keuangan (lanjutan)

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

Liabilitas keuangan

Dalam hal ini, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset dan liabilitas yang ditransfer diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Kelompok Usaha yang ditahan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung, dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui sebagai laba rugi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

**vi). Derecognition of financial assets and
liabilities (continued)**

Financial assets (continued)

Continuing the involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of payment received that the Group could be required to repay.

Financial liabilities

In this case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the payment received, including any new asset obtained less any new liability assumed, and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized as profit or loss.

A financial liability is derecognized when the contractual obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized as profit or loss.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tanpa adanya pengurangan atas biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar (*arm's-length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya.

t. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yaitu 1.018.953 saham.

u. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined based on quoted market prices or dealer price quotation (bid price for long position and ask price for short position), without any deduction for transaction costs. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques include recent arm's-length market transactions, referring to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flows analysis, or other valuation models.

t. Earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing the income for the year attributable to the owners of the parent entity by the weighted-average number of shares outstanding during the year, which is 1,018,953 shares.

u. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

v. Kontingensi

Liabilitas kontingensi diungkapkan, kecuali jika kemungkinan kecil (*remote*) terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Aset kontingensi tidak diakui di dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

w. Informasi segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Item-item segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

x. Penurunan nilai aset non-keuangan

Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

y. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian), jika ada, dicatat di dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang merupakan peristiwa non-penyesuaian diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Contingencies

Unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is unlikely to take place, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

w. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products or services (business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and inter Group transactions are eliminated.

x. Impairment of non-financial assets

Group assesses at reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when impairment testing for an asset is required, Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

y. Events after the reporting period

Events after reporting period that provide additional information about the Company's financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

z. Penerapan standar akuntansi baru

Pada tanggal 1 Januari 2019, Kelompok Usaha menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi berikut ini tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Kelompok Usaha dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya:

- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka

Interpretasi ini mengatur penentuan tanggal transaksi untuk tujuan menentukan nilai tukar yang akan digunakan pada pengakuan awal aset, biaya atau pendapatan (atau bagiannya) terkait pada penghentian pengakuan aset atau liabilitas non-moneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan uang muka dalam mata uang asing.

- Amandemen PSAK 26: Biaya Pinjaman

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa suatu entitas memperlakukan sebagai bagian dari pinjaman umum setiap pinjaman yang awalnya dibuat untuk mengembangkan aset kualifikasian ketika secara substansial semua kegiatan yang diperlukan untuk mempersiapkan aset tersebut untuk penggunaan atau penjualan yang dimaksudkan selesai. Entitas menerapkan amandemen atas biaya pinjaman yang terjadi pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut. Entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

z. Adoption of new accounting standards

On January 1, 2019, the Group adopted new and revised statements of financial accounting standards and interpretations of statements of financial accounting standards that are mandatory for application from that date. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

The adoption of the following new and revised standard and interpretation did not result in substantial changes to Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

- ISAK 33: Foreign Currency Transaction and Advance Consideration

This interpretation addresses how to determine the date of the transaction for the purpose of determining the exchange rate to use on initial recognition of the related asset, expense or income (or part of it) on the derecognition of a non-monetary asset or non-monetary liability arising from the payment or receipt of advance consideration in a foreign currency.

- Amendments to PSAK 26: Borrowing Costs

The amendments clarify that an entity treats as part of general borrowings any borrowing originally made to develop a qualifying asset when substantially all of the activities necessary to prepare that asset for its intended use or sale are complete. The entity applies the amendments to borrowing costs incurred on or after the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies those amendments. An entity applies those amendments for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2019, with early application permitted.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

z. Penerapan standar akuntansi baru (lanjutan)

- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa konsekuensi pajak penghasilan dari dividen lebih terkait langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat dibagikan daripada distribusi kepada pemilik. Dengan demikian, entitas mengakui konsekuensi dari pajak penghasilan atas dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal atas transaksi atau peristiwa masa lalu terkait. Entitas menerapkan amandemen untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan. Ketika entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut, entitas menerapkannya pada konsekuensi pajak penghasilan dari dividen yang diakui pada atau setelah awal periode komparatif paling awal.

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**z. Adoption of new accounting standards
(continued)**

- Amendments to PSAK 46: Income Taxes

The amendments clarify that the income tax consequences of dividends are linked more directly to past transactions or events that generated distributable profits than to distributions to owners. Therefore, an entity recognises the income tax consequences of dividends in profit or loss, other comprehensive income or equity according to where it originally recognised those past transactions or events. An entity applies the amendments for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2019, with early application permitted. When the entity first applies those amendments, it applies them to the income tax consequences of dividends recognised on or after the beginning of the earliest comparative period.

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current consolidated financial statements are disclosed below. Group intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

- PSAK 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introducing a more general requirements based on management's judgment.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

z. Penerapan standar akuntansi baru (lanjutan)

- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antara *International Accounting Standards Board* dan *Financial Accounting Standards Board*, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai-rendah.

- Amandemen PSAK 15 - Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**z. Adoption of new accounting standards
(continued)**

- PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

This PSAK is a single standards that a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to have analyzing before recognizing the revenue.

- PSAK 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted, but not before an entity applies PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers.

This PSAK establish the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease. There are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

- Amendments to PSAK 15 - Investments in Joint Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

These amendments provides that the entity also applies PSAK 71 on the financial instruments to associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests that substantively form the entity's net investment in an associates or joint ventures.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

z. Penerapan standar akuntansi baru (lanjutan)

- Amandemen PSAK 71 - Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amendemen ini mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain.

Estimasi dan asumsi tersebut dibuat berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**z. Adoption of new accounting standards
(continued)**

- Amendments to PSAK 71 - Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

This amendments provides that a financial asset with prepayment features that may result in negative compensation qualifies as a contractual cash flow derived solely from the principal and interest of the principal amount owed.

The Group has presently evaluated and has not yet determined the effects of these accounting standards on its consolidated financial statements.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS**

In the applications of the Group's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgments and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources.

These estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represents a summary of the significant estimates, judgments and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari setiap entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi sebagian besar pendapatan, biaya dan pendanaan masing-masing entitas.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan ditetapkan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 55 (2014) dipenuhi. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti dijelaskan pada Catatan 2.

Penyisihan penurunan nilai piutang

Kelompok Usaha mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan, kualitas jaminan yang diterima dan status kredit dari pelanggan berdasarkan Catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan penurunan nilai piutang.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements.

Determination of functional currency

The functional currency of each entity within the Group is the currency from the primary economic environment where such entity operates. That currency is the currency that mainly influences the revenues, costs and financing of each of the respective entities.

Classification of financial assets and financial liabilities

Classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities are determined by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55 (2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with accounting policies disclosed in Note 2.

The allowance of impairment of receivables

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group use judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customers, quality of collateral received and the customers' current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai piutang (lanjutan)

Bila Kelompok Usaha memutuskan bahwa tidak terdapat bukti objektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Kelompok Usaha menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 7.

Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

Otoritas Pelabuhan ("OP") memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak OP dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku (Catatan 41a). Pada akhir masa konsesi jasa, Kelompok Usaha harus menyerahkan terminal Kalibaru kepada OP bebas dari setiap bentuk bebanan, termasuk tanah reklamasi, aset tidak bergerak dan aset bergerak yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian terminal Kalibaru.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

The allowance of impairment of receivables
(continued)

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, the Group includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such trade receivables by being indicative of the customers' ability to pay all amounts due.

Future cash flows in a group of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for the trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the group. Further details are disclosed in Note 7.

Service concession arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

Otoritas Pelabuhan ("OP") granted the rights to the Company, including the right to implement the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of implementing the project without limiting the right of OP in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law (Note 41a). Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the Kalibaru Terminal free of any form of charge to OP, including reclamation land, non-removable assets and movable assets therein directly related to, and in connection with, the operation of the Kalibaru Terminal.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Kelompok Usaha berpendapat bahwa Perjanjian Konsesi memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset hak konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

Kelompok Usaha diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset hak konsesi atau peningkatan kemampuan aset hak konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kelompok Usaha mengakui pendapatan konstruksi aset hak konsesi dan biaya konstruksi atas aset hak konsesi sesuai dengan PSAK 34. Kelompok Usaha mengukur pendapatan konstruksi atas aset hak konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima tanpa margin.

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal.

Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

Service concession arrangement (continued)

The Group has made judgment that the Concession Agreement qualifies under the intangible asset model, wherein the concession rights asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession rights assets made during the year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The Group recognizes construction revenue of concession rights asset and construction costs of concession rights asset in accordance with PSAK 34. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received without margin.

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK 68 (Penyesuaian 2014): Pengukuran Nilai Wajar.

PSAK 68 (Penyesuaian 2014): Pengukuran Nilai Wajar mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 39.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair value of financial assets and financial liabilities

The Company applies PSAK 68 (Amendment 2014): Fair Value Measurement.

PSAK 68 (Amendment 2014): Fair Value Measurement require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement are determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation methods used.

The fair value of financial assets and financial liabilities is disclosed in Note 39.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Kelompok Usaha diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2. Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Kelompok Usaha.

Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 13, 14, 15, dan 16.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Estimate of useful lives of fixed assets

The useful life of each of the item of the Group's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

Estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 2. There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the year.

Impairment of non-financial assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on the results of operations of the Group.

Further details are disclosed in Notes 13, 14, 15 and 16.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba fiskal pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 17.

Imbalan kerja karyawan

Penentuan provisi dan liabilitas imbalan kerja karyawan dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi manajemen diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada pendapatan komprehensif lainnya yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 25.

4. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Kas	14.989.351	2.107.112
Bank	478.299.167	657.439.613
Deposito berjangka	3.151.322.521	3.952.500.571
Total kas dan setara kas	3.644.611.039	4.612.047.296

a. Kas

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Rupiah	14.989.351	2.107.112

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 17.

Employee benefits

The determination of the employee benefits provision and liability is dependent on the selection of certain assumptions used by an actuary in calculating such amounts. Actual results that differ from the management's assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized as other comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the management's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of employee benefits liability. Further details are disclosed in Note 25.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Kas	14.989.351	2.107.112	Cash on hand
Bank	478.299.167	657.439.613	Cash in banks
Deposito berjangka	3.151.322.521	3.952.500.571	Time deposit
Total kas dan setara kas	3.644.611.039	4.612.047.296	Total cash and cash equivalents

a. Cash on hand

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah	14.989.351	2.107.112	Rupiah

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

b. Bank

b. Cash in banks

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah:			Rupiah:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	42.415.021	37.112.935	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	19.211.191	49.117.912	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Tbk	11.455.905	15.120.598	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.487.572	5.033.361	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	1.377.843	1.343.534	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	943.236	7.187.150	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Panin Tbk	907.532	433.687	PT Bank Panin Tbk
PT Bank UOB Indonesia	835.937	807.588	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Bukopin Tbk	630.292	2.486.977	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank QNB Indonesia Tbk	284.008	632.193	PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	58.697	58.221	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	88	501.963	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Standard Chartered Bank	-	1.963.086	Standard Chartered Bank
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	1.008.250	PT Bank OCBC NISP Tbk
Pihak berelasi (Catatan 6)			Related parties (Note 6)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	214.718.786	289.028.344	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	145.243.561	153.492.846	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	24.022.335	56.113.723	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara Tbk	1.005.644	346.914	PT Bank Tabungan Negara Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	186.429	-	PT Bank Syariah Mandiri
Subtotal	464.784.077	621.789.282	Subtotal
Dolar AS:			US Dollar:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank QNB Indonesia Tbk	2.233.276	1.961.047	PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.143.586	2.849.025	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata	1.388.048	1.444.011	PT Bank Permata
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.211.345	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.129.754	4.882.771	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Deutsche Bank	723.117	754.078	Deutsche Bank
PT Bank ANZ Indonesia	686.743	715.470	PT Bank ANZ Indonesia
Standard Chartered Bank	219.584	5.703.591	Standard Chartered Bank
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	146.437	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Pihak berelasi (Catatan 6)			Related parties (Note 6)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.872.864	4.165.998	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.869.291	3.265.913	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	37.482	2.930.493	PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	-	6.731.895	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Tabungan Negara Tbk	-	99.602	PT Bank Tabungan Negara Tbk
Subtotal	13.515.090	35.650.331	Subtotal
Total	478.299.167	657.439.613	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

c. Deposito berjangka

c. Time deposits

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah:			Rupiah:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	164.510.000	130.530.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	64.000.000	78.000.000	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank NTB Syariah	61.500.000	-	PT Bank NTB Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Banten	43.000.000	25.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Banten
PT Bank Jatim Syariah	16.500.000		PT Bank Jatim Syariah
PT Bank Permata Tbk	12.000.000	9.000.000	PT Bank Permata Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	7.500.000	90.000.000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	5.000.000	77.500.000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	5.000.000	15.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	5.000.000	5.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
PT Bank DKI	3.412.058	6.226.129	PT Bank DKI
PT Bank Mega Syariah	3.000.000	4.000.000	PT Bank Mega Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	3.000.000	8.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	2.000.000	-	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	2.000.000	5.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.500.000	61.500.000	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	1.000.000	-	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	-	18.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
PT Bank Mandiri Taspen Pos	-	8.000.000	PT Bank Mandiri Taspen Pos
Subtotal	399.922.058	540.756.129	

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

c. Time deposits (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak berelasi (Catatan 6)			Related parties (Note 6)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	222.250.000	186.750.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	150.500.000	172.945.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	94.200.000	124.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara Tbk	34.000.000	45.000.000	PT Bank Tabungan Negara Tbk
PT Bank BNI Syariah	20.000.000	-	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Mandiri Syariah	10.000.000	-	PT Bank Mandiri Syariah
Subtotal	930.872.058	1.069.451.129	Subtotal
Dolar AS:			US Dollar:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Bukopin Tbk	-	36.202.500	PT Bank Bukopin Tbk
Pihak berelasi (Catatan 6)			Related parties (Note 6)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.398.600.462	1.787.880.374	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	797.523.251	515.929.068	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	24.326.750	543.037.500	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Subtotal	2.220.450.463	2.883.049.442	Subtotal
Total	3.151.322.521	3.952.500.571	Total

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah			Rupiah
Deposito berjangka	6,25% - 9,25%	6,00% - 9,25%	Time deposits
Deposito syariah	4,50% - 8,25%	5,00% - 8,00%	Sharia deposits
Dolar AS	2,00% - 4,00%	1,75% - 2,80%	US Dollar

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

5. SHORT TERM INVESTMENTS

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Deposito			Time deposits
Rupiah			Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	5.000.000	-	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	3.000.000	3.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	3.000.000	-	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	3.000.000	8.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
PT Bank BNI Syariah	-	10.707.973	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	9.917	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Dolar AS			US Dollar
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	36.202.500	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Subtotal	14.000.000	57.920.390	Subtotal
Surat Berharga Komersial (SBK)			Securities (SBK)
Rupiah			Rupiah
SBK I PT Pengelola Aset (Persero) 2019	13.939.981	-	SBK I PT Pengelola Aset (Persero) 2019
Total	27.939.981	57.920.390	Total

Investasi jangka pendek merupakan deposito berjangka dan surat berharga yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun serta tidak dijadikan jaminan.

Short term investments represent time deposits and securities with maturities of more than 3 months but no more than 1 year and were not used as collateral.

Suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah	7,00% - 8,00%	7,00% - 7,50%	Rupiah
Dolar AS	-	2,00%	US Dollar

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**6. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengendalian dengan Kelompok Usaha.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas di mana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

Sifat hubungan berelasi

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party
Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Negara Republik Indonesia
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Syariah Mandiri PT Pertamina (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Virama Karya (Persero) PT Hutama Karya (Persero) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PT Nindya Karya (Persero) PT Pengerukan Indonesia (Persero) Tentara Nasional Indonesia PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) PT Djakarta Lloyd (Persero) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) PT Bahtera Adhiguna PT Dharma Lautan Nusantara (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) PT Petrokimia Gresik PT Perikanan Nusantara (Persero) PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) PT Semen Tonasa BPJS Kesehatan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Dana Pensiun Pelindo Purnakarya (DP3) Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)

**6. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

In the normal course of business, the Group enters into transactions with related parties. Entities are considered to be related if, among these, the entity has the ability, directly or indirectly, to control or jointly control or has significant influence over the Group in making financial and operating decisions. Entities are also considered to be related if they are under common control with PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of the Company. All entities that are owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and also entities where the Republic of Indonesia has significant influence are related parties.

Nature of relationship with related parties

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties are as follows:

Jenis transaksi/ Nature of transactions
Jasa konsesi/ <i>Concession service</i>
Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i> Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i> Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i> Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i> Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i> Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i> Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i> Jasa pembangunan/ <i>Construction services</i> Jasa pembangunan/ <i>Construction services</i> Jasa pembangunan/ <i>Construction services</i> Jasa pembangunan/ <i>Construction services</i> Jasa pembangunan/ <i>Construction services</i> Jasa pembangunan/ <i>Construction services</i> Pinjaman dana dan biaya pengerukan/ <i>Loan funds and dredging costs</i> Penjualan jasa/ <i>Sales</i> Penjualan jasa/ <i>Sales</i> Penjualan jasa/ <i>Sales</i> Penjualan jasa/ <i>Sales</i> Penjualan jasa/ <i>Sales</i> Penjualan jasa/ <i>Sales</i> Penjualan jasa/ <i>Sales</i> Penjualan jasa/ <i>Sales</i> Penjualan jasa/ <i>Sales</i> Penjualan jasa/ <i>Sales</i> Penjualan jasa/ <i>Sales</i> Penjualan jasa/ <i>Sales</i> Penjualan jasa/ <i>Sales</i> Jasa pensiun/ <i>Pension services</i> Jasa pensiun/ <i>Pension services</i>

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**6. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**6. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party
Entitas Asosiasi/ Associates	PT Portek Indonesia PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera PT Ambang Barito Nusapersada PT Jasa Marga Bali Tol PT Lamin Aspalindo Tiga PT Terminal Nilam Utara PT Energi Manyar Sejahtera PT Terminal Petikemas Indonesia
Memiliki manajemen kunci yang sama/ Under the same key management	Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia III

Jenis transaksi/ Nature of transactions
Jasa pemeliharaan alat fasilitas pelabuhan/ Port facilities equipment maintenance service Investasi saham dan pemberian pinjaman dana/ Investment in stock and lending funds Pemberian pinjaman dana/Lending fund Investasi saham/Investment in stock Investasi saham/Investment in stock Investasi saham dan sewa lahan/Investment in stock and land lease Investasi saham/Investment in stock Investasi saham/Investment in stock
Jasa tenaga kerja bongkar muat/ Handling service

Transaksi dengan pihak berelasi

Transactions with related parties

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

Details of significant accounts with related parties (government, state owned entities unless otherwise indicated) are as follows:

a. Kas dan setara kas (Catatan 4)

a. Cash and cash equivalent (Note 4)

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Bank		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	214.718.786	289.028.344
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	145.243.561	153.492.846
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	24.022.335	56.113.723
PT Bank Tabungan Negara Tbk	1.005.644	346.914
PT Bank Syariah Mandiri	186.429	-
Total	385.176.755	498.981.827
Dolar AS		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.872.864	4.165.998
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.869.291	3.265.913
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	37.482	2.930.493
PT Bank Syariah Mandiri	-	6.731.895
PT Bank Tabungan Negara Tbk	-	99.602
Total	3.779.637	17.193.901

Bank
Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara Tbk
PT Bank Syariah Mandiri
Total
US Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Tabungan Negara Tbk
Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**6. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**6. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

a. Kas dan setara kas (Catatan 4) (lanjutan)

a. Cash and cash equivalent (Note 4) (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Deposito			Deposits
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	222.250.000	186.750.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	150.500.000	172.945.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	94.200.000	124.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara Tbk	34.000.000	45.000.000	PT Bank Tabungan Negara Tbk
PT Bank BNI Syariah	20.000.000	-	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Mandiri Syariah	10.000.000	-	PT Bank Mandiri Syariah
Total	530.950.000	528.695.000	Total
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.398.600.462	1.787.880.374	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	797.523.251	515.929.068	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	24.326.750	543.037.500	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	2.220.450.463	2.846.846.942	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**6. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**6. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

b. Piutang usaha (Catatan 7)

b. Trade receivables (Note 7)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	91.145.385	68.247.983	PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	86.568.472	72.149.140	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
PT Pertamina (Persero)	44.932.795	39.527.408	PT Pertamina (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	43.610.754	28.953.310	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS)	39.971.227	11.543.521	Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS)
PT Petrokimia Gresik	35.995.746	27.463.487	PT Petrokimia Gresik
PT Bahtera Adhiguna	11.163.377	10.859.277	PT Bahtera Adhiguna
PT Perikanan Nusantara (Persero)	9.373.897	6.920.612	PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	9.314.629	6.311.709	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 miliar)	96.714.783	70.121.318	Others (each below Rp5 billion)
Subtotal	468.791.065	342.097.765	Sub-total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(159.835.543)	(1.737.260)	Less: Allowance for impairment
Total	308.955.522	340.360.505	Total

c. Piutang lain-lain (Catatan 8)

c. Other receivables (Note 8)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
PT BKMS	227.363.181	208.881.837	PT BKMS
Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut	52.267.802	52.267.802	Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation
PT Pengerukan Indonesia (Persero)	26.576.794	29.330.404	PT Pengerukan Indonesia (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 miliar)	61.504.801	7.556.110	Others (each below Rp5 billion)
Subtotal	367.712.578	298.036.153	Sub-total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(97.814.713)	(35.504.794)	Less: Allowance for impairment
Total	269.897.865	262.531.359	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**6. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**6. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

d. Pendapatan masih akan diterima (Catatan 9)

d. *Accrued revenues (Note 9)*

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
BPJS Kesehatan	40.298.956	59.828.888	<i>BPJS Kesehatan</i>
PT Pertamina (Persero)	4.268.754	1.779.407	<i>PT Pertamina (Persero)</i>
PT Indonesia Power	1.779.312	741.697	<i>PT Indonesia Power</i>
PT Perkebunan Nusantara XII	1.718.728	716.442	<i>PT Perkebunan Nusantara XII</i>
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	28.762.264	11.989.394	<i>Others (each below Rp1 billion)</i>
Total	76.828.014	75.055.828	Total

e. Utang usaha (Catatan 18)

e. *Trade payables (Note 18)*

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	17.512.404	15.878.580	<i>Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)</i>
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	15.206.429		<i>The Ministry of Transportation of Republic of Indonesia</i>
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	7.084.910	4.898.774	<i>PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	3.178.007	4.557.701	<i>PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)</i>
PT Portek Indonesia	206.384	6.935.879	<i>PT Portek Indonesia</i>
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	89.764	34.392.785	<i>PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)</i>
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp4 miliar)	18.436.770	12.480.467	<i>Others (each below Rp4 billion)</i>
Total	61.714.668	79.144.186	Total

Transaksi utang usaha dengan pihak berelasi merupakan utang sewa kendaraan operasional, utang pemakaian listrik, utang jasa pengklasifikasian kapal niaga yang dimiliki oleh Perusahaan.

Account payable transaction with related parties represent debt for vehicle rent, debt for electricity use, debt for the classification of commercial vessels owned by the Company.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**6. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**6. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

f. Utang lain-lain (Catatan 19)

f. Other payables (Note 19)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	170.168.880	79.163.886	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Nindya Karya (Persero)	79.575.063	108.231.555	PT Nindya Karya (Persero)
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	63.429.111	42.476.420	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Brantas Abipraya (Persero)	40.883.828		PT Brantas Abipraya (Persero)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	14.637.235	19.108.606	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 miliar)	16.924.040	10.550.846	Others (each below Rp5 billion)
Total	385.618.157	259.531.313	Total

Transaksi utang lain-lain dengan pihak berelasi merupakan utang terkait pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Perusahaan.

Other payable transaction with related parties represent debt related to construction development carried out by the Company.

g. Pendapatan diterima dimuka jangka pendek (Catatan 21)

g. Short-term unearned revenue (Note 21)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
PT Pertamina (Persero)	18.925.977	5.527.144	PT Pertamina (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.054.036	1.536.854	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	466.718	1.963.783	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	19.711.821	26.324.415	Others (each below Rp1 billion)
Total	40.158.552	35.352.196	Total

h. Remunerasi personel manajemen kunci

h. Key management personnel remuneration

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang dibayar dan diakui untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebesar Rp27.611.659 dan Rp21.460.340, masing-masing untuk tahun 2019 dan 2018.

Total salaries and other short-term benefits paid to and accrued for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors amounted to Rp27,611,659 and Rp21,460,340 for 2019 and 2018, respectively.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

7. PIUTANG USAHA

a. Berdasarkan pelanggan:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Swasta	581.694.631	578.460.164	<i>Private</i>
Perorangan	4.539.545	4.039.844	<i>Individuals</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Penyisihan penurunan nilai	(72.114.918)	(66.122.948)	<i>Allowance for impairment</i>
Pihak ketiga - neto	514.119.258	516.377.060	<i>Third parties - net</i>
Pihak berelasi (Catatan 6)	468.791.065	342.097.765	<i>Related parties (Note 6)</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Penyisihan penurunan nilai	(159.835.543)	(1.737.260)	<i>Allowance for impairment</i>
Pihak berelasi - neto	308.955.522	340.360.505	<i>Related parties - net</i>
Piutang usaha - neto	823.074.780	856.737.565	<i>Trade receivables - net</i>

7. TRADE RECEIVABLES

a. By customer:

b. Analisis umur piutang usaha

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	78.013.622	352.959.208	<i>Neither past due nor impaired</i>
Lewat jatuh tempo:			<i>Overdue:</i>
1 - 30 hari	284.883.692	106.171.043	<i>1 - 30 days</i>
31 - 60 hari	135.906.182	140.044.847	<i>31 - 60 days</i>
61 - 90 hari	89.091.675	10.864.971	<i>61 - 90 days</i>
91 - 180 hari	103.412.883	86.582.590	<i>91 - 180 days</i>
> 180 hari	363.717.187	227.975.114	<i>> 180 days</i>
	1.055.025.241	924.597.773	
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Penyisihan penurunan nilai	(231.950.461)	(67.860.208)	<i>Allowance for impairment</i>
Piutang usaha - neto	823.074.780	856.737.565	<i>Trade receivables - net</i>

b. Aging analysis on trade receivables

c. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah	1.041.405.860	909.244.045	<i>Rupiah</i>
Dolar AS	13.619.381	15.353.728	<i>US Dollar</i>
Total	1.055.025.241	924.597.773	<i>Total</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Penyisihan penurunan nilai	(231.950.461)	(67.860.208)	<i>Allowance for impairment</i>
Neto	823.074.780	856.737.565	<i>Net</i>

c. By currency

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

d. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Saldo awal	67.860.208	91.332.946	Beginning balance
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	164.090.253	(23.472.738)	Provision (reversal) for the year
Saldo akhir	231.950.461	67.860.208	Ending balance

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 piutang usaha tidak dijaminkan.

7. TRADE RECEIVABLES (continued)

d. The movements in the allowance for impairment of receivables are as follows:

Based on a review of the status of each individual receivable accounts at the end of the reporting period, the Group believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

As of December 31, 2019 and 2018 trade receivables are not pledged as collateral.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak ketiga Swasta	45.718.478	50.765.718	Third parties Private
Perorangan	846.307	2.984.456	Individuals
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(5.787.438)	(17.513.322)	Less: Allowance for impairment
Pihak ketiga - neto	40.777.347	36.236.852	Third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 6)	367.712.578	298.036.153	Related parties (Note 6)
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(97.814.713)	(35.504.794)	Less: Allowance for impairment
Pihak berelasi - neto	269.897.865	262.531.359	Related parties - net
Piutang lain-lain - neto	310.675.212	298.768.211	Other receivables - net

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Saldo awal	53.018.116	40.307.802	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	50.584.035	12.710.314	Provision for the year
Saldo akhir	103.602.151	53.018.116	Ending balance

The movement in the allowance for impairment of other receivable is as follows:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan masing-masing piutang pada akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 piutang lain-lain tidak dijaminkan.

8. OTHER RECEIVABLES (continued)

Based on review of the status of each individual other receivable accounts at the end of the reporting period, the Group believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables.

As of December 31, 2019 and 2018 other receivables are not pledged as collateral.

9. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Pihak ketiga	140.452.794	242.607.104
Pihak berelasi (Catatan 6)	76.828.014	75.055.828
Total	217.280.808	317.662.932

Pendapatan masih akan diterima merupakan pendapatan yang belum difakturkan.

9. ACCRUED REVENUES

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
	140.452.794	242.607.104
	76.828.014	75.055.828
Total	217.280.808	317.662.932

Accrued revenues represent unbilled revenue.

10. PERSEDIAAN

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Suku cadang	73.304.724	39.183.361
Bahan bakar dan pelumas	5.588.721	7.725.715
Obat medis	4.739.080	3.234.358
Lain-lain	1.820.212	3.112.907
Total	85.452.737	53.256.341
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(907.064)	(1.140.817)
Neto	84.545.673	52.115.524

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

10. INVENTORIES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
	73.304.724	39.183.361	Spare parts
	5.588.721	7.725.715	Fuel and lubricants
	4.739.080	3.234.358	Medical medicine
	1.820.212	3.112.907	Others
Total	85.452.737	53.256.341	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(907.064)	(1.140.817)	Allowance for decline in value
Neto	84.545.673	52.115.524	Net

Movements in the allowance for decline in value of inventories are as follows:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Saldo awal	1.140.817	936.796
Penambahan (pemulihan) pada tahun berjalan	(233.753)	204.021
Saldo akhir	907.064	1.140.817

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
	1.140.817	936.796
	(233.753)	204.021
Saldo akhir	907.064	1.140.817

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

10. PERSEDIAAN (lanjutan)

Berdasarkan penelaahan atas kondisi dan tingkat perputaran persediaan, Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 persediaan tidak dijaminkan.

10. INVENTORIES (continued)

Based on the review of the condition and turnover of the inventory items, the Group believes that the allowance for decline in value of inventories is adequate to cover any possible losses from decrease in value.

As of December 31, 2019 and 2018 inventories are not pledged as collateral.

11. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Beban dibayar dimuka - Pemindahan tempat penimbunan petikemas	43.751.137	-
Beban dibayar dimuka - Asuransi	15.550.585	19.684.692
Beban dibayar dimuka - Pegawai	17.783.397	58.296.053
Beban dibayar dimuka - Lainnya	7.937.714	20.407.776
Total	85.022.833	98.388.521

11. PREPAID EXPENSE

Prepaid expense - Relocation of
container yard
Prepaid expenses - Insurance
Prepaid expenses - Personnel
Prepaid expenses - Others

Total

12. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
PT BKMS	925.599.602	909.524.691
PT TNU	60.726.334	68.785.862
PT JBT	46.515.482	60.548.923
PT TPI	32.969.428	32.588.155
PT Ambapers	19.545.469	18.797.053
PT EMS	330.529	321.202
PT Portek Indonesia	-	-
PT LNG	70.869.046	-
Total	1.156.555.890	1.090.565.886

12. INVESTMENTS IN ASSOCIATES

PT BKMS
PT TNU
PT JBT
PT TPI
PT Ambapers
PT EMS
PT Portek Indonesia
PT LNG

Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

12. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

12. INVESTMENTS IN ASSOCIATES (continued)

The movements of investments in associates are as follows:

31 Desember 2019/December 31, 2019						
Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value		
Metode ekuitas					Equity method	
PT BKMS	40,00%	800.000.000	125.782.185	(182.583)	925.599.602	PT BKMS
PT TNU	40,00%	68.500.000	(7.799.561)	25.895	60.726.334	PT TNU
PT JBT	17,58%	131.047.297	(84.597.840)	66.025	46.515.482	PT JBT
PT TPI	25,00%	37.500.000	(4.530.572)	-	32.969.428	PT TPI
PT Ambapers	40,00%	6.000.000	13.598.255	(52.786)	19.545.469	PT Ambapers
PT EMS	30,00%	300.000	30.529	-	330.529	PT EMS
PT Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	(2.670.500)	-	-	PT Portek Indonesia
PT LNG	49,00%	71.050.000	(180.954)	-	70.869.046	PT LNG
Total		1.117.067.797	39.631.542	(143.449)	1.156.555.890	Total
31 Desember 2018/December 31, 2018						
Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value		
Metode ekuitas					Equity method	
PT BKMS	40,00%	800.000.000	109.448.167	76.524	909.524.691	PT BKMS
PT TNU	40,00%	68.500.000	285.862	-	68.785.862	PT TNU
PT JBT	17,58%	131.047.297	(70.545.463)	47.089	60.548.923	PT JBT
PT TPI	25,00%	37.500.000	(4.911.845)	-	32.588.155	PT TPI
PT Ambapers	40,00%	6.000.000	12.867.225	(70.172)	18.797.053	PT Ambapers
PT EMS	30,00%	300.000	21.202	-	321.202	PT EMS
PT Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	(2.670.500)	-	-	PT Portek Indonesia
Total		1.046.017.797	44.494.648	53.441	1.090.565.886	Total

Perusahaan asosiasi tersebut meminta persetujuan Kelompok Usaha untuk membagikan keuntungannya. Kelompok Usaha tidak memperkirakan akan memberikan persetujuan tersebut pada tanggal pelaporan. Perusahaan asosiasi tidak memiliki liabilitas kontijensi atau komitmen modal pada tanggal 31 Desember 2019.

The associates require the Group's consent to distribute its profits. The Group does not foresee giving such consent at the reporting date. The associates have no contingent liabilities or capital commitments as December 31, 2019.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. PROPERTI INVESTASI

13. INVESTMENT PROPERTIES

Mutasi 2019	Saldo 1 Januari 2019/ Balance January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember 2019/ Balance December 31, 2019	2019 Movements
Harga perolehan:						Cost:
Tanah	85.298.157	-	-	401.191	85.699.348	Land
Bangunan	21.754.178	-	-	(808.594)	20.945.584	Building
Sub Total	107.052.335	-	-	(407.403)	106.644.932	Sub Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Bangunan	(3.784.496)	(1.750.035)	-	769.532	(4.764.999)	Building
Sub Total	(3.784.496)	(1.750.035)	-	769.532	(4.764.999)	Sub Total
Nilai buku	103.267.839				101.879.933	Net book value

Mutasi 2018	Saldo 1 Januari 2018/ Balance January 1, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember 2018/ Balance December 31, 2018	2018 Movements
Harga perolehan:						Cost:
Tanah	85.298.157	-	-	-	85.298.157	Land
Bangunan	24.634.502	3.167.634	(2.194.305)	(3.853.653)	21.754.178	Building
Sub Total	109.932.659	3.167.634	(2.194.305)	(3.853.653)	107.052.335	Sub Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Bangunan	(6.685.904)	(1.488.635)	1.039.369	3.350.674	(3.784.496)	Building
Sub Total	(6.685.904)	(1.488.635)	1.039.369	3.350.674	(3.784.496)	Sub Total
Nilai buku	103.246.755				103.267.839	Net book value

Beban penyusutan properti investasi dicatat sebagai beban operasi.

Depreciation expenses of investment properties are recorded as operating expenses.

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.596.204.734 berdasarkan penilaian oleh manajemen yang didasari oleh penilaian yang dilakukan KJPP Immanuel, Jhonny dan Rekan dalam laporannya No. 00023A.1/PA/HH-VII/2018 tanggal 30 Juli 2018.

The fair value of investment properties as of December 31, 2019 amounting to Rp4,596,204,734 are based on management's assessment referring to the appraisal valuation performed by KJPP Immanuel, Jhonny and Partners in its report No. 00023A.1/PA/HH-VII/2018 dated July 30, 2018.

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam revaluasi ini adalah pendekatan pasar dengan menggunakan hirarki level 2.

The valuation approach used in the assessment of this revaluation is market approach using hierarchy level 2.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai properti investasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 properti investasi tidak dijaminkan.

13. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

Management believes that there are no events or changes in circumstances that may indicate impairment in the value of investment properties as of December 31, 2019 and 2018.

As of December 31, 2019 and 2018 investment properties are not pledged as collateral.

14. ASET TETAP

14. FIXED ASSETS

Mutasi 2019	Saldo 1 Januari 2019/ Balance January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember 2019/ Balance December 31, 2019	2019 Movements
Harga perolehan:						Cost:
Tanah	130.493.381	-	-	27.786.638	158.280.019	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	4.290.634.631	34.374.031	(2.954.042)	448.805.976	4.770.860.596	Port facility buildings
Kapal	2.021.139.790	10.853.465	-	4.931.699	2.036.924.954	Vessels
Alat-alat fasilitas pelabuhan	8.318.666.255	79.876.184	(1.403.767)	64.548.867	8.461.687.540	Port facility equipments
Instalasi fasilitas pelabuhan	1.084.640.201	4.242.299	(393.824)	77.845.022	1.166.333.698	Port facility installations
Jalan dan bangunan	1.112.937.114	3.659.405	(4.506.225)	190.813.556	1.302.903.850	Roads and buildings
Peralatan	501.136.603	13.207.014	(778.348)	37.850.660	551.415.929	Equipments
Kendaraan	69.448.281	30.200	(7.142.469)	(6.175.830)	56.160.182	Vehicles
Emplasemen	235.595.448	588.747	(275.027)	4.014.691	239.923.859	Emplacement
Subtotal	17.764.691.704	146.831.345	(17.453.702)	850.421.280	18.744.490.627	Sub-total
Aset sewa pembiayaan	69.278.038	-	(3.835.589)	(65.442.449)	-	Leased assets
Aset dalam penyelesaian	1.563.980.907	1.762.551.019	(238.197.315)	(799.878.042)	2.288.456.569	Construction in progress
Subtotal	19.397.950.649	1.909.382.363	(259.486.606)	(14.899.211)	21.032.947.196	Sub-total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Bangunan fasilitas pelabuhan	(417.012.103)	(210.182.459)	1.013.109	(5.398.645)	(631.580.098)	Port facility buildings
Kapal	(304.608.685)	(102.248.503)	-	-	(406.857.188)	Vessels
Alat-alat fasilitas pelabuhan	(1.312.929.535)	(586.390.245)	1.433.984	(154.350)	(1.898.040.146)	Port facility equipments
Instalasi fasilitas pelabuhan	(261.160.774)	(58.854.656)	335.763	(6.602.509)	(326.282.176)	Port facility installations
Jalan dan bangunan	(388.113.674)	(44.076.763)	2.250.323	(831.990)	(430.772.104)	Roads and buildings
Peralatan	(314.075.543)	(60.034.008)	765.415	(117.665)	(373.461.801)	Equipments
Kendaraan	(54.838.865)	(5.275.111)	5.975.597	-	(54.138.379)	Vehicles
Emplasemen	(75.201.232)	(10.806.496)	133.174	(34.617)	(85.909.171)	Emplacement
Subtotal	(3.127.940.411)	(1.077.868.241)	11.907.365	(13.139.776)	(4.207.041.063)	Sub-total
Aset sewa pembiayaan	(7.793.779)	(908.923)	2.885.595	5.817.107	-	Leased assets
Subtotal	(3.135.734.190)	(1.078.777.164)	14.792.960	(7.322.669)	(4.207.041.063)	Sub-total
Total	16.262.216.459				16.825.906.133	Total
Dikurangi:						Less:
Penyisihan penurunan nilai	(30.669.337)	(3.873.640)	-	-	(34.542.977)	Allowance for impairment
Nilai buku neto	16.231.547.122				16.791.363.156	Net book value

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

Mutasi 2018	Saldo 1 Januari 2018/ Balance January 1, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember 2018/ Balance December 31, 2018	2018 Movements
Harga perolehan:						Cost:
Tanah	129.162.446	30.000	-	1.300.935	130.493.381	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	3.733.669.573	25.721.222	-	531.243.836	4.290.634.631	Port facility buildings
Kapal	1.056.649.930	11.076.770	-	953.413.090	2.021.139.790	Vessels
Alat-alat fasilitas pelabuhan	6.672.166.810	722.350.617	(15.241.800)	939.390.628	8.318.666.255	Port facility equipments
Instalasi fasilitas pelabuhan	852.913.506	15.378.052	-	216.348.643	1.084.640.201	Port facility installations
Jalan dan bangunan	1.034.773.818	4.140.987	-	74.022.309	1.112.937.114	Roads and buildings
Peralatan	465.530.427	10.572.916	(308.060)	25.341.320	501.136.603	Equipments
Kendaraan	67.619.624	386.530	(692.255)	2.134.382	69.448.281	Vehicles
Emplasemen	217.538.888	6.315.264	-	11.741.296	235.595.448	Emplacement
Subtotal	14.230.025.022	795.972.358	(16.242.115)	2.754.936.439	17.764.691.704	Sub-total
Aset sewa pembiayaan	69.278.038	-	-	-	69.278.038	Leased assets
Aset dalam penyelesaian	1.979.179.413	2.350.219.400	(3.105.668)	(2.762.312.238)	1.563.980.907	Construction in progress
Subtotal	16.278.482.473	3.146.191.758	(19.347.783)	(7.375.799)	19.397.950.649	Sub-total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Bangunan fasilitas pelabuhan	(244.844.965)	(172.167.138)	-	-	(417.012.103)	Port facility buildings
Kapal	(217.673.446)	(86.935.239)	-	-	(304.608.685)	Vessels
Alat-alat fasilitas pelabuhan	(799.267.281)	(521.306.320)	5.974.786	1.669.280	(1.312.929.535)	Port facility equipments
Instalasi fasilitas pelabuhan	(205.011.865)	(56.148.909)	-	-	(261.160.774)	Port facility installations
Jalan dan bangunan	(332.424.142)	(55.689.532)	-	-	(388.113.674)	Roads and buildings
Peralatan	(257.818.122)	(56.262.451)	5.030	-	(314.075.543)	Equipments
Kendaraan	(48.656.830)	(7.026.184)	844.149	-	(54.838.865)	Vehicles
Emplasemen	(64.007.732)	(11.193.500)	-	-	(75.201.232)	Emplacement
Subtotal	(2.169.704.383)	(966.729.273)	6.823.965	1.669.280	(3.127.940.411)	Sub-total
Aset sewa pembiayaan	(4.329.877)	(3.463.902)	-	-	(7.793.779)	Leased assets
Subtotal	(2.174.034.260)	(970.193.175)	6.823.965	1.669.280	(3.135.734.190)	Sub-total
Total	14.104.448.213	2.175.998.583	(12.523.818)	(5.706.519)	16.262.216.459	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(8.039.931)	(22.629.406)	-	-	(30.669.337)	Less: Allowance for impairment
Nilai buku neto	14.096.408.282				16.231.547.122	Net book value

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan dalam beban operasi.

Depreciation expense of fixed assets is allocated to operating expenses.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Kelompok Usaha mengasuransikan aset tetap dan aset takberwujud (Catatan 15) terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya pada PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Benoa Gas Terminal, PT Asuransi Tri Pakarta, Tugu Insurance, dengan total nilai pertanggungans seluruhnnya sebesar Rp26.447.473.229 tanggal 31 Desember 2019 dan Rp13.099.316.643 dan US\$1.031.786 pada tanggal 31 Desember 2018. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungans tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

As of December 31, 2019 and 2018, the Group insured its fixed assets and intangible assets (Note 15) against risk from fire and other insurable risks to PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Benoa Gas Terminal, PT Asuransi Tri Pakarta, Tugu Insurance, with total insurance coverage amounting to Rp26,447,473,229 as of December 31, 2019 and Rp13,099,316,643 and US\$1,031,786 as of December 31, 2018. In management's opinion, the above insurance coverage is adequate to cover any possible losses that might be arise from the insurance coverage.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kerugian penurunan nilai aset tetap.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible impairments losses on fixed assets.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 aset tetap tidak dijaminkan.

Hak atas tanah Perusahaan berupa Sertifikat Hak Pengelolaan ("HPL").

Reklasifikasi pada tahun 2019 termasuk reklasifikasi dari akun aset tetap ke akun aset properti investasi dengan nilai perolehan sebesar Rp401.191, reklasifikasi dari akun aset dalam penyelesaian menjadi akun aset takberwujud sebesar Rp21.182.957, terdapat reklasifikasi akun aset takberwujud menjadi akun aset dalam penyelesaian sebesar Rp 11.459.756, serta terdapat reklasifikasi dari akun aset tetap ke akun aset tersedia dijual sebesar Rp5.577.201.

Revaluasi Aset Tetap

Penambahan aset tetap pada tahun 2019, termasuk surplus revaluasi aset tetap bangunan fasilitas pelabuhan dan alat fasilitas pelabuhan masing-masing sebesar Rp28.488.432 dan Rp38.403.155.

Termasuk dalam reklasifikasi adalah pemindahan aset alat fasilitas pelabuhan ke aset tidak lancar lainnya.

Revaluasi kelompok aset tetap bangunan fasilitas pelabuhan dan alat-alat fasilitas pelabuhan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Immanuel, Jhonny dan Rekan, dan KJPP Wahyono Adi dan Rekan.

Nilai wajar ditentukan dengan menggunakan metode perbandingan harga pasar. Hal ini berarti penilaian yang dilakukan oleh penilai didasarkan pada harga pasar aktif, yang disesuaikan secara signifikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari bangunan fasilitas pelabuhan dan alat fasilitas pelabuhan yang dinilai.

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam revaluasi ini adalah pendekatan pasar dengan menggunakan hirarki level 2.

14. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2019 and 2018 fixed assets are not pledged as collateral.

The Company's land rights include Rights Management Certificate ("HPL").

Reclassification in 2019 included reclassification from fixed assets to investment property assets amounting to Rp401,191, reclassification of assets under construction to intangible assets amounting to Rp21,182,957, there is reclassification from intangible assets to assets under construction amounting to Rp11,459,756, and reclassification of fixed assets to assets available for sale amounting to Rp5,577,201.

Revaluation of Fixed Assets

Addition of fixed assets in 2019, including the revaluation surplus of port facility building and port facility equipments amounts to Rp28,488,432 and Rp38,403,155, respectively.

Included in the reclassification is the transfer of port facility equipments assets to other non-current assets.

Revaluation class of fixed assets for port facility buildings and port facility equipments are based on valuation performed by KJPP Immanuel, Jhonny and Partners, and KJPP Wahyono Adi and Partners.

The fair value was determined by using market comparable method. This means that valuations performed by the appraisers are based on active market prices, significantly adjusted for difference in the nature, location and condition of the building port facilities and port facility equipment.

The valuation approach used in the assessment of this revaluation is market approach using hierarchy level 2.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

Rincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

The details of sales of fixed assets are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Hasil penjualan aset tetap	4.009.498	2.682.015	Proceeds from sales of fixed assets
Nilai buku	5.546.337	12.523.818	Net book value
Kerugian penjualan aset tetap	1.536.839	9.841.803	Loss on sale of fixed assets

Aset dalam penyelesaian

Construction in progress

Aset dalam penyelesaian terdiri dari:

Construction in progress consists of:

	31 Desember 2018/ December 31, 2019			31 Desember 2018/ December 31, 2018			
	Nilai perolehan / Cost	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Target penyelesaian/ Target of completion	Nilai perolehan / Cost	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Target penyelesaian/ Target of completion	
Bangunan fasilitas pelabuhan	1.925.874.441	10,49% - 95%	2020	1.287.501.431	2% - 98%	2019	Port facility buildings
Kapal	126.577		2020	4.657.116	87%	2019	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	63.738.731	98%	2020	106.921.176	5% - 90%	2019	Port facility equipments
Peralatan	28.548.810	98%	2020	4.559.177	4% - 97%	2019	Equipments
Instalasi fasilitas pelabuhan	101.201.359		2020	72.147.950	15% - 78%	2019	Port facility installations
Jalan dan bangunan Emplasemen	153.988.281	2%-76%	2020	82.879.952	8% - 90%	2019	Roads and buildings
	22.701.232	74%	2020	5.314.105	36% - 95%	2019	Emplacement
Total	2.296.179.431			1.563.980.907			Total

Biaya perolehan aset dalam penyelesaian tersebut di atas termasuk beban pinjaman yang dikapitalisasi sebesar Rp110.346.123 dan Rp5.039.859 masing-masing pada tahun 2019 dan 2018.

Cost of construction in progress includes capitalized borrowing cost amounting to Rp110,346,123 and Rp5,039,859 in 2019 and 2018, respectively.

15. ASET TAKBERWUJUD

15. INTANGIBLE ASSETS

	Saldo 1 Januari 2019/ Balance January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember 2019/ Balance December 31, 2019	2019 Movements
Harga perolehan:						Cost:
Aset hak konsesi	5.424.840.538	950.193.902	-	3.585.370	6.378.619.810	Concession rights assets
Piranti lunak	132.291.532	82.495.281	-	-	214.786.813	Software application
Goodwill	1.143.301	-	-	-	1.143.301	Goodwill
	5.558.275.371	1.032.689.183	-	3.585.370	6.594.549.924	
Akumulasi amortisasi:						Accumulated amortization:
Aset hak konsesi	(366.456.103)	(95.098.369)	-	(3.781)	(461.558.253)	Concession rights assets
Piranti lunak	(44.349.212)	(31.892.350)	-	-	(76.241.562)	Software application
	(410.805.315)	(126.990.719)	-	(3.781)	(537.799.815)	
Nilai buku	5.147.470.056				6.056.750.109	Net book value

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Mutasi 2018	Saldo 1 Januari 2018/ Balance January 1, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember 2018/ Balance December 31, 2018	2018 Movements
Harga perolehan:						Cost:
Aset hak konsesi	5.328.536.755	96.303.783	-	-	5.424.840.538	Concession rights assets
Piranti lunak	114.977.615	17.313.917	-	-	132.291.532	Software application
Goodwill	1.143.301	-	-	-	1.143.301	Goodwill
	<u>5.444.657.671</u>	<u>113.617.700</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.558.275.371</u>	
Akumulasi amortisasi:						Accumulated amortization:
Aset hak konsesi	(272.269.825)	(94.186.278)	-	-	(366.456.103)	Concession rights assets
Piranti lunak	(19.503.877)	(24.845.335)	-	-	(44.349.212)	Software application
	<u>(291.773.702)</u>	<u>(119.031.613)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(410.805.315)</u>	
Nilai buku	<u>5.152.883.969</u>				<u>5.147.470.056</u>	Net book value

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 aset takberwujud tidak dijaminkan.

Aset hak konsesi

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Kantor Kesyahbandaran dan Otorisasi Pelabuhan (KSOP) kepada Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan APBS, TMTL dan TPMG berdasarkan Perjanjian Konsesi (Catatan 41a).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing persentase rata-rata penyelesaian pembangunan TMTL masih dalam konstruksi sebesar 83,90% dan 51,00%.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan TMTL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp40.866.323 dan Rp6.621.136.

15. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Management believes that there are no events or changes in circumstances that may indicate impairment in the value of intangible assets as of December 31, 2019 and 2018.

As of December 31, 2019 and 2018 intangible assets are not pledged as collateral.

Concession rights assets

Concession rights are assets built on the rights granted by the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia Harbourmaster Office and Port Authority (KSOP) to the Company to build and operate APBS, TMTL and TPMG based on Concession Agreement (Notes 41a).

As of December 31, 2019 and 2018, the average percentage completion of construction of TMTL under construction is 83.90% and 51.00%, respectively.

Borrowing costs capitalized for the concession rights assets of TMTL for the year ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp40,866,323 and Rp6,621,136, respectively.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi *Port Wide Solution* untuk pelayanan *car terminal*, *container terminal* dan pergudangan beserta *Annual Technical Support* (ATS) dan *change request*, aplikasi piranti lunak yang berlisensi yang digunakan untuk proses pertukaran data secara elektronik (*electronic data interchange*), aplikasi bidang operasional, ERP (sistem informasi keuangan, personalia, teknik), pengembangan *Port Community System/Inaportnet*, aplikasi *dash board system* untuk menyajikan informasi mengenai proforma operasional, integrasi antar sistem, integrasi *autogate* dan VGM untuk sistem operasi terminal.

Goodwill

Goodwill berasal dari akuisisi PT PDS pada tanggal 24 Februari 2014 dan PT TPS pada tanggal 28 April 2019 yaitu sebesar Rp1.143.301 dan Rp514.813.986. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, sehingga cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan.

16. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Piutang dalam kepengurusan Negara	17.636.751	17.636.751
Penyisihan piutang dalam kepengurusan Negara	(17.636.751)	(17.636.751)
Subtotal		-
Uang muka pembelian aset tetap	406.371.161	676.634.108
Aset lain-lain - neto	182.006.201	99.293.510
Total	588.377.362	775.927.618

Piutang dalam kepengurusan Negara merupakan piutang macet dan telah didaftarkan pada Panitia Urusan Piutang Negara ("PUPN") untuk ditindaklanjuti.

15. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Software

Software application represents cost incurred for the development of *Port Wide Solution* application for *car terminal services*, *container terminal services* and *warehouse* including *Annual Technical Support* (ATS) and *change request*, licensed software application used for *electronic data interchange*, *operational application*, *ERP* (finance, human resources, technical information system), development of *Port Community System/Inaportnet*, *dash board system* application to present information regarding *operational performance*, *system integration*, *autogate integration* and *VGM* for terminal operating system.

Goodwill

Goodwill was initially derived from the acquisition of PT PDS on February 24, 2014 and PT TPS on April 28, 2019 amounting to Rp1,143,301 and Rp514,813,986. Management believes that there was no impairment in the value of goodwill as of December 31, 2019 and 2018, therefore no allowance of impairment losses required.

16. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Piutang dalam kepengurusan Negara	17.636.751	17.636.751	Receivable from the State management
Penyisihan piutang dalam kepengurusan Negara	(17.636.751)	(17.636.751)	Allowances of receivable from the State management
Subtotal		-	Sub-total
Uang muka pembelian aset tetap	406.371.161	676.634.108	Advance for purchase fixed assets
Aset lain-lain - neto	182.006.201	99.293.510	Other assets - net
Total	588.377.362	775.927.618	Total

Receivable from the State management represent loss accounts which have already been registered to Panitia Urusan Piutang Negara ("PUPN") to be followed up.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PERPAJAKAN

17. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Perusahaan			The Company
PPN - Masukan	4.666.542	9.845.140	VAT - In
PPH Pasal 23	27.373	-	Income Tax Article 23
PPH Final	-	9.469.870	Final Income Tax
Entitas Anak			Subsidiaries
PPN - Masukan	163.093.340	125.593.372	VAT - In
PPH Pasal 23/26	5.569.321	1.661.688	Income Tax Article 23/26
PPH Pasal 28A	319.505	-	Income Tax Article 28A
PPH Final	100.285	139.620	Final Income Tax
Total	173.776.366	146.709.690	Total

b. Utang pajak

b. Tax payables

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Perusahaan			The Company
PPH Pasal 4(2)	44.620.498	37.263.647	Income Tax Article 4(2)
PPH Pasal 15	122.012	572.118	Income Tax Article 15
PPH Pasal 21	19.759.600	12.354.367	Income Tax Article 21
PPH Pasal 22	345.299	553.497	Income Tax Article 22
PPH Pasal 23/26	1.705.702	3.108.136	Income Tax Article 23/26
PPN WAPU	29.339.687	34.361.992	VAT WAPU
Subtotal	95.892.798	88.213.757	Sub-total
Entitas Anak			Subsidiaries
PPH Pasal 4(2)	1.898.128	376	Income Tax Article 4(2)
PPH Pasal 15	169.364	804.133	Income Tax Article 15
PPH Pasal 21	6.390.411	6.609.122	Income Tax Article 21
PPH Pasal 22	111.818	225.356	Income Tax Article 22
PPH Pasal 23/26	1.757.101	2.226.203	Income Tax Article 23/26
PPH Pasal 25	9.051.310	7.116.674	Income Tax Article 25
PPN (Neto)	17.531.584	15.463.338	VAT (Net)
PPH Pasal 29	32.051.062	140.082.273	Income Tax Article 29
Subtotal	68.960.778	172.527.475	Sub-total
Total	164.853.576	260.741.232	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi pajak pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.594.619.627	1.823.505.300
Dikurangi:		
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	1.421.877.250	1.448.498.848
Laba sebelum beban pajak penghasilan badan - Perusahaan	1.172.742.377	375.006.452
<u>Beda temporer:</u>		
Beban imbalan kerja	129.366.206	150.854.860
Cadangan beban pegawai	90.433.131	31.167.932
Penyisihan penurunan nilai piutang	212.004.532	(15.134.364)
Penyisihan penurunan aset tetap	3.873.640	3.948.820
Biaya emisi obligasi	7.252.938	7.889.848
Bunga	(48.457.389)	94.737.084
Amortisasi	581.304.366	(912.342.356)
Penyusutan	(863.282.448)	364.208.276
Jumlah perbedaan temporer	112.494.976	(274.669.900)
<u>Beda permanen:</u>		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	391.639.934	468.419.658
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(584.765.606)	(615.626.250)
Beban berkaitan dengan pendapatan final	23.065.030	58.524.070
Pendapatan yang bukan merupakan objek pajak	(712.985.176)	(880.451.063)
Jumlah perbedaan tetap	(883.045.818)	(969.133.585)
Taksiran laba (rugi) kena pajak	402.191.535	(868.797.033)
Laba (rugi) fiskal tahun sebelumnya:		
2015	(137.111.713)	-
2016	(142.649.189)	-
2017	(267.192.555)	-
2018	(868.797.031)	-
Taksiran akumulasi rugi fiskal setelah kompensasi rugi fiskal	(1.013.558.953)	-

17. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax

The reconciliation between income before corporate income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated tax loss in 2019 and 2018 is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.594.619.627	1.823.505.300	Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi:			Less:
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	1.421.877.250	1.448.498.848	Income before corporate income tax of subsidiaries
Laba sebelum beban pajak penghasilan badan - Perusahaan	1.172.742.377	375.006.452	Profit before corporate income tax expenses - the Company
<u>Beda temporer:</u>			<u>Temporary differences:</u>
Beban imbalan kerja	129.366.206	150.854.860	Employee Benefit expense
Cadangan beban pegawai	90.433.131	31.167.932	Employee expenses reserve
Penyisihan penurunan nilai piutang	212.004.532	(15.134.364)	Provision for impairment of receivables
Penyisihan penurunan aset tetap	3.873.640	3.948.820	Provision for impairment of fixed assets
Biaya emisi obligasi	7.252.938	7.889.848	Obligation fee
Bunga	(48.457.389)	94.737.084	Interest
Amortisasi	581.304.366	(912.342.356)	Amortization
Penyusutan	(863.282.448)	364.208.276	Depreciation
Jumlah perbedaan temporer	112.494.976	(274.669.900)	Total temporary differences
<u>Beda permanen:</u>			<u>Permanent differences:</u>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	391.639.934	468.419.658	Non-deductible expenses
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(584.765.606)	(615.626.250)	Income subject to final tax
Beban berkaitan dengan pendapatan final	23.065.030	58.524.070	Expenses related to income subject to final tax
Pendapatan yang bukan merupakan objek pajak	(712.985.176)	(880.451.063)	Income not subjected to tax
Jumlah perbedaan tetap	(883.045.818)	(969.133.585)	Total permanent differences
Taksiran laba (rugi) kena pajak	402.191.535	(868.797.033)	Estimated taxable profit (loss)
Laba (rugi) fiskal tahun sebelumnya:			Tax profit (loss) carry forward:
2015	(137.111.713)	-	2015
2016	(142.649.189)	-	2016
2017	(267.192.555)	-	2017
2018	(868.797.031)	-	2018
Taksiran akumulasi rugi fiskal setelah kompensasi rugi fiskal	(1.013.558.953)	-	Estimated accumulated tax loss after compensation of tax loss carry forward

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

c. Corporate income tax (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Taksiran akumulasi rugi fiskal setelah kompensasi rugi fiskal (pindahan)	(1.013.558.953)	-	Estimated accumulated tax loss after compensation of tax loss carry forward (brought forward)
Beban pajak kini	-	-	Current tax
Pembayaran pajak penghasilan di muka::			Prepayment of income tax:
Pasal 22	1.148	6.563.562	Article 22
Pasal 23	53.902.498	14.379.287	Article 23
Pasal 25	14.734.925	14.734.925	Article 25
Lebih bayar beban pajak penghasilan badan	68.638.571	35.677.774	Overpayment of corporate income tax expense

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam Kelompok Usaha menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, entities within the Group calculate and pay tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan badan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Reconciliation between corporate income tax expenses and the theoretical tax amount on profit before corporate income tax using the applicable tax rate is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.594.619.627	1.823.505.300	Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi:			Less:
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	1.421.877.250	1.448.498.848	Income before corporate income tax of subsidiaries
Laba sebelum beban pajak penghasilan badan - Perusahaan	1.172.742.377	375.006.452	Profit before corporate income tax expenses - the Company
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	293.185.594	93.751.613	Income tax calculated at applicable rate
Dampak perbedaan permanen	(220.761.455)	(242.283.395)	Effect of permanent Differences
Pemulihan akumulasi rugi fiskal	(136.738.364)	-	Recovery for tax losses carried forward
Perusahaan	(64.314.225)	(148.531.782)	The Company
Entitas anak	529.920.376	586.634.535	Subsidiaries
Beban pajak penghasilan badan	465.606.151	438.102.753	Corporate income tax expense

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Perhitungan taksiran rugi pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 di atas akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019.

- d. Rincian beban pajak penghasilan dan final adalah sebagai berikut:

17. TAXATION (continued)

The above calculation of estimated fiscal loss for the year ended December 31, 2019 will be used as a basis in filling the 2019 annual corporate income tax return.

- d. The details of income tax expenses and final tax expenses are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Beban pajak final			
Perusahaan	53.735.288	39.029.899	<i>Final tax expense The Company Subsidiaries</i>
Entitas anak	11.265.513	9.514.691	
Subtotal	65.000.801	48.544.590	<i>Sub-total</i>
Beban pajak penghasilan badan			
Kini			<i>Corporate income tax expense Current The Company Subsidiaries</i>
Perusahaan	-	-	
Entitas anak	545.735.537	597.212.172	
Subtotal	545.735.537	597.212.172	<i>Sub-total</i>
Tangguhan			
Perusahaan	(64.314.225)	(148.531.782)	<i>Deferred The Company Subsidiaries</i>
Entitas anak	(15.815.161)	(10.577.637)	
Subtotal	(80.129.386)	(159.109.419)	<i>Sub-total</i>
Total	530.606.952	486.647.343	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

e. Estimasi tagihan pajak

e. Estimated claims for tax refund

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Perusahaan			The Company
Pajak Penghasilan			Income Tax
2019	68.638.571	-	2019
2018	35.677.774	35.677.774	2018
2017	-	146.357.543	2017
2014	-	34.719.428	2014
Pajak Pertambahan Nilai			Value Added Tax
2018	34.998.471	79.033.751	2018
2017	-	13.252.788	2017
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak Penghasilan			Income Tax
PT BJTI	624.682	31.881.876	PT BJTI
PT PMS	15.360.051	20.819.960	PT PMS
PT TTL	-	66.884	PT TTL
PT TPS	58.343.252	-	PT TPS
Pajak Pertambahan Nilai			Value Added Tax
PT BJTI	2.342.005	68.851.041	PT BJTI
Total	215.984.806	430.661.045	Total

f. Pajak tangguhan

f. Deferred taxes

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

31 Desember 2019/December 31, 2019					
Dibebankan pada/Charged to					
	Saldo awal/ Beginning balance	Laporan laba rugi/ Statement of profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ loss and other comprehensive	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Assets
Perusahaan					Company
Liabilitas imbalan kerja	372.366.445	32.341.552	105.758.494	510.466.491	Employee Benefit
Cadangan beban pegawai	50.130.638	22.608.283	-	72.738.921	Employee expenses reserve
Penyisihan penurunan nilai piutang	25.248.516	53.001.133	-	78.249.649	Provision for impairment of receivables
Bunga	55.754.191	(12.114.347)	-	43.639.844	Interest
Biaya emisi obligasi	3.299.866	1.813.235	-	5.113.101	Obligation fee
Provisi penurunan aset tetap	2.999.161	968.410	-	3.967.571	Provision for impairment of fixed assets
Rugi fiskal	345.302.179	(33.624.300)	-	311.677.879	Tax losses carried forward
Penyisihan atas rugi fiskal	(128.102.921)	69.814.780	-	(58.288.141)	Allowance for tax losses carried forward
Penyusutan	(222.231.698)	(215.820.612)	(16.400.633)	(454.452.943)	Depreciation
Amortisasi	(278.027.914)	145.326.091	-	(132.701.823)	Amortization
Subtotal	226.738.463	64.314.225	89.357.861	380.410.549	Subtotal
Entitas anak	36.668.693	17.740.420	2.616.758	57.025.871	Subsidiaries
Total	263.407.156	82.054.645	91.974.619	437.436.420	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan					Deferred Tax Liabilities
Entitas anak	(63.213.116)	(1.925.259)	5.212.555	(59.925.820)	Subsidiaries
Total	(63.213.116)	(1.925.259)	5.212.555	(59.925.820)	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

f. Pajak tangguhan (lanjutan)

f. Deferred taxes (continued)

31 Desember 2018/December 31, 2018					
Dibebankan pada/Charged to					
Saldo awal/ Beginning balance	Laporan laba rugi/ Statement of profit or loss	Penghasilan Komprensif lain/ Loss and other comprehensive	Saldo akhir/ Ending balance		
Aset Pajak Tangguhan				Deferred Tax Assets	
Perusahaan				Company	
Liabilitas imbalan kerja	561.960.488	37.713.715	(227.307.758)	372.366.445	Employee Benefit
Cadangan beban pegawai	42.338.655	7.791.983	-	50.130.638	Employee expenses reserve
Penyisihan penurunan nilai piutang	29.032.107	(3.783.591)	-	25.248.516	Provision for impairment of receivables
Bunga	32.069.920	23.684.271	-	55.754.191	Interest
Biaya emisi obligasi	1.327.404	1.972.462	-	3.299.866	Obligation fee
Provisi penurunan aset tetap	2.011.956	987.205	-	2.999.161	Provision for impairment of fixed assets
Rugi fiskal	167.019.280	178.282.899	-	345.302.179	Tax losses carried forward
Penyisihan atas rugi fiskal	(167.019.280)	38.916.359	-	(128.102.921)	Allowance for tax losses carried forward
Penyusutan	(292.629.122)	91.052.069	(20.654.645)	(222.231.698)	Depreciation
Amortisasi	(49.942.325)	(228.085.589)	-	(278.027.914)	Amortization
Subtotal	326.169.083	148.531.783	(247.962.403)	226.738.463	Subtotal
Entitas anak	24.027.514	14.912.027	(2.270.848)	36.668.693	Subsidiaries
Total	350.196.597	163.443.810	(250.233.251)	263.407.156	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan				Deferred Tax Liabilities	
Entitas anak	(62.588.195)	(4.334.390)	3.709.469	(63.213.116)	Subsidiaries
Total	(62.588.195)	(4.334.390)	3.709.469	(63.213.116)	Total

g. Surat Ketetapan Pajak

g. Tax Assessment Letter

Perusahaan

The Company

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2014

Tax assessment for fiscal year 2014

Pajak penghasilan badan 2014

Corporate income tax 2014

Berdasarkan SKPKB Pajak Penghasilan Badan No. 00001/206/14/093/16 tanggal 17 Februari 2016 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan kurang bayar pajak penghasilan badan untuk tahun 2014 sebesar Rp8.959.588 ditambah sanksi administrasi sebesar Rp2.508.685, dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp785.944.424.

Based on the SKPKB of Corporate Income Tax No. 00001/206/14/093/16 dated February 17, 2016 from the Head of the Tax Office for Large Taxpayers Four, the Company had an underpayment of corporate income tax for 2014 amounting to Rp8,959,588 plus administrative sanction amounting to Rp2,508,685 with taxable income amounting to Rp785,944,424.

Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut melalui Surat No. KU.05/47/P.III-2016 tanggal 31 Maret 2016. Namun berdasarkan No. KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Maret 2017, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan menolak keberatan Wajib Pajak dalam suratnya No. KU.05/47/P.III.2016 tanggal 31 Maret 2016. Perusahaan telah membayar pajak terutang atas keputusan tersebut pada tanggal 17 Mei 2017. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

The Company has filed an objection to the SKPKB through Letter No. KU.05/47/P.III-2016 dated March 31, 2016. However, based on No. KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 dated March 16, 2017, Directorate General of Taxes rejected the objection of the Tax Payer in letter No. KU.05/47/P.III.2016 dated March 31, 2016. The Company has paid the indebted tax on such decision on May 17, 2017. The Company appealed against the decision.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pajak penghasilan badan 2014 (lanjutan)

Pada tanggal 14 Juni 2017, Perusahaan melalui Surat No. KU.05/44/P.III-2017 mengajukan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Maret 2017 kepada Pengadilan Pajak tentang Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun 2014.

Perusahaan telah menerima pengembalian lebih bayar pajak penghasilan tahun pajak 2014 tersebut sebesar Rp34.719.428 pada tahun berjalan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2017

Pajak Penghasilan Badan 2017

Berdasarkan SKPLB Pajak Penghasilan Badan No. 00017/406/17/093/19 tanggal 25 April 2019 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan lebih bayar pajak penghasilan badan untuk tahun 2017 sebesar Rp146.357.543.

Perusahaan telah menerima pengembalian lebih bayar pajak penghasilan tahun pajak 2017 tersebut sebesar Rp146.357.543 pada tahun berjalan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pajak Pertambahan Nilai 2017

Berdasarkan SKPLB Pajak Pertambahan Nilai No. 00045/407/17/093/19 tanggal 25 April 2019 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan lebih bayar pajak pertambahan nilai masa Desember 2017 sebesar Rp12.625.407. Perusahaan telah menerima pengembalian lebih bayar pajak pertambahan nilai tahun pajak 2017 tersebut sebesar Rp12.625.407 pada tahun berjalan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah yang dikoreksi oleh Pemeriksa sebesar Rp627.381 dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

17. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

The Company (continued)

Corporate income tax 2014 (continued)

On June 14, 2017, the Company through Letter No. KU.05/44/P.III-2017 filed an Appeal on Decision of the Director General of Tax No. KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 dated March 16, 2017 to the Tax Court about objection of SKPKB PPh Badan Year 2014.

The Company received the refund on overpayment of income tax in 2014 amounting to Rp 34,719,428 in the current year via PT Bank Negara Republik Indonesia (Persero) Tbk.

Tax assessment for fiscal year 2017

Corporate Income Tax 2017

Based on SKPLB Corporate Income Tax No. 00017/406/17/093/19 dated April 25, 2019 from the Head of the Large Tax Office Four, the Company had an overpayment of corporate income tax 2017 amounting to Rp146,357,543.

The Company received the refund on overpayment of income tax in 2017 amounting to Rp Rp146,357,543 in the current year via PT Bank Negara Republik Indonesia (Persero) Tbk.

Value Added Tax 2017

Based on SKPLB Value Added Tax No. 00045/407/17/093/19 dated April 25, 2019 from the Head of Large Tax Office Four, the Company had an overpayment of value added tax for December, 2017 amounting to Rp12,625,407. The Company received the refund on overpayment of value added tax in 2017 amounting to Rp12,625,407 in the current year via PT Bank Negara Republik Indonesia (Persero) Tbk. The amount corrected by tax audit amounting to Rp627,381 was charged to current year's profit or loss

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pajak Penghasilan Badan 2018

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. PEMB-00188/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019 tanggal 25 Juli 2019, Perusahaan sedang dalam proses pemeriksaan pajak penghasilan badan tahun fiskal 2018 dengan estimasi tagihan pajak sebesar Rp35.677.774.

Pajak Pertambahan Nilai 2018

Berdasarkan SKPLB Pajak Pertambahan Nilai No. 00006/407/18/093/19 dan No. 00007/407/18/093/19 tanggal 21 Februari 2019 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan lebih bayar pajak pertambahan nilai masa Maret 2018 dan April 2018 masing-masing sebesar Rp30.152.799 dan Rp17.938.853. Perusahaan telah menerima pengembalian lebih bayar pajak pertambahan nilai 2018 tersebut sebesar masing-masing Rp30.152.799 dan Rp17.938.853 pada tahun berjalan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sedangkan sisanya masih dalam proses pemeriksaan.

Entitas Anak

PT BJTI

PT BJTI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00013/406/16/093/18 pada 19 April 2018 atas pajak penghasilan badan tahun 2016 sebesar Rp5.069.702 dari tagihan lebih bayar pajak yang diajukan PT BJTI sebesar Rp35.046.414. Pengembalian tersebut dikompensasi dengan SKPKB pajak pertambahan nilai masa Januari hingga Desember 2016. PT BJTI telah mengajukan keberatan atas SKPLB tersebut pada tanggal 16 Juli 2018.

PT BJTI menerima Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-00959/KEB/WPJ.19/2019 pada tanggal 31 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan senilai Rp2.555.542. Atas keputusan tersebut, PT BJTI mengajukan banding pada tanggal 24 Juli 2019.

17. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

The Company (continued)

Corporate Income Tax 2018

Based on Notification Letter of Inspection No. PEMB-00188/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019 dated July 25, 2019, the Company still in the process of inspection of the corporate income tax on fiscal year 2018 with estimated for tax refund amounting to Rp35,677,774.

Value Added Tax 2018

Based on SKPLB Value Added Tax No. 00006/407/18/093/19 and No. 00007/407/18/093/19 dated February 21, 2019 from the Head of the Large Tax Office Four, the Company had an overpayment of value added tax for March, 2018 and April 2018 amounting to Rp30,152,799 and Rp17,938,853, respectively. The Company received the refund on overpayment of value added tax in 2018 amounting to Rp30,152,799 and Rp17,938,853, respectively in the current year via PT Bank Negara Republik Indonesia (Persero) Tbk where the rest is still in examination process.

Subsidiaries

PT BJTI

PT BJTI received Notice of Tax Overpayment Assessment (SKPLB) No.00013/406/16/093/18 on April 19, 2018 of overpayment of corporate income tax for the year 2016 amounting to Rp5,069,702 out of the Rp35,046,414 for tax refund claimed by PT BJTI. The refund was compensated with SKPKB value added tax for January to December 2016. PT BJTI has filed an objection of the SKPLB dated July 16, 2018.

PT BJTI received a decision letter from the Directorate General of Taxes No. KEP-00959/KEB/WPJ.19/2019 dated May 31, 2019 which stated that the Directorate General of Taxes granted partial objections amounting to Rp2,555,542. PT BJTI has submitted an appeal dated July 24, 2019.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

- g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT BJTI (lanjutan)

Pada tanggal 19 Desember 2019, PT BJTI mengajukan pengajuan surat pencabutan banding dan telah disetujui oleh Pengadilan Pajak melalui Surat Penetapan Pengadilan Pajak No. PEN-1/PP/CBT/2020 tanggal 8 Januari 2020.

Nilai sisa estimasi tagihan pajak sebesar Rp 27.421.170 diakui sebagai bagian dari beban pajak kini tahun 2019.

PT PMS

Termasuk di dalam jumlah estimasi tagihan pajak adalah kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan PT PMS tahun 2018 sebesar Rp7.212.895. Dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") tanggal 26 September 2019, pajak penghasilan badan Perusahaan tahun 2018 telah dinyatakan rampung dengan lebih bayar sebesar Rp7.212.895, sesuai dengan catatan Perusahaan dan telah diterima pada bulan Oktober 2019.

17. TAXATION (continued)

- g. Tax Assessment Letter (continued)

Subsidiaries (continued)

PT BJTI (continued)

On December 19, 2019, PT BJTI submitted a revocation letter of tax appeal and it has been approved by the Tax Court through decision letter No. PEN-1/PP/CBT/2020 dated January 8, 2020.

The estimated claims for tax refund balance amounting to Rp27,421,170 is recorded as part of current income tax expenses year 2019.

PT PMS

Included in PT PMS' estimated claims for tax refund year 2018 is the overpayment of PT PMS corporate income tax year 2018 amounting Rp7,212,895. In the decision letter dated September 26, 2019 issued by the Directorate General of Taxes ("DGT"), the corporate income tax for 2018 of the Company was finalized with overpayment amounting to Rp7,212,895, same with the balance as recorded by the Company and has been received on October 2019.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

18. UTANG USAHA

a. Berdasarkan pemasok

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak ketiga			Third parties
Swasta	568.633.930	527.416.198	Private
Pihak berelasi (Catatan 6)	61.714.668	79.144.186	Related parties (Note 6)
Total	630.348.598	606.560.384	Total

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah	620.432.172	593.136.130	Rupiah
Dolar AS	9.916.426	13.424.254	US Dollar
Total	630.348.598	606.560.384	Total

19. UTANG LAIN-LAIN

a. Berdasarkan pemasok

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak ketiga			Third parties
Swasta	404.348.746	439.382.061	Private
Pihak berelasi (Catatan 6)	385.618.157	259.531.313	Related parties (Note 6)
Total	789.966.903	698.913.374	Total

18. TRADE PAYABLES

a. By supplier

b. By currency

19. OTHER PAYABLES

a. By supplier

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Dollar AS	112.185.398	135.136.363	US Dollar
Euro	1.248.233	1.248.233	Euro
Rupiah	676.533.272	562.528.778	Rupiah
Total	789.966.903	698.913.374	Total

19. OTHER PAYABLES (continued)

b. By currency

20. BEBAN AKRUAL

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pegawai	440.289.804	371.878.190	Employees
Kerjasama mitra usaha	175.212.873	370.799.194	Partnership
Bunga	173.876.736	220.023.521	Interest
Umum	134.264.242	193.127.666	General
Pemeliharaan	59.170.361	59.280.793	Maintenance
Lain-lain	127.698.301	72.401.098	Others
Total	1.110.512.317	1.287.510.462	Total

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual untuk bonus karyawan dan tantiem.

Accrued expenses - employees mainly represent accrued expenses for employee's bonus and directors' tantiem.

Beban akrual - kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi atas kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan serta beban pegawai nonorganik.

Accrued expenses - partnership expenses mainly represent the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners for stevedoring activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

Beban akrual - umum terutama merupakan akrual beban pembelian bahan bakar.

Accrued expenses - generally represent accrued expenses for fuel purchase.

Beban akrual - pemeliharaan merupakan beban akrual untuk suku cadang dan pemeliharaan.

Accrued expenses - maintenance represent accrued expenses for spareparts and maintenance.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**21. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA JANGKA
PENDEK**

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Uang untuk diperhitungkan		
Pihak ketiga	149.827.219	191.086.509
Pihak berelasi (Catatan 6)	40.158.552	35.352.196
Subtotal	189.985.771	226.438.705
Pelayanan jasa perusahaan		
tanah, bangunan, air, dan		
listrik	39.037.637	26.698.909
Lain - lain	-	650.200
Subtotal	39.037.637	27.349.109
Bagian lancar pendapatan		
diterima di muka jangka		
panjang (Catatan 24)	63.236.557	52.764.596
Total	292.259.965	306.552.410

Uang untuk diperhitungkan merupakan penerimaan uang dimuka dari pelanggan berkaitan dengan pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik dari Kelompok Usaha.

21. SHORT-TERM UNEARNED REVENUE

Advances from customers
Third parties
Related parties (Note 6)
Subtotal

Land, building, water and
electricity service
Others
Subtotal

Current portion of
long-term unearned
revenue (Note 24)
Total

Advances from customers represent advances received from customers related to ship services, goods services, container services and logistic services from the Group.

22. UTANG BANK JANGKA PANJANG

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Pihak ketiga		
Deutsche Bank AG, London		
Branch	243.927.559	607.527.943
Bagian lancar utang bank jangka		
panjang	(162.163.278)	(351.140.707)
Total	81.764.281	256.387.236

Third parties
Deutsche Bank AG, London Branch
Current maturities of long-term
bank loans
Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Tingkat bunga pinjaman bank jangka panjang:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Rupiah	-	7,53% - 7,68%
Dolar AS	1.79%	2,27%

Perusahaan

Deutsche Bank AG, London Branch

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 30 Agustus 2013, yang terakhir diubah tanggal 19 April 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas *letter of credit* (LC) sebesar US\$121.241.871 (angka penuh) yang terdiri dari Fasilitas A dan Fasilitas B, masing-masing sejumlah US\$62.913.953 (angka penuh) dan US\$58.327.918 (angka penuh) dari Deutsche Bank AG, London Branch. Tidak ada jaminan yang diberikan untuk fasilitas ini.

Pembayaran pinjaman dilakukan setiap semester selama 10 kali dimulai sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan 29 Desember 2019 untuk fasilitas A dan tanggal 30 November 2016 sampai dengan 30 Mei 2021 untuk fasilitas B. Jumlah pokok pinjaman yang dibayarkan pada tahun 2019 adalah sebesar US\$12.582.791 (angka penuh) untuk fasilitas A dan US\$11.665.584 (angka penuh) fasilitas B.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan.

Pinjaman Bank Sindikasi

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 23 Juni 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *non revolving* dengan jumlah maksimum sebesar Rp4.500.000.000 dari Bank Sindikasi yang terdiri dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tidak ada jaminan yang diberikan untuk fasilitas ini. Pembayaran pinjaman dilakukan secara kuartalan.

Pada tanggal 28 Februari 2018, Perusahaan telah melunasi pinjaman bank sindikasi seluruhnya.

22. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Annual interest rate of long-term bank loans:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah	-	7,53% - 7,68%	Rupiah
US Dollar	1.79%	2,27%	US Dollar

The Company

Deutsche Bank AG, London Branch

Based on credit agreement dated August 30, 2013 which was lastly amended on April 19, 2018 the Company obtained a letter of credit (LC) loan facility amounting to US\$121,241,871 (full amount) which consists of Facility A and Facility B amounting to US\$62,913,953 (full amount) and US\$58,327,918 (full amount), respectively, from Deutsche Bank AG, London Branch. There is no collateral given for these facilities.

The repayment is done every semester for 10 installments starting from June 29, 2015 until December 29, 2019 for facility A and November 30, 2016 until May, 30 2021 for facility B. Total repayments made in 2019 amounted to US\$12,582,791 (full amount) for facility A and US\$11,665,584 (full amount) for facility B.

As of December 31, 2019 and December 31, 2018, the Company complied with the required covenants.

Syndicated Bank Loans

Based on credit agreement dated 23 Juni 2016, the Company obtained a non revolving loan facility with a maximum facility of Rp4,500,000,000 from Syndicated Banks which consist of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. There is no collateral given for these facilities. The repayment of the loans is in quarterly basis.

On February 28, 2018, the Company has fully paid the syndicated bank loans.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

23. SECURITIES ISSUED

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Senior notes penerbitan tahun 2014 USD500.000.000	6.950.500.000	7.240.500.000	Senior notes issued in 2014 USD500,000,000
Senior notes penerbitan tahun 2018 USD500.000.000	6.950.500.000	7.240.500.000	Senior notes issued in 2018 USD500,000,000
Diskonto dan biaya penerbitan	83.575.951	48.773.678	Discount and issuance cost
Dikurangi:			Less:
Diskonto dan biaya penerbitan yang belum diamortisasi	(200.160.721)	(200.160.721)	Unamortized of discount and issuance cost
Total	13.784.415.230	14.329.612.957	Total

Obligasi/ Bonds	Pokok utang/Debt principal	Penerbit/ Issuer	Tempat pencatatan/Listed	Tanggal terbit/Issue date	Jatuh tempo/ Due date	Periode pembayaran bunga/Interest payment period	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
Senior Notes due 2024	USD500.000.000	Perusahaan/ the Company	Singapore Exchange Securities Trading Limited	1 Oktober 2014/ October 1, 2014	1 Oktober 2024/ October 1, 2024	Setengah tahunan/Semi- Annually	4,875%
Senior Notes due 2024	USD500.000.000	Perusahaan/ the Company	Singapore Exchange Securities Trading Limited	2 Mei 2018/ May 2, 2018	2 Mei 2023/ May 2, 2023	Setengah tahunan/Semi- Annually	4,500%

Perusahaan menerbitkan US\$500.000.000 (nilai penuh) Senior Notes masing-masing berdasarkan Perjanjian Pembelian pada tanggal 24 September 2014 dan addendum dari perjanjian tersebut tertanggal 30 September 2014, dan Perjanjian Pembelian tanggal 24 April 2018, yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2024 dan tanggal 2 Mei 2023, dengan harga penerbitan masing-masing adalah 99,314% dan 99,809%. Senior Notes tersebut digunakan untuk pelunasan outstanding utang, keperluan pendanaan ekspansi dan keperluan umum korporasi lainnya.

The Company issued US\$500,000,000 (full amount) Senior Notes based on Purchase Agreement dated September 24, 2014 and an addendum to this agreement dated September 30, 2014, and Purchase Agreement dated April 24, 2018 which will be due on October 1, 2024 and May 2, 2023, with issue price of 99.314% and 99.809%, respectively. The Senior Notes are used to refinance existing loan facilities, fund expansion plans and for other general corporate purposes.

Penjamin pelaksana emisi obligasi untuk tahun 2014 adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited, dan Standard Chartered Bank. Wali Amanat untuk tahun 2014 adalah The Bank of New York Mellon Corporation.

Acting as the joint bookrunners for 2014 are Australia and New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited, and Standard Chartered Bank. Acting as the trustee for 2014 is The Bank of New York Mellon Corporation.

Penjamin pelaksana emisi obligasi untuk tahun 2018 adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, Mandiri Securities PTE. LTD, dan Standard Chartered Bank. Wali amanat untuk tahun 2018 adalah The Bank of New York Mellon Corporation.

Acting as the joint bookrunners for 2018 are Australia and New Zealand Banking Group Limited, Mandiri Securities PTE. LTD, and Standard Chartered Bank. Acting as the trustee for 2018 is The Bank of New York Mellon Corporation.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**23. SURAT BERTAHAGA YANG DITERBITKAN
(lanjutan)**

Senior Notes masing-masing dikenakan bunga tetap sebesar 4,875% dan 4,500% per tahun, yang dibayarkan masing-masing setengah tahunan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober untuk tahun 2014 dan setiap tanggal 2 Mei dan 2 November untuk tahun 2018. *Senior Notes* dicatat pada Bursa Efek Singapura, tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh Perusahaan.

Pada tahun 2019, Perusahaan telah memperoleh penilaian dari tiga Lembaga Pemeringkat Internasional, yaitu *Fitch Rating, Standard and Poors (S&P), dan Moody's Investor Service* dengan peringkat dari obligasi tersebut masing-masing BBB-, BBB- dan Baa3 *stable*. Perusahaan tidak diharuskan melakukan pembentukan dana untuk pelunasan utang *Senior Notes* ini.

**24. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA JANGKA
PANJANG**

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk	133.356.569	147.654.701
PT Salim Ivomas Pratama, Tbk	51.023.142	55.894.129
Lain-lain	233.847.848	202.220.965
Subtotal	418.227.559	405.769.795
Bagian lancar (Catatan 21)	(63.236.557)	(52.764.596)
Total bagian jangka panjang	354.991.002	353.005.199

Pendapatan diterima dimuka jangka panjang merupakan sewa tanah HGB dan sewa bangunan di lingkungan pelabuhan yang jatuh tempo lebih dari setahun. Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp354.991.002 dan Rp353.005.199.

23. SECURITIES ISSUED (continued)

The *Senior Notes* bear fixed interest at 4.875% and 4.500% annually, paid semi-annually in arrears on April 1 and October 1 for the Year 2014 and May 2 and November 2 for the Year 2018. The *Senior Notes*, which were listed at the Singapore Exchange Securities Trading Limited, are irrevocably and unconditionally guaranteed by the Company.

In 2019, the Company has obtained ratings from three International Rating Agencies, namely *Fitch Rating, Standard and Poors (S&P) and Moody's Investors Service* where the bonds are rated at BBB-, BBB- and Baa3 *stable*, respectively. The Company is not required to provide sinking fund with respect to repayment of the *Senior Notes*.

24. LONG-TERM UNEARNED REVENUE

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk	133.356.569	147.654.701
PT Salim Ivomas Pratama, Tbk	51.023.142	55.894.129
Others	233.847.848	202.220.965
Subtotal	418.227.559	405.769.795
Current portion (Notes 21)	(63.236.557)	(52.764.596)
Total long-term portion	354.991.002	353.005.199

Long-term unearned revenue represents advance received from rental of landrights and buildings around the port which will be due in more than a year. Balance as of December 31, 2019 and 2018 amounting to Rp354,991,002 and Rp353,005,199, respectively.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Kelompok Usaha mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen, PT Sentra Jasa Aktuaria, PT RAS Actuarial Consulting, PT Emerald Delta Consulting, PT Tama Aktuaria dan PT Binaputera Jaga Hikmah, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Berikut adalah asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam laporan aktuaris independen:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Tingkat diskonto	7,98%/tahun/year	8,50%/tahun/year	Discount rate
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	6,50%/tahun/year	6,50%/tahun/year	Salary increase projection rate
Tingkat mortalitas	TMI III 2011 10% dari tabel	TMI III 2011 10% dari tabel	Mortality rate
Tingkat cacat tetap (dari tabel mortalitas)	mortalitas/of mortality rate	mortalitas/of mortality rate	Permanent disability rate (from mortality table)
Tingkat pengunduran diri	1,00% usia/age 20-29 0,5% usia/age 30-39 0,25% usia/age 40-45 0,13% usia/age 45 ke atas/and above	1,00% usia/age 20-29 0,5% usia/age 30-39 0,25% usia/age 40-45 0,13% usia/age 45 ke atas/and above	Resignation level
Usia pensiun normal	58 tahun/58 years	58 tahun/58 years	Normal pension age

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The employee benefit liabilities are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Program pensiun	450.546.287	333.828.742	Pension program
Program kesehatan pensiunan	1.559.049.632	1.143.277.616	Pension healthcare program
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	32.270.045	12.359.423	Other long-term employee benefits
Subtotal	2.041.865.964	1.489.465.781	Subtotal
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Program pensiun dan imbalan pascakerja lainnya	119.168.349	82.702.022	Pension program and other post-benefits program
Total	2.161.034.313	1.572.167.803	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pensiun untuk karyawan tetap yang dipekerjakan pada tahun 2003 dan sebelumnya yang dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) dan untuk yang dipekerjakan sejak tahun 2004 dikelola oleh Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

Manfaat yang diperhitungkan termasuk penghargaan purna bakti dan cinderamata yang mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Dana Pensiun dengan definisi gaji yang meliputi gaji *merit* dan tunjangan prestasi pegawai.

Liabilitas imbalan kerja dan pencadangan biaya imbalan kerja atas program pensiun ini adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas	661.450.278	369.772.468	<i>Present value of liabilities</i>
Nilai wajar aset program	(210.903.991)	(35.943.726)	<i>Fair value of plan assets</i>
Liabilitas yang diakui	450.546.287	333.828.742	Recognized liabilities

25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

a. Pension program

The Company has a pension benefit plan covering permanent employees who hired in and before 2003 which managed by Dana Pensiun Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) and for employees hired with permanent status since 2004 managed by Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

Benefits that are calculated include the gratuity and long-service awards in accordance with the Collective Labor Agreement and the Regulations of the Pension Fund, with the salary including merit pay and employee performance allowance.

Employee benefits liabilities and employee benefits expenses for the pension program are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Biaya jasa kini	26.308.310	28.561.646	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga, neto	28.375.443	21.404.276	<i>Interest cost, net</i>
Biaya jasa lalu	14.607.388	-	<i>Past service cost</i>
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang	756.903	-	<i>Remeasurement of Other Long Term Employee Benefits</i>
Beban yang diakui	70.048.044	49.965.922	Recognized expense

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Liabilitas awal tahun	333.828.742	315.335.402	<i>Liabilities at beginning of year</i>
Beban yang diakui dalam laba rugi	70.048.044	49.965.922	<i>Expense recognized in profit or loss</i>
Beban yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	82.554.375	8.735.429	<i>Expense recognized in the other comprehensive income</i>
Iuran pemberi kerja	(17.279.531)	(10.926.833)	<i>Employer's contributions</i>
Pembayaran manfaat	(18.605.343)	(29.281.178)	<i>Benefit payments</i>
Liabilitas akhir tahun	450.546.287	333.828.742	Liabilities at end of year

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

a. Program pensiun (lanjutan)

a. Pension program (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	369.772.468	387.688.085	Present value of liabilities - beginning of year
Biaya jasa kini	26.308.310	28.561.646	Current service cost
Biaya bunga	31.430.660	26.754.346	Interest cost
Biaya jasa lalu	14.607.388	-	Past service cost
Pembayaran manfaat Keuntungan (kerugian) aktuarial	(64.799.069)	(37.325.257)	Benefit payments
	284.130.521	(35.906.352)	Actuarial gain (loss)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	661.450.278	369.772.468	Present value of liabilities - end of year
			(46.765.816)
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Nilai wajar aset program awal tahun	35.943.726	72.352.683	Fair value of program assets - beginning of year
Pendapatan bunga	3.055.217	5.350.070	Interest income
Laba (rugi) ekspektasian aset program	200.819.243	(44.641.781)	Expected profit (loss) from program assets
luran pemberi kerja	17.279.531	10.926.833	Employer's contributions
luran peserta program	572.090	-	Plan participants' contributions
Pembayaran manfaat	(46.765.816)	(8.044.079)	Benefits payments
Nilai wajar aset program akhir tahun	210.903.991	35.943.726	Fair value of program assets at end of year

Aset program yang dimiliki oleh Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

Plan assets owned by the Group are as follows:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| - Reksa dana 33,09% | - Mutual funds 33.09% |
| - Aset tetap 48,37% | - Fixed assets 48.37% |
| - Investasi saham 2,86% | - Investment in shares 2.86% |
| - Surat utang negara 9,54% | - State bonds 9.54% |
| - Penempatan langsung 5,95% | - Direct placement 5.95% |
| - Deposito berjangka 0,19% | - Time deposits 0.19% |

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program pensiun (lanjutan)

Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Jatuh tempo <= 1 tahun	285.990.286
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	53.600.954
Jatuh tempo > 5 tahun	288.309.930
Total	627.901.170

Sensitivitas dari liabilitas imbalan kerja terhadap perubahan asumsi aktuarial adalah sebagai berikut

2019	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit obligation	Beban jasa kini/ Current service cost	2019
Tingkat diskonto	Kenaikan/increase 1%	(36.927.428)	(3.817.732)	Discount rate
	Penurunan/decrease 1%	45.821.286	3.192.713	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/increase 1%	41.782.626	3.232.756	Salary increase rate
	Penurunan/decrease 1%	(34.720.932)	(3.901.589)	

Masa kerja

Pada tanggal 31 Desember 2019, durasi tertimbang dari liabilitas imbalan kerja adalah 9,08 tahun.

b. Program kesehatan pensiunan

Perusahaan memberikan imbalan kerja berupa program kesehatan pensiunan dan keluarga (termasuk anak dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2 orang yang belum bekerja, masih kuliah dan belum kawin dengan maksimal umur 25 tahun). Program ini tidak didanai.

25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

a. Pension program (continued)

The maturity profiles of employee benefits liability as of December 31, 2019 are as follows:

Maturity <= 1 year
Maturity > 1 year and <= 5 years
Maturity > 5 years

The sensitivity of employee benefit liabilities to changes in the weighted assumption is as follows.

Years of service

As of December 31, 2019, weighted duration of employee benefits liability was 9.08 years.

b. Pension healthcare program

The Company also provides long-term post-employment benefits in form of healthcare program for pensioners and family (including up to 2 unemployeed dependants, undergraduate and single with maximum age of 25 years old). This program is unfunded.

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas	1.559.049.632	1.143.277.616	Present value of liabilities
Liabilitas yang diakui	1.559.049.632	1.143.277.616	Recognized liabilities

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

b. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

b. Pension healthcare program (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Biaya jasa kini	44.878.893	42.170.482	Current service cost
Biaya bunga	97.178.598	137.591.754	Interest cost
Beban yang diakui	142.057.491	179.762.236	Recognized expense
	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Liabilitas awal tahun	1.143.277.616	1.919.273.738	Liabilities at beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	142.057.491	179.762.236	Expense recognized in profit or loss
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	340.479.602	(912.845.465)	Expense (income) recognized in the other comprehensive income
Pembayaran manfaat	(66.765.077)	(42.912.893)	Benefit payments
Liabilitas akhir tahun	1.559.049.632	1.143.277.616	Liabilities at end of year

Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The maturity profiles of employee benefits liability as of December 31, 2019 are as follows:

Jatuh tempo <= 1 tahun	24.037.505	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	613.967.089	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	4.561.204.772	Maturity > 5 years
Total	5.199.209.366	Total

Sensitivitas dari liabilitas imbalan kerja terhadap perubahan asumsi aktuarial adalah sebagai berikut

The sensitivity of employee benefit liabilities to changes in the weighted assumption is as follows.

2019	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit obligation	Beban jasa kini/ Current service cost	2019
Tingkat diskonto	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	(181.704.639) 225.342.634	(9.315.364) 12.430.289	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	- -	- -	Salary increase rate

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

c. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya

c. Other long-term employee benefits

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cuti besar merupakan manfaat yang diperhitungkan mengacu kepada Peraturan Perusahaan. Peserta adalah seluruh pegawai tetap Perusahaan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus menerus dan diberikan bantuan cuti besar sebesar 1 kali penghasilan tetap. Program ini tidak didanai.

Other long-term permanent employee benefits are in the form of long service leave benefits that are calculated in reference to the Company's Regulation. Participants include all employees that have worked at least 6 years of continuous service and given long services gratuity amounting to 1 time regular income. This program is not funded.

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas	32.270.045	12.359.423	Present value of liabilities
Liabilitas yang diakui	32.270.045	12.359.423	Recognized liabilities
	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Biaya jasa kini	4.807.937	4.505.570	Current service cost
Biaya bunga	1.050.551	916.794	Interest cost
Beban yang diakui	5.858.488	5.422.364	Recognized expense
	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Liabilitas awal tahun	12.359.423	13.232.813	Liabilities at beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	5.858.488	5.422.364	Expense recognized in profit or loss
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	19.613.195	(5.120.994)	Expense (income) recognized in the other comprehensive income
Pembayaran manfaat	(5.561.061)	(1.174.760)	Benefit payments
Liabilitas akhir tahun	32.270.045	12.359.423	Liabilities at end of year

Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The maturity profiles of employee benefits liability as of December 31, 2019 are as follows:

Jatuh tempo <= 1 tahun	3.459.405	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	30.563.821	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	264.753.712	Maturity > 5 years
Total	298.776.938	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

c. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Sensitivitas dari liabilitas imbalan kerja terhadap perubahan asumsi aktuarial adalah sebagai berikut

2019	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit obligation	Beban jasa kini/ Current service cost	2019
Tingkat diskonto	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	(1.918.885) 2.137.449	(291.830) 326.259	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	2.147.533 (1.961.609)	327.801 (298.316)	Salary increase rate

d. Program pensiun iuran pasti

Kelompok Usaha menyediakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sejak tahun 2004. Iuran program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

Pada tahun 2019 dan 2018, iuran program yang dibayarkan Kelompok Usaha masing-masing sebesar Rp17.851.621 dan Rp19.625.197.

25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

c. Other long-term employee benefits (continued)

The sensitivity of employee benefit liabilities to changes in the weighted assumption is as follows.

d. Defined contribution plan

The Group provides a defined contribution pension plan for employees hired with permanent status since 2004. The contribution plan is managed by Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

In 2019 and 2018, contribution plan paid by the Group amounted to Rp17,851,621 and Rp19,625,197, respectively.

26. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah:

Pemegang saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nominal/ Amount	Shareholders
Negara Republik Indonesia	1.018.953	100%	1.018.953.000	Republic of Indonesia

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") No. 08 tanggal 13 Agustus 2012 oleh Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notaris di Surabaya, mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN selaku Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai RUPS Perusahaan No. SK-226/MBU/S/2012 tanggal 16 Juli 2012, modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp3.200.000.000 terbagi atas 3.200.000 saham, telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

26. SHARE CAPITAL

The Shareholders of the Company as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Based on General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 08 dated August 13, 2012 by Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notary public in Surabaya, regarding the amendment of the Articles of Association and based on a copy of the Decree of the Secretary of the MSOE as the Representative of the MSOE as the Company's GMS No. SK-226/MBU/S/2012 dated July 16, 2012, the Company's authorized capital amounting to Rp3,200,000,000 divided into 3,200,000 shares, has been placed and held by the Republic of Indonesia in the following details:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. MODAL SAHAM (lanjutan)

26. SHARE CAPITAL (continued)

	Nominal/Amount	
Setoran modal lama sesuai dengan akta No. 3 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat oleh Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH.	809.222.000	Issued and paid up capital in accordance with notary deed No. 3 dated August 15, 2008 of Notary Agus Sudiono Kuntjoro, SH.
Peningkatan modal disetor tahun 2012 berasal dari:		Increase in paid up capital in 2012 came from:
Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) yang tertuang dalam PP No. 08 Tahun 2012	209.730.528	Conversion from Government Contribution (PMN) as decreed in Government Regulation (PP) No. 08 Year 2012
Kapitalisasi sebagai cadangan sampai tahun buku 2011	472	Capitalization of unappropriated retained earnings up to year 2011
Total peningkatan modal disetor tahun 2012	209.731.000	Total increase in paid up capital in 2012
Total modal ditempatkan dan disetor per 31 Desember 2019 dan 2018	1.018.953.000	Total issued and paid up capital as of December 31, 2019 and 2018

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk menyisihkan sampai dengan minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan.

Kelompok Usaha mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dan entitas anaknya dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama periode penyajian.

Kebijakan Kelompok Usaha adalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

Struktur permodalan Kelompok Usaha terdiri dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba dan penghasilan komprehensif lainnya dan utang neto).

Capital management

The primary objective of the Company capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company is also required by the Limited Liability Company Law No. 40 year 2007 effective on August 16, 2007 to allocate up until at least 20% from the issued and paid-in capital into non-distributable reserve.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company and its subsidiaries may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

The Group's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

The capital structure of the Group consists of equity attributable to owner of the Parent (consisting of share capital, additional paid-in capital, retained earnings and other comprehensive income and net payables).

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. DIVIDEN

- a. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 29 tanggal 29 April 2019 dari Notaris Emy Susilowati, SH., pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:
- penggunaan laba neto konsolidasian Perusahaan tahun buku 2018 sebagai berikut:
 - pembagian dividen tunai sebesar 30% dari laba neto atau sebesar Rp227.891.712.
 - penetapan cadangan sebesar 70% dari laba neto atau sebesar Rp531.747.328.

Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 29 Mei 2019.

- b. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 2 tanggal 3 April 2018 dari Notaris Emy Susilowati, SH., pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:
- penggunaan laba neto konsolidasian Perusahaan tahun buku 2017 sebagai berikut:
 - pembagian dividen tunai sebesar 30% dari laba neto atau sebesar Rp441.147.068.
 - penetapan cadangan sebesar 70% dari laba neto atau sebesar Rp1.029.343.158.

Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 3 Mei 2018.

27. DIVIDEND

- a. Based on the General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 29 on April 29, 2019 of Emy Susilowati, SH., the shareholders approved, among others:
- utilization of 2018 consolidated net income of the Company as follows:
 - distribution of cash dividends 30% of net income or amounted to Rp227,891,712.
 - reserve 70% of net income or amounted to Rp531,747,328.

The Company has paid the above mentioned dividend on May 29, 2019.

- b. Based on the General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 2 on April 3, 2018 of Emy Susilowati, SH., the shareholders approved, among others:
- utilization of 2017 consolidated net income of the Company as follows:
 - distribution of cash dividends 30% of net income or amounted to Rp441,147,068.
 - reserve 70% of net income or amounted to Rp1,029,343,158.

The Company has paid the above mentioned dividend on May 3, 2018.

28. SELISIH ATAS PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS ANAK DAN DAMPAK TRANSAKSI DENGAN KEPENTINGAN NONPENGENDALI

28. DIFFERENCE FROM CHANGES IN EQUITY OF SUBSIDIARIES AND EFFECTS OF TRANSACTIONS WITH NON-CONTROLLING INTEREST

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
PT BMS	38.697.264	38.697.264	PT BMS
PT APBS	33.152.625	33.037.875	PT APBS
PT PEL	(3.885.488)	(3.872.038)	PT PEL
PT PMS	(29.223.425)	(29.122.275)	PT PMS
PT TPS	(514.813.986)	-	PT TPS
Total	(476.073.010)	38.740.826	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

28. SELISIH ATAS PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS ANAK DAN DAMPAK TRANSAKSI DENGAN KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

PT BMS

Akun ini merupakan selisih antara nilai nominal saham dengan setoran modal saham yang diterima dari PT Usaha Era Pratama Nusantara sebesar Rp38.697.264.

PT APBS

Akun ini merupakan selisih antara nilai nominal saham dengan setoran modal saham yang diterima dari Van Oord Dredging dan Marine Contractor, BV masing-masing sebesar Rp33.152.625 dan Rp33.037.875 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

PT PEL

Akun ini merupakan nominal pembelian saham kembali milik PT PEL dan reklasifikasi dari bagian non pengendali atas pembelian saham kembali oleh PT PEL. Berdasarkan Akta Notaris Amanda Mirza Ervariana No. 2, tanggal 24 Mei 2018, PT BJTI membeli 1% saham treasury PT PEL sehingga saldo saldo tambahan modal disetor pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing Rp3.885.488 dan Rp3.872.038.

PT PMS

Akun ini merupakan selisih antara nilai nominal saham milik PT APBS yang dibeli oleh PT PMS dari Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV dan PT Gerbang Samudra Utama dengan setoran modal saham sebesar Rp29.223.425 pada tanggal 31 Desember 2019.

PT TPS

Akun ini merupakan selisih antara nilai nominal saham milik PT TPS yang dibeli oleh Perusahaan dari P&O Dover (Holdings) Limited dengan setoran modal saham sebesar Rp514.813.986 pada tanggal 31 Desember 2019.

28. DIFFERENCE FROM CHANGES IN EQUITY OF SUBSIDIARIES AND EFFECTS OF TRANSACTIONS WITH NON-CONTROLLING INTEREST (continued)

PT BMS

This account represents the difference between the par value and the capital contribution received from PT Usaha Era Pratama Nusantara amounting to Rp38,697,264.

PT APBS

This account represents the difference between the par value and the capital contribution received from Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV amounting to Rp33,152,625 and Rp33,037,875 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

PT PEL

This account represents the shares buy-back transactions of PT PEL and reclassification of the non-controlling interest that forms part of the shares buy back by PT PEL. Based on Amanda Mirza Ervariana Notarial Deed No. 2, dated May 24, 2018, PT BJTI purchases 1% of PT PEL's treasury shares so that the additional balance of paid-in capital as of December 31, 2019 and 2018 is Rp3,885,488 and Rp3,872,038, respectively.

PT PMS

This account represents the difference between the par value owned by PT APBS which was purchased by PT PMS from Van Oord Dredging Marine Contractor, BV and PT Gerbang Samudra Utama with the capital contribution received amounting to Rp29,223,425 as of December 31, 2019.

PT TPS

This account represents the difference between the par value owned by PT TPS which was purchased by the Company from P&O Dover (Holdings) Limited with the capital contribution received amounting to Rp513,813,986 as of December 31, 2019.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

29. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Saldo awal	1.453.839.874	718.347.423	Beginning balance
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(345.010.720)	685.395.925	Remeasurements of defined benefit plans
Perubahan cadangan aset revaluasi	42.654.172	50.096.526	Changes in asset revaluation reserves
Saldo akhir	1.151.483.326	1.453.839.874	Ending Balance

30. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

30. NON-CONTROLLING INTEREST

	Aset Neto/Net Assets		Laba (Rugi) Komprehensif Neto/ Net Comprehensive Income (Loss)		
	31 Desember/ December 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	2019	2018	
PT TPS dan entitas anak	308.430.318	735.519.559	4.637.452	597.478.243	PT TPS and subsidiary
PT BJTI dan entitas anak	438.203.940	431.951.123	8.959.331	8.483.517	PT BJTI and subsidiaries
PT PHC dan entitas anak	3.283.767	3.504.646	273.097	179.928	PT PHC and subsidiary
PT PMS dan entitas anak	135.328.492	98.279.493	16.178.672	13.985.070	PT PMS and subsidiaries
PT TTL dan entitas anak	2.461.793	1.585.840	1.108.108	1.039.288	PT TTL and subsidiary
PT PDS dan entitas anak	7.060.394	5.237.306	1.881.546	1.284.083	PT PDS and subsidiary
Total	894.768.704	1.276.077.967	33.038.206	622.450.129	Total

31. PENDAPATAN OPERASI

31. OPERATING REVENUES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pelayanan terminal petikemas	5.729.237.606	6.026.392.640	Container services
Pelayanan jasa kapal	1.522.760.324	1.494.394.845	Vessel services
Pelayanan jasa terminal	1.031.189.286	837.081.110	Terminal services
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	467.490.896	598.533.246	Land, building, water and electricity services
Pelayanan jasa barang	116.356.962	503.651.814	Cargo services
Lain-lain	908.773.123	714.878.372	Others
Total	9.775.808.197	10.174.932.027	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

32. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan TPMG, APBS dan TMTL. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

32. CONSTRUCTION REVENUES AND EXPENSES

Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for construction of TPMG, APBS and TMTL. Construction revenue is measured using cost method, which all cost is directly attributable to the acquiring cost of the assets.

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pendapatan konstruksi TPMG, APBS dan TMTL	871.354.794	603.841.389	Construction revenues of TPMG, APBS and TMTL
Beban konstruksi TPMG, APBS dan TMTL	(871.354.794)	(597.016.991)	Construction expenses of TPMG, APBS and TMTL

33. BEBAN OPERASI

33. OPERATING EXPENSES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Umum	3.645.959.684	3.066.857.506	General
Kerja sama mitra usaha	1.572.143.409	1.921.118.838	Partnership
Penyusutan dan amortisasi	1.294.492.182	1.312.107.452	Depreciation and amortization
Pemeliharaan	404.370.792	362.146.501	Maintenance
Asuransi	93.376.203	187.352.678	Insurance
Administrasi kantor	24.281.934	30.006.966	Office administration
Total	7.034.624.204	6.879.589.941	Total

Beban umum terutama merupakan beban konsesi, beban jasa konsultan, imbalan kerja, perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan dan pemasaran.

General expenses mainly consist of concession fee, consultants, employee benefits, business traveling, education and training and marketing expenses.

Kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi seperti perusahaan-perusahaan operator fasilitas pelabuhan yang menyediakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan lift on dan lift off di pelabuhan serta beban pegawai non-organik.

The partnership expenses mainly represent the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners such as port facilities' management companies for stevedoring activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

34. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA - NETO

34. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Laba (rugi) selisih kurs - neto	506.718.618	(791.880.261)	Profit (loss) on foreign exchange - net
Lain-lain - neto	(26.042.042)	57.956.623	Others - net
Total	480.676.576	(733.923.638)	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

35. PENDAPATAN KEUANGAN

35. FINANCE INCOME

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pendapatan bunga deposito	120.490.881	94.357.416	<i>Interest income from deposits</i>
	16.850.634	35.828.952	<i>Interest income on loans</i>
Pendapatan bunga pinjaman			<i>Interest income on current account</i>
Pendapatan jasa giro	10.276.010	13.007.243	
Total	147.617.525	143.193.611	Total

36. BEBAN KEUANGAN

36. FINANCE COSTS

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Beban bunga dan amortisasi diskonto dan biaya transaksi	710.881.629	803.022.758	<i>Interest expenses and amortization of discount and transaction cost</i>
Beban administrasi	4.057.457	5.387.360	<i>Administration expenses</i>
Total	714.939.086	808.410.118	Total

37. BAGIAN LABA (RUGI) ENTITAS ASOSIASI

37. EQUITY IN INCOME (LOSS) OF ASSOCIATES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
PT BKMS	16.334.022	(8.628.619)	<i>PT BKMS</i>
PT TNU	(8.085.423)	(502.998)	<i>PT TNU</i>
PT JBT	(14.052.377)	(9.001.520)	<i>PT JBT</i>
PT TPI	381.273	(1.190.508)	<i>PT TPI</i>
PT Ambapers	10.675.552	9.596.516	<i>PT Ambapers</i>
PT EMS	9.327	7.909	<i>PT EMS</i>
PT Portek Indonesia	-	(21.257.229)	<i>PT Portek Indonesia</i>
PT LNG	(180.954)	-	<i>PT LNG</i>
Total	5.081.420	(30.976.449)	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**38. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING**

**38. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

		<u>31 Desember 2019/December 31, 2019</u>		
		<u>Dalam mata uang asing/ In foreign currencies (full amount)</u>	<u>Setara dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah</u>	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	USD	160.705.385	2.233.965.553	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	USD	-	-	Short-term investments
Piutang usaha	USD	979.741	13.619.381	Trade receivables
Total aset			2.247.584.934	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Surat berharga yang diterbitkan	USD	1.000.000.000	13.784.415.230	Securities issued
Beban akrual	USD	12.334.269	171.458.680	Accrued expenses
Utang bank	USD	17.498.375	243.927.559	Bank loans
Utang usaha	USD	8.783.672	122.101.824	Trade payables
Total liabilitas			14.321.903.293	Total liabilities
Liabilitas neto			12.074.318.359	Net liabilities
 <u>31 Desember 2018/December 31, 2018</u>				
		<u>Dalam mata uang asing/ In foreign currencies (full amount)</u>	<u>Setara dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah</u>	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	USD	201.553.744	2.918.699.767	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	USD	2.500.000	36.202.500	Short-term investments
Piutang usaha	USD	1.060.267	15.353.726	Trade receivables
Total aset			2.970.255.993	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Surat berharga yang diterbitkan	USD	989.179.155	14.324.303.344	Securities issued
Beban akrual	USD	101.405.894	1.468.458.751	Accrued expenses
Utang bank	USD	41.953.452	607.527.938	Bank loans
Utang usaha	USD	927.025	13.424.249	Trade payables
Total liabilitas			16.413.714.282	Total liabilities
Liabilitas neto			13.443.458.289	Net liabilities

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

39. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

39. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

	31 Desember 2019/ December 31, 2019		
	Nilai tercatat/ Carrying values	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	3.644.611.039	3.644.611.039	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	27.939.981	27.939.981	Short-term investments
Piutang usaha - Pihak ketiga	514.119.258	514.119.258	Trade receivables - Third parties
Piutang usaha - Pihak berelasi	308.955.522	308.955.522	Trade receivables - Related parties
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	40.777.347	40.777.347	Other receivables - Third parties
Piutang lain-lain - Pihak berelasi	269.897.865	269.897.865	Other receivables - Related parties
Pendapatan masih akan diterima	217.280.808	217.280.808	Accrued revenues
Total	5.023.581.820	5.023.581.820	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Surat berharga yang diterbitkan	13.469.505.780	13.784.415.230	Securities issued
Beban akrual	1.110.512.317	1.110.512.317	Accrued expenses
Utang usaha - Pihak ketiga	568.633.930	568.633.930	Trade payables - Third parties
Utang usaha - Pihak berelasi	61.714.668	61.714.668	Trade payables - Related parties
Utang lain - lain - Pihak ketiga	404.348.746	404.348.746	Other payables - Third parties
Utang lain - lain - Pihak berelasi	385.618.157	385.618.157	Other payables - Related parties
Utang bank	246.238.178	243.927.559	Bank loans
Liabilitas jangka pendek lainnya	115.092.216	115.092.216	Other current liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	1.723.576	1.723.576	Other non-current liabilities
Total	16.363.387.568	16.675.986.399	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**39. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

**39. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

	31 Desember 2018/ December 31, 2018		
	Nilai tercatat/ Carrying values	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	4.612.047.296	4.612.047.296	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	57.920.390	57.920.390	Short-term investments
Piutang usaha - Pihak ketiga	516.377.060	516.377.060	Trade receivables - Third parties
Piutang usaha - Pihak berelasi	340.360.505	340.360.505	Trade receivables - Related parties
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	36.236.852	36.236.852	Other receivables - Third parties
Piutang lain-lain - Pihak berelasi	262.531.359	262.531.359	Other receivables - Related parties
Pendapatan masih akan diterima	317.662.932	317.662.932	Accrued revenues
Total	6.143.136.394	6.143.136.394	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Surat berharga yang diterbitkan	13.469.505.780	14.329.612.957	Securities issued
Beban akrual	1.287.510.462	1.287.510.462	Accrued expenses
Utang usaha - Pihak ketiga	527.416.198	527.416.198	Trade payables - Third parties
Utang usaha - Pihak berelasi	79.144.186	79.144.186	Trade payables - Related parties
Utang lain - lain - Pihak ketiga	439.382.061	439.382.061	Other payables - Third parties
Utang lain - lain - Pihak berelasi	259.531.313	259.531.313	Other payables - Related parties
Utang bank	607.527.943	607.527.943	Bank loans
Liabilitas jangka pendek lainnya	81.715	81.715	Other current liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	1.702.002	1.702.002	Other non-current liabilities
Total	16.671.801.660	17.531.908.837	Total

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat, baik karena jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale.

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**39. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Kelompok Usaha menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang mencakup, antara lain, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan liabilitas jangka pendek lainnya, dianggap mendekati jumlah tercatatnya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.
- Nilai wajar aset keuangan tidak lancar lainnya dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.
- Estimasi nilai wajar surat berharga yang diterbitkan, utang bank dan liabilitas jangka panjang lainnya ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen dengan syarat, risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Selain item-item tersebut diatas, Perusahaan tidak memiliki aset atau kewajiban lain yang diukur atau diungkapkan berdasarkan nilai wajar, sehingga tidak ada keharusan untuk menyajikan hirarki nilai wajar berdasarkan PSAK 68 (Penyesuaian 2014): Pengukuran Nilai Wajar.

**39. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions:

- The fair value of current financial assets and current financial liabilities which includes, among others, cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, accrued revenues, trade payables, other payables, accrued expenses and other current liabilities, are considered to approximate their carrying amounts as a result of insignificant discount.
- The fair values of other non-current financial assets are carried at historical cost because their fair values cannot be reliably measured or their carrying amounts are not significantly different from their fair values. It is not practical to estimate the fair values of such assets because there are no fixed repayment terms although these are not expected to be settled within 12 months after the consolidated statement of financial position date.
- The estimated fair values of bonds payable, bank loans and other long-term liabilities are determined by discounting the future cash flows using market interest rates for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

Other than those items mentioned above, the Company does not have any assets or liabilities that are measured or disclosed based on fair value, therefore it is not considered necessary to present fair value hierarchy based on PSAK 68 (Amendment 2014): Fair Value Measurement.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kelompok Usaha terpengaruh terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga atas arus kas, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kelompok Usaha menerapkan manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Kelompok Usaha. Pengelolaan risiko tersebut memberikan keyakinan kepada Kelompok Usaha bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

Kelompok Usaha menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Kelompok Usaha. Eksposur Kelompok Usaha terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang obligasi dalam mata uang Dollar AS.

Pada tanggal 31 Desember 2019, jika nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing menurun/meningkat sebesar 1% dengan semua variabel konstan, pendapatan sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebesar Rp107.322.371 lebih rendah/tinggi, terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual, utang bank dan surat berharga yang diterbitkan dalam satuan mata uang asing.

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is exposed to foreign exchange risk, interest rate risk of cashflow, credit risk and liquidity risk. The Group applies risk management for such risks by evaluating the financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Group. Such risk management provides assurance to the Group that prudent financial activities are managed according to appropriate policies and procedures and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

The Group applies policies for managing each of these risks which is summarized below.

Foreign currency risk

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Group. Exposure of the Group against exchange rate fluctuations is mainly derived from debt arising from bonds payable denominated in US Dollar.

As of December 31, 2019 had the exchange rate of the Rupiah against the foreign currency depreciated/appreciated by 1% with all other variables held constant, income before tax for the year then ended would have been Rp107,322,371 lower/higher, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivable, short-term bank loans, trade payables, accrued expenses, bank loans, securities issued denominated in foreign currency.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko suku bunga atas arus kas

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko di mana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset dan liabilitas Kelompok Usaha yang terekspos terhadap risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2019.

	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate		Jumlah/ Total	
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year		
Aset						Assets
Kas dan setara kas	3.644.611.039	-	-	-	3.644.611.039	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	-	-	27.939.981	-	27.939.981	Short-term investments
Liabilitas						Liabilities
Utang bank	-	-	162.163.278	81.764.281	243.927.559	Bank loans
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	-	-	Finance lease liability
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	13.784.415.230	13.784.415.230	Securities issued
Total	3.644.611.039	-	190.103.259	13.866.179.511	17.700.893.809	Total

Analisis sensitivitas untuk tingkat bunga

Jika tingkat suku bunga lebih rendah/lebih tinggi 1% dan seluruh variabel lain tidak berubah, maka laba sebelum pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp143.885.469 terutama akibat surat berharga yang diterbitkan dan utang bank dalam mata uang asing.

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Cash flows interest rate risk

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Loans at variable rates are exposed to cash flows risk.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk are to evaluate by periodically comparing fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. Management also conducts a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rates.

The following table presents the carrying amount by maturity of the Group's assets and liabilities exposed to interest rate risk as of December 31, 2019.

Sensitivity analysis for interest rate

Had the interest rate been 1% lower/higher, with all other variables constant, income before corporate income tax for the year ended December 31, 2019 would have been Rp143,885,469 higher/lower, mainly as a result of securities issued and bank loans denominated in foreign currency.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Kelompok Usaha akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Kelompok Usaha mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Kelompok Usaha dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

Kelompok Usaha memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset lain-lain.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Aset keuangan		
Kas dan setara kas	3.644.611.039	4.612.047.296
Piutang usaha - neto	823.074.780	856.737.565
Piutang lain-lain - neto	310.675.212	298.768.211
Pendapatan masih akan diterima	217.280.808	317.662.932
Investasi jangka pendek	27.939.981	57.920.390
Total	5.023.581.820	6.143.136.394

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Credit risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there is no significant concentration of credit risk.

The Group manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage in credit trades with the Group and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.

The Group is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, short-term investments, trade and other receivables, accrued revenues and other assets.

Credit risk exposure relating to assets in the consolidated statements of financial position is as follows:

Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables - net
Other receivables - net
Accrued revenues
Short-term investments
Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi di mana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Mengingat bahwa kebutuhan dana Kelompok Usaha saat ini cukup signifikan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Kelompok Usaha terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Kelompok Usaha.

Selain itu, Kelompok Usaha juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas pasar modal dan ekuitas utang.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Kelompok Usaha berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Liquidity risk

Liquidity risk is a risk that occurs when short-term revenue cannot cover short-term expenditure.

Given that funding requirements of the Group are currently significant as a result of increased activity in development or expansion of business, in managing liquidity risk, the Group continues to monitor and maintain levels of adequacy of cash and cash equivalents to finance the operational needs of the Group.

In addition, the Group also regularly evaluates cash flow projections and actual cash to cope with the impact of fluctuations in cash flow, including the maturity schedule of long-term liabilities and continues to examine the condition of financial markets for placement and fund-raising initiatives, including bank loans, issuance of equity and debt securities.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments.

	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate		Jumlah/ Total	
	< 1 tahun/ < 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-3 tahun/ 2-3 years	> 3 tahun/ > 3 years		
Utang usaha	630.348.598	-	-	-	630.348.598	Trade payables
Utang lain-lain	789.966.903	-	-	-	789.966.903	Other payables
Beban akrual	1.110.512.317	-	-	-	1.110.512.317	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	115.092.216	-	-	-	115.092.216	Other short-term liabilities
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	13.784.415.230	13.784.415.230	Securities issued
Utang bank	162.163.278	-	-	81.764.281	243.927.559	Bank loans
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	1.723.576	-	-	1.723.576	Other non-current liabilities
Total	2.808.083.312	1.723.576	-	13.866.179.511	16.675.986.399	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING

Perusahaan

a) Perjanjian Konsesi

1) Perjanjian Konsesi APBS

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS") No. HK.107/01/05/OP.TPr-14 dan No. HK. 0501/175/P.III-2014 (Perjanjian Konsesi APBS) dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 2014. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan memperoleh hak untuk melakukan kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perusahaan diharuskan untuk membiayai, merencanakan/merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara APBS termasuk pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran, serta melaksanakan pemungutan jasa alur APBS.
- Perjanjian Konsesi tidak dapat dialihkan ke pihak lain dan berlaku selama 25 tahun, yang terdiri dari masa pra-konstruksi selambat-lambatnya selama 12 bulan kalender, masa konstruksi selambat-lambatnya selama 12 bulan kalender, dan masa operasi selama 23 tahun terhitung sejak masa pemungutan pertama jasa penggunaan alur pelayaran hingga sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Konsesi APBS.

41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Company

a) Concession Agreement

1) APBS Concession Agreement

The Company entered into an agreement on the provision of Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS") utilization services No. HK.107/01/05/OP.TPr-14 and No. HK.0501/175/P.III-2014 (APBS Concession Agreement) with the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia on May 8, 2014. Based on this agreement, the Company obtained the right to provide the APBS utilization services with the following conditions:

- *The Company is required to finance, plan/design, build, operate, and maintain the APBS including the installation of shipping navigation facilities, as well as collecting APBS service fee.*
- *The Concession Agreement is not transferrable to another party and is valid for 25 years, consisting of the pre-construction period no later than 12 calendar months, the construction period of no later than 12 calendar months, and the operating period for 23 years from the first collection period until the end of the APBS Concession Agreement.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

a) Perjanjian Konsesi (lanjutan)

1) Perjanjian Konsesi APBS (lanjutan)

- Perusahaan wajib membayar pendapatan konsesi sebesar 3,5% dari pendapatan kotor pengoperasian APBS kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setiap bulan selambat-lambatnya 15 hari pada bulan berikutnya.
- Perusahaan wajib mengembalikan aset pengoperasian APBS yang berupa *capital dredging* kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setelah berakhirnya Perjanjian Konsesi.
- Atas kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS, Perusahaan berhak untuk memungut tarif jasa penggunaan APBS berdasarkan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tarif tersebut berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 tahun.

Berdasarkan Surat dari Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya No. PP.204/01/17/OP.TPr-15 tanggal 5 November 2015, alur baru APBS dinyatakan siap beroperasi. Pemungutan tarif jasa pengguna APBS dilakukan 2 hari setelah sosialisasi kepada para pengguna APBS.

**41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

a) Concession Agreement (continued)

1) APBS Concession Agreement (continued)

- The Company is required to pay concession revenue amounting to 3.5% of the APBS operation's gross revenue to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia every month, no later than 15 days in the following month.
- The Company is required to return the APBS operating assets in form of capital dredging to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia as the Concession Agreement ends.
- For the APBS utilization services provision, the Company has the right to collect the APBS utilization service fee based on the mechanism required by the Law. The tariff is valid for at least 2 years.

Based on the Letter from Tanjung Perak Main Port Authority Office No. PP.204/01/17/OP.TPr-15 dated November 5, 2015, the new APBS channel was declared ready to operate. The collection of APBS service fee was carried out 2 days after the socialization to APBS users.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

a) Perjanjian Konsesi (lanjutan)

2) Perjanjian Konsesi TTL

Perusahaan mengadakan perjanjian penyediaan dan pelayaran perusahaan jasa kepelabuhanan di TMTL No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 dan No. HK.0501/95/P.III-2015 (Perjanjian Konsesi TTL) dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 2015. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan memperoleh hak perusahaan TMTL untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, kegiatan pemeliharaan, dan kegiatan pengoperasian dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perjanjian Konsesi tidak dapat dialihkan ke pihak lain dan berlaku selama 72 tahun sejak diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. PP.001/3/20/DPPL-14 perihal Uji Coba Operasional di Terminal Teluk Lamong pada tanggal 11 November 2014.
- Perusahaan wajib membayar pendapatan konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan kotor pelaksanaan kegiatan perusahaan TMTL kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setiap 3 bulan selambat-lambatnya 15 hari pada bulan pertama per triwulannya.
- Perusahaan wajib melaporkan laporan kinerja operasional dan laporan pendapatan konsesi TMTL kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setiap bulan dan setiap tahun, dengan laporan tahunan diaudit oleh auditor independen.
- Perusahaan wajib mengembalikan aset konsesi TMTL yang berupa dermaga kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setelah berakhirnya Perjanjian Konsesi.

**41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

a) Concession Agreement (continued)

2) TTL Concession Agreement

The Company entered into an agreement on the provision of port services in TMTL No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 and No. HK.0501/95/P.III-2015 (TTL Concession Agreement) with the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia on May 19, 2015. Based on this agreement, the Company obtained the TMTL utilization rights for the construction and the development of port facilities, maintenance activities, and the operational activities with the following conditions:

- The Concession Agreement is not transferrable to another party and is valid for 72 years since the issuance of the General Director of Sea Transportation's Letter No. PP.001/3/20/DPPL-14 concerning the Operational Trials at Teluk Lamong Terminal on November 11, 2014.
- The Company is required to pay concession revenue amounting to 2.5% of the TMTL's utilization service provision activities' gross revenue to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia every 3 months, no later than 15 days in the first month of each quarter.
- The Company is required to report TMTL's operational performance and concession revenue to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia monthly and annually, with the annual report audited by an independent auditor.
- The Company is required to return TMTL's concession assets in the form of port to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia as the Concession Agreement ends.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

a) Perjanjian Konsesi (lanjutan)

2) Perjanjian Konsesi TTL (lanjutan)

- Perusahaan berhak melakukan kerja sama dengan pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan konsesi TMTL dengan pemberitahuan tertulis kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Perusahaan berhak untuk menetapkan tarif awal jasa kepelabuhanan, melakukan penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan, serta mengenakan dan memungut tarif jasa kepelabuhanan.

3) Perjanjian Konsesi di Pelabuhan yang diusahakan oleh Perusahaan

Perusahaan mengadakan perjanjian kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan yang diusahakan No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 dan No. HK.0501/95/P.III-2015 dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak pada tanggal 9 November 2015. Perjanjian ini telah diubah dengan Perjanjian Tambahan (*Addendum*) atas Perjanjian Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan No. HK.107/01/12/OP.Tpr-216 dan No. HK.0502/437/P.III-2016 tanggal 14 Oktober 2016. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan memperoleh hak pengusahaan di area yang terdapat terminal dan fasilitas pelabuhan milik Perusahaan yang telah diusahakan untuk kegiatan jasa kepelabuhanan dengan ketentuan di antaranya sebagai berikut:

41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company (continued)

a) Concession Agreement (continued)

2) TTL Concession Agreement (continued)

- The Company has the right to cooperate with other competent parties to carry out TMTL's concession activities with written notification to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.
- The Company has the right to determine the initial rates of port services first rate of, make amendments to the port services rate, and apply and collect the port services rate payment.

3) Concession Agreement in the port operated by the Company

The Company entered into an agreement on the port services provision in the Commercial Ports No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 and No. HK.0501/95/P.III-2015 with Tanjung Perak Main Port Authority Office on November 9, 2015. This agreement was updated with the Additional Agreement (*Addendum*) on the Port Services Provision Agreement in the Ports No. HK.107/01/12/OP.Tpr-216 and No. HK.0502/437/P.III-2016 dated October 14, 2016. Based on this agreement, the Company obtained the rights to commercially utilize the locations where the Company's terminals and port facilities are located and operated with the following conditions:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

a) Perjanjian Konsesi (lanjutan)

**3) Perjanjian Konsesi di Pelabuhan yang
diusahakan oleh Perusahaan (lanjutan)**

- Perjanjian Konsesi berlaku selama 30 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Konsesi dan diperpanjang selama area konsesi masih diusahakan Perusahaan sesuai peraturan yang berlaku.
- Perusahaan wajib membayar pendapatan konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan kotor pelaksanaan kegiatan pengusahaan di area konsesi setiap 3 bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan pertama per triwulannya.
- Perusahaan wajib melaksanakan audit laporan keuangan tahunan secara menyeluruh dengan auditor independen yang ditunjuk oleh Perusahaan.
- Berdasarkan Perjanjian Konsesi, Perusahaan berhak di antaranya menetapkan dan memungut tarif pelayanan jasa di area konsesi serta melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- Lahan dan aset di dalam area konsesi yang telah berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tercatat sebagai aset Perusahaan, tetap sebagai hak pengelolaan dan/atau aset Perusahaan.
- Apabila Perusahaan telah melakukan kerja sama operasi dengan mitra kerja sama sebelum Perjanjian Konsesi ditandatangani, maka perjanjian tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. Kegiatan pengusahaan dari perjanjian kerja sama tersebut diperhitungkan sebagai komponen pendapatan konsesi dengan mekanisme yang disepakati dan diatur sendiri antara Perusahaan dan mitra kerja sama.

**41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

a) Concession Agreement (continued)

**3) Concession Agreement in the port
operated by the Company (continued)**

- The Concession Agreement is valid for 30 years since the signing of the Concession Agreement and is extended as long as the concession areas are still operated by the Company in accordance with the applicable regulations.
- The Company is required to pay concession revenue amounting to 2.5% of the commercial port utilization activities' gross revenue obtained from the concession area every 3 months, no later than the 15th of the first month of each quarter.
- The Company is required to carry out annual financial statement audits with independent auditors appointed by the Company.
- Based on the Concession Agreement, the Company has the right to determine and collect the service fee in the concession area and to cooperate with other parties.
- The land and assets within the concession area whose utilization rights and/or ownerships are under the Company's name remain as the Company's utilization rights and/or assets.
- If the Company had entered into cooperation agreements before the Concession Agreement was signed, the cooperation agreements are still valid until their expiration date. The cooperation agreements' commercial activities are to be included as concession revenue components with mechanisms agreed and regulated by the Company and the cooperation partners.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

a) Perjanjian Konsesi (lanjutan)

- 4) Berdasarkan Perjanjian Konsesi No.02.00/SPKS/BMS-KSOP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, BMS dan Kantor Kesyahbandaran dan Otorisasi Pelabuhan Kelas II Gresik mengikatkan diri dalam perjanjian konsesi tentang kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan terminal manyar di pelabuhan Gresik dengan jangka waktu selama 76 tahun terhitung dari sejak tanggal ditandatangani perjanjian. Pendapatan konsesi pada area konsesi Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik sebesar 2,75% dari pendapatan kotor pelaksanaan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan di area konsesi.
- 5) Pada tanggal laporan keuangan, Perusahaan sedang dalam proses pengajuan permohonan hak konsesi atas Terminal Gilimas Pelabuhan Lembar. Perusahaan memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang Rencana Kegiatan Pengembangan TPGML berdasarkan keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 503/02-V/03/IPR/BKPM&PT/2016 tanggal 11 Mei 2016. Berdasarkan Laporan Hasil Reviu BPKP, No.LR860/PW13/2/2017 tanggal 2 November 2017, jangka waktu konsesi diusulkan selama 59 tahun.

**41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

a) Concession Agreement (continued)

- 4) *Based on the Concession Agreement No. 02.00/SPKS/BMS-KSOP/XII/2017 dated December 15, 2017, BMS and the Class II of Gresik Port Authority and Authority Office bind themselves in a concession agreement concerning the activities of port terminal services in the port of Gresik for a period of 76 years from the date of the signing of the agreement. The concession revenue of Terminal Manyar in Gresik Port is 2.75% of the gross revenue of port service operations in the concession area.*
- 5) *As at the date of the financial report, the Company is still in the process of requesting the concession rights for Terminal Gilimas in Lembar Port. The Company obtained an Utilization Permit for Development Activity Plan TPGML based on the decision of the West Nusa Tenggara Investment Coordinating Board for Integrated Investment and Licensing Agency No. 503/02-V/03/IPR/BKPM&PT/2016 dated May 11, 2016. Based on BPKP Report of Review No. LR860/PW13/2/2017 dated November 2, 2017, the concession period was proposed for 59 years.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

b) Kontrak Pembelian

- 1) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.16/HK.0502/P.III/2018 tanggal 5 Februari 2018 dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk pekerjaan desain dan pembangunan aksesibilitas darat (*flyover* dan *tapper*) di Terminal Teluk Lamong sebesar Rp1.309.892.657. Pada tanggal 31 Desember 2019 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 83,90%.
- 2) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.113/HK.0502/P.III-2018 tanggal 10 April 2018 dengan PT Nindya Karya (Persero) untuk pekerjaan pembangunan lanjutan *Container Yard* Terminal Teluk Lamong sebesar Rp399.950.000. Pada tanggal 31 Desember 2019 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 88,17%.
- 3) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.44/HK.0502/P.III-2018 tanggal 21 Februari 2018 dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk pekerjaan pembangunan kantor *Tower Pelindo*. Namun pada tanggal 11 Desember 2018, Perusahaan dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) No. SP2.430.1/HK.0502/P.III-2018 dimana mengatur perubahan diantaranya mengenai nilai kontrak yang semula sebesar Rp466.965.400 menjadi Rp467.094.180. Pada tanggal 31 Desember 2019 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 80%.

**41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

b) Purchase Contract

- 1) The Company entered into contract No. SP2.16/HK.0502/P.III/2018 dated February 5, 2018 with PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for the design and construction for land accessibility work (*flyover* and *tapper*) at Terminal Teluk Lamong amounting to Rp1,309,892,657. As of December 31, 2019 the work progress has reached 83.90% completion rate.
- 2) The Company entered into contract No. SP2.113/HK.0502/P.III-2018 dated April 10, 2018 with PT Nindya Karya (Persero) for the construction of *Container Yard* holdings in Terminal Teluk Lamong amounting to Rp399,950,000. As of December 31, 2019 the work progress has reached 88.17% completion rate.
- 3) The Company entered into contract No. SP2.44/HK.0502/P.III-2018 dated February 21, 2018 with PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the construction of *Pelindo Office Tower*. However on December 11, 2018, the Company and PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk agreed to make *Additional Agreement (Addendum)* No. SP2.430.1/HK.0502/P.III-2018 which changed among others about the value of agreement which was amounting to Rp466,965,400 into Rp467,094,180. As of December 31, 2019 the work progress has reached 80% completion rate.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

b) Kontrak Pembelian (lanjutan)

- 4) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.42/HK.0502/P.III-2018 tanggal 21 Februari 2018 yang terakhir telah diperbarui dengan *Addendum* I No. SP2.333.1/HK.0502/P.III-2018 tanggal 3 September 2018 dengan PT Van Oord Indonesia untuk pekerjaan pengerukan kolam dan alur pelayaran Pelabuhan Cabang Benoa sebesar Rp541.219.237. Pada tanggal 31 Desember 2019 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 98,44%.
- 5) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.249.1/HK.0502/P.III-2018 tanggal 27 Juli 2018 dengan PT Wijaya Karya (Persero) untuk pekerjaan design dan konstruksi pengembangan terminal Kalibaru pelabuhan Tanjung Emas sebesar Rp524.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2019 progres pekerjaan tersebut belum dimulai.
- 6) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.131/HK.0502/P.III-2018 tanggal 26 April 2018 dengan PT Hutama Karya (Persero) untuk pekerjaan design dan pembangunan perkuatan dermaga Samudera pelabuhan Tanjung Emas. Namun pada tanggal 29 April 2019, Perusahaan dan PT Hutama Karya (Persero) sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) No. SP2.88.1/HK.0502/P.III-2019 dimana mengatur perubahan diantaranya mengenai nilai kontrak yang semula sebesar Rp297.990.000 menjadi Rp259.379.017. Pada tanggal 31 Desember 2019 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 48,06%.

**41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

b) Purchase Contract (continued)

- 4) The Company entered into contract No. SP2.42/HK.0502/P.III-2018 dated February 21, 2018 which was last updated with *Addendum* I No. SP2.333.1/HK.0502/P.III-2018 dated September 3, 2018 with PT Van Oord Indonesia for dredging of basin and shipping track in Benoa Port amounting to Rp541,219,237. As of December 31, 2019 the work progress has reached 98.44% completion rate.
- 5) The Company entered into contract No. SP2.249.1/HK.0502/P.III-2018 dated July 27, 2018 with PT Wijaya Karya (Persero) for design and construction of expansion of Kalibaru terminal of Tanjung Emas port amounting to Rp524,000,000. As of December 31, 2019 the work progress has not yet to begin.
- 6) The Company entered into contract No. SP2.131/HK.0502/P.III-2018 dated April 26, 2018 with PT Hutama Karya (Persero) for the design of and building reinforcement of Samudera dock at Tanjung Emas port. However on April 29, 2019, the Company and PT Hutama Karya (Persero) agreed to make *Additional Agreement (Addendum)* No. SP2.88.1/HK.0502/P.III-2019 which changed among others about the value of agreement which was amounting to Rp297,990,000 into Rp259,379,017. As of December 31, 2019 the work progress has reached 48.06% completion rate.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

b) Kontrak Pembelian (lanjutan)

- 7) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.43/HK.0502/P.III-2018 tanggal 21 Februari 2018 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) untuk pekerjaan design dan pembangunan dermaga *cruise* dan petikemas terminal Gilimas pelabuhan cabang Lembar. Perjanjian ini telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan addendum No. SP2.47.1/HK.0502/P.III-2019 dengan nilai perjanjian sebesar Rp288.871.116. Pada tanggal 31 Desember 2019 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 98,62%.
- 8) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.192/HK.0502/P.III-2019 tanggal 30 Juli 2019 dengan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk pekerjaan *design* dan pembangunan perkerasan lapangan penumpukan ex. Semen Tonasa pelabuhan cabang Banjarmasin sebesar Rp149.325.000. Pada tanggal 31 Desember 2019 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 30,12%.

c) Informasi Penting Lainnya

- 1) Berkaitan dengan penggunaan tanah HPL milik Perusahaan untuk pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa oleh PT JBT (Entitas Asosiasi), Tim Pengadaan Tanah Ruas jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (TPT) menyampaikan surat ke Kasubdit Pengadaan Tanah Departemen Pekerjaan Umum mengenai hal pendataan sebagai berikut:

Pemilik/ <i>Landowners</i>	Luas/ <i>Land area</i>	NJOP	Appraisal	Keterangan/ <i>Information</i>
Perusahaan (darat/ <i>land</i>)	522 m2/sqm	1.227.744.000	2.589.120.000	-
Perusahaan (perairan/ <i>waters</i>)	41.490 m2/sqm	-	-	Dalam proses P2T/ In the process P2T

Sampai dengan tanggal Laporan ini, keputusan uang ganti rugi terhadap HPL milik Perusahaan tersebut masih dalam proses menunggu arahan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

b) Purchase Contract (continued)

- 7) The Company entered into contract No. SP2.43/HK.0502/P.III-2018 dated February 21, 2018 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) for the design of and building cruise dock and Gilimas container terminal at port of Lembar region. This agreement has been amended several times, most recently based on addendum No. SP2.47.1/HK.0502/P.III-2019 with the value of agreement amounting to Rp288,871,116. As of December 31, 2019 the work progress has reached 98.62% completion rate.
- 8) The Company entered into contract No. SP2.192/HK.0502/P.III-2019 dated July 30, 2019 with PT Brantas Abipraya (Persero) for the design of and building stacking yard pavement ex. Semen Tonasa port of Banjarmasin region amounting to Rp149,325,000. As of December 31, 2019 the work progress has reached 30.12% completion rate.

c) Other Important Information

- 1) In connection with the Company's use of HPL land right for the construction of Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa highways by PT JBT (Associate), Land Acquisition Team toll road section Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (TPT) delivered a letter to the Head of Sub Directorate Land Acquisition Department of Public Works regarding the data collection as follows:

As of the date of this Report, the decision of compensation for the HPL of the Company is still in the process of awaiting direction from the Directorate General of Highways Ministry of Public Works and Public Housing.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

c) Informasi Penting Lainnya (lanjutan)

- 2) Pengakhiran kerjasama pengoperasian PT TPS

P&O Dover (*Holdings*) Ltd dan Perusahaan telah menyepakati proses pengakhiran kerjasama pengoperasian PT TPS, yang hasilnya telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan. Poin penting yang disepakati adalah bahwa pada tanggal 28 April 2019 telah dilakukan pengambil alihan saham P&O Dover (*Holdings*) Ltd oleh Perusahaan. Perusahaan sudah mendapat Persetujuan Menteri Negara BUMN dan telah menyepakati Perjanjian Jual Beli Bersyarat dan Perjanjian Penyelesaian dengan P&O Dover (*Holdings*) Ltd.

- 3) HPL Perusahaan seluas 12,8 hektar di Pelabuhan Cabang Tanjung Emas Semarang juga dicatat sebagai aset PT Pertamina UPPDN IV Semarang. Sampai tanggal laporan keuangan, belum ada penyelesaian atas penguasaan HPL yang tumpang tindih ini.

- 4) Pengangkatan kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera

Perusahaan menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya No. HK.207/01/15/SYB. TOR-16 pada tanggal 4 Februari 2016 tentang penugasan penyingkiran kerangka Kapal KMP Wihan Sejahtera dan Muatannya.

Perusahaan telah menyingkirkan kerangka KMP Wihan Sejahtera, atas penugasan tersebut Perusahaan membukukan biaya sebesar Rp58.678.059 dan berharap biaya tersebut dapat dikompensasikan dengan konsesi yang diterima oleh Perusahaan sehingga proses kompensasi dapat dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak.

**41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

c) Other Important Information (continued)

- 2) Termination of the cooperation on PT TPS operation

P&O Dover (*Holdings*) Ltd and the Company have agreed to terminate the cooperation on PT TPS operation, which agreement has been supported by the Company's Board of Commissioners. The important points on this termination process include the transfer of PT TPS' shares from P&O Dover (*Holdings*) Ltd on April 28, 2019. The Company has obtained the approval from the Minister of State-Owned Enterprises (MSOE) and have agreed on the Settlement Agreement and Conditional Agreement of Sales and Purchase of Share by the Company and P&O Dover (*Holdings*) Ltd.

- 3) The Company's 12.8 hectares HPL in Semarang's Tanjung Emas Branch Port are also recorded as PT Pertamina UPPDN IV's asset. Until the date financial statements authorization date, this overlapping HPL haven't been resolved.

- 4) Removal of KMP Wihan Sejahtera ship wreckage

The Company received a Decision letter of the head of Harbourmaster Main Office Tanjung Perak Surabaya No. HK.207/01/15/SYB. TOR-16 dated February 4, 2016 regarding the assignment to remove the ship frame and the cargo of KMP Wihan Sejahtera.

The Company had removed ship frame of KMP Wihan Sejahtera, upon the assignment the Company incurred costs amounting to Rp58,678,059 and expected that the costs can be compensated with the concession received by the Company. Therefore, the compensation process can be executed by the Authority of Main Port of Tanjung Perak.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

c) Informasi Penting Lainnya (lanjutan)

- 4) Pengangkatan kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera (lanjutan)

Tagihan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak sebesar Rp49.445.203 dicatat sebagai piutang lain-lain jangka panjang.

Atas tagihan tersebut, Perusahaan telah mencadangkan seluruhnya per 31 Desember 2019.

- 5) Penggunaan tanah HPL oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Perusahaan menyerahkan penggunaan bagian tanah HPL pelabuhan Cabang Gresik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) dengan perjanjian No PGSK.30/662/1982 tanggal 11 Desember 1982 dengan luas wilayah sebesar 179.450m² berlaku mulai tanggal 1 April 1981 sampai dengan tanggal 31 Maret 1996. Sementara itu, Perusahaan memperoleh hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur pada tanggal 22 November 1993 dengan hasil luas 280.287m² untuk penggunaan tanah pelabuhan dengan perjanjian No PGSK.30/662/1982. terdapat selisih sebesar 100.837m² dikarenakan adanya perairan yang telah berubah menjadi daratan.

Perusahaan mengadakan rapat dengan PT PLN PJB II pada tanggal 26 Februari 2015 dan disepakati bahwa Perusahaan dan PT PLN PJB II akan menelaah biaya kompensasi reklamasi untuk lahan seluas 280.287m² terhitung sejak 1996 sampai Desember 2015 dan PT PLN PJB II masih berpedoman pada UU No 30 Tahun 2009 Pasal 30 penggunaan tanah untuk penyediaan tenaga listrik menggunakan ganti rugi atau kompensasi.

41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company (continued)

c) Other Important Information (continued)

- 4) Removal of KMP Wihan Sejahtera ship wreckage (continued)

Receivables to the head of Harbourmaster Main Office Tanjung Perak amounting to Rp49,445,203 was recorded as part of other long-term receivables.

For the claim, the Company has reserved all of the amount outstanding as of December 31, 2019.

- 5) HPL utilization by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

The Company handed over the utilization of HPL on branch port of Gresik to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) with agreement No PGSK.30/662/1982 dated December 11, 1982 with an area of 179,450m² effective from April 1, 1981 until March 31, 1996. Meanwhile, The Company obtained the result of measurement from the National Land Agency region of East Java on November 22, 1993 with the results of 280.287m² for the right to use a part of the land in Port with Agreement no PGSK.30/662/1982. There is a difference amounting to 100.837m² due to changes of sea area which have become land.

The Company held a meeting with PT PLN PJB II dated February 26, 2015 and agreed that the Company and PT PLN PJB II will examine the cost of compensation for reclamation for land covering 280,287m² counted since 1996 to December 2015 and PT PLN PJB II was still referring to Law no 30 Year 2009 article 30 that the use of the land for the provision of electric power using the indemnity or compensation.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

c) Informasi Penting Lainnya (lanjutan)

- 5) Penggunaan tanah HPL oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (lanjutan)

Perusahaan mengirimkan surat kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 29 Januari 2018 untuk permohonan mediasi terhadap permasalahan penggunaan tanah HPL oleh perusahaan BUMN di lingkungan Perusahaan.

Perusahaan telah menerima hasil opini dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya No. 05/BO-ARB/BANI-SBY/VII/2019 tanggal 27 September 2019 yang berisikan bahwa Perusahaan berkewajiban mengembalikan atau melepaskan HPL No. 8 untuk diproses lebih lanjut oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN). Oleh karenanya, Perusahaan telah mencadangkan tagihan yang sudah dibukukan sebelumnya sebesar Rp68.136.847 per 31 Desember 2019.

Entitas anak

TTL

- 1) Perjanjian Kerjasama

Pada tanggal 23 Desember 2014, PT TTL membuat perjanjian kerjasama dengan PT Nusa Prima Logistik (NPL) terkait pelayanan pada terminal curah kering berupa pembangunan, pengoperasian dan pengadaan gudang transit komoditi curah kering. Periode perjanjian adalah 30 tahun sejak terminal curah kering tersebut beroperasi dan dapat diperpanjang kembali dengan syarat dan ketentuan yang disepakati para pihak. TTL telah mendapatkan izin pengoperasian terminal curah kering pada tanggal 28 Desember 2018 dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, sehingga periode perjanjian efektif dimulai tanggal 1 Januari 2019.

41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company (continued)

c) Other Important Information (continued)

- 5) HPL utilization by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (continued)

The Company sent a letter to the Audit Board of the Republic Indonesia dated January 29, 2018 requesting for mediation against the issues of using the HPL land by another State-owned enterprises on the Company area.

The company has received the opinion results from the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Surabaya Representative No. 05 / BO-ARB / BANI-SBY / VII / 2019 dated September 27, 2019 which contains that the Company is obliged to return or release HPL No. 8 for further processing by the National Defense Agency (BPN). Therefore, the Company has made a provision for a previously recorded receivables amounting to Rp.68,136,847 as of December 31, 2019.

Subsidiary

TTL

- 1) Partnership Agreement

On December 23, 2014, PT TTL entered into a cooperation agreement with PT Nusa Prima Logistik (NPL) related to the dry bulk terminal services such as construction, operation and procurements of dry bulk commodities transit warehouse. The agreement period is 30 years from dry bulk terminal commenced its commercial operations and could be extended with terms and conditions which were agreed by all parties. PT TTL has received the permit for operating the dry bulk terminal on December 28, 2018 from Director General of Sea Transportation, therefore the effective agreement period starts on January 1, 2019.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM

Perusahaan

- a) Perusahaan menggugat PT Timur Nusantara dengan No. Perkara 196/Pdt.G/2009/PN.Sby.

Pada tanggal 18 Desember 2002, Perusahaan dan PT Timur Nusantara menandatangani perjanjian kerjasama No. HK 0501/36/P/III-2002 tentang pengelolaan fasilitas terminal petikemas di Pelabuhan Tanjung Wangi, yang seluruh asetnya merupakan aset milik Perusahaan, untuk jangka waktu yang berakhir pada 18 Januari 2004. Namun, setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, PT Timur Nusantara tidak mengembalikan dan tetap menguasai objek perjanjian tersebut. Perusahaan telah menyampaikan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada PT Timur Nusantara untuk meninggalkan dan mengembalikan objek tersebut.

Pada 20 Maret 2009, Perusahaan menggugat PT Timur Nusantara melalui Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengembalikan objek perjanjian tersebut dan membayar ganti rugi sebesar Rp1.855.286. Perusahaan memenangkan gugatan ini.

Putusan serupa juga dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Mahkamah Agung RI sesuai relas putusan Mahkamah Agung RI No. 716K/Pdt/2011, Jo No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 24 Oktober 2012, yang memenangkan Perusahaan dan menolak permohonan kasasi dari PT Timur Nusantara. Atas putusan Mahkamah Agung tersebut Perusahaan telah melakukan pemberitahuan kepada PT Timur Nusantara dan Perusahaan berpotensi memperoleh keuntungan berupa pengembalian aset dan potensi memperoleh pendapatan serta pembayaran ganti rugi sebesar Rp1.855.286 dari PT Timur Nusantara.

Perusahaan telah mengirim surat ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta penjelasan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut telah dikirimkan kepada PT Timur Nusantara atau Kuasa Hukumnya sesuai surat Direksi No. HK.10/01/P.III-2014 tanggal 13 Januari 2014 dan surat No. HK.01/06/P.III-2014 tanggal 18 Februari 2014.

42. LAWSUIT

The Company

- a) *The Company filed a lawsuit against PT Timur Nusantara with Case No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby.*

On December 18, 2002, the Company and PT Timur Nusantara signed a cooperation agreement No. HK 0501/36/P/III-2002 concerning the management of container terminal facilities at the Port of Tanjung Wangi, whose assets are all owned by the Company, for a period ending on January 18, 2004. However, after the expiration of the agreement, PT Timur Nusantara retained the control and didn't return the object of the agreement. The Company had submitted legal warning letters for three times reminding PT Timur Nusantara to leave and return the object.

On March 20, 2009, the Company filed a lawsuit against PT Timur Nusantara through Surabaya District Court to return the agreement object and pay a compensation amounting to Rp1,855,286. The Company won this lawsuit.

A similar verdict was handed down by High Court Judge in East Java and the Indonesian Supreme Court through the decision statement No. 716K/Pdt/2011, Jo No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby dated October 24, 2012, which declared that the Company won and rejected the request for a cassation from PT Timur Nusantara. With regards to the Supreme Court's decision, the Company made a notification to PT Timur Nusantara and the Company had potential gain in the form of the returned asset and compensation amounting to Rp1,855,286 from PT Timur Nusantara.

The Company had sent a letter to the Surabaya District Court to clarify that the Supreme Court Cassation Decision had been sent to PT Timur Nusantara or the corresponding legal counsel in accordance with the Board of Directors' letter No. HK.10/01/P.III-2014 dated January 13, 2014 and letter No.HK.01/06/P.III-2014 dated February 18, 2014.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- a) Perusahaan menggugat PT Timur Nusantara dengan No. Perkara 196/Pdt.G/2009/PN.Sby. (lanjutan)

Perusahaan telah memberikan peringatan melalui Pengadilan Negeri Surabaya, tetapi PT Timur Nusantara tetap menolak untuk melaksanakan putusan. Karenanya Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi (sebagai delegasi dari Pengadilan Negeri Surabaya di wilayah tempat objek eksekusi) menerbitkan Penetapan No. 06/PEN.Eks/2018/PN.Sby Jo. No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 5 Oktober 2018 yang berisikan perintah untuk melakukan sita eksekusi atas objek sengketa berupa 1 unit *Reach Stacker* milik PT Timur Nusantara.

Atas Penetapan tersebut telah dilakukan sita eksekusi terhadap alat tersebut pada tanggal 10 Oktober 2018 bertempat di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No. 06/PEN.EKS/2018/PN.Sby tanggal 10 Oktober 2018. Perusahaan menunggu hasil proses pelelangan tersebut yang akan di sampaikan kepada Perusahaan.

- b) Perusahaan menggugat PT Wahana Artha Luhur ("PT WAL") dengan No. Perkara. 662/Pdt.G/2009/PN.SBY.

Pada tanggal 29 April 1997, Perusahaan dan PT WAL menandatangani perjanjian sewa HPL Cabang Tanjung Perak seluas 27.393m² untuk kepentingan PT WAL membangun pabrik minyak nabati cair (*refinery*) dan gudang penyimpanan dengan jangka waktu 20 tahun. Hingga akhir masa perjanjian, PT WAL tidak melakukan pembangunan dan hanya melakukan pembangunan tembok pembatas. Karena PT WAL tidak segera melakukan pembangunan maka Perusahaan berupaya untuk mengembalikan atau menarik kembali tanah yang dikerjasamakan. Atas tindakan Perusahaan tersebut PT WAL melakukan gugatan kepada Perusahaan melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Gugatan di pengadilan tingkat pertama ini dimenangkan oleh Perusahaan.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- a) *The Company filed lawsuit against PT Timur Nusantara with Case Number 196/Pdt.G/2009/PN.Sby. (continued)*

The Company has sent a warning through the Surabaya District Court, but PT Timur Nusantara still refused to carry out the verdict. Therefore, the head of Banyuwangi District Court (as a delegation of Surabaya District Court at the place of execution) issued Decision No. 06/PEN.Eks/2018/PN/Sby Jo. No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby dated October 5, 2018 stating an order to seize the object of the dispute in the form of 1 unit Reach Stacker belonging to PT Timur Nusantara.

Based on the decision above, the seizure was done on October 10, 2018 at the Port of Tanjung Wangi Banyuwangi as stated in the Seizure Memo No. 06/PEN.EKS/2018/PN.Sby dated October 10, 2018. The Company is waiting for the result of the auction process which will be notified to the Company by the High Court of Surabaya.

- b) *The Company filed lawsuit against PT Wahana Artha Luhur ("PT WAL") Case number 662/Pdt.G/2009/PN.SBY.*

On April 29, 1997, the Company and PT WAL signed Tanjung Perak Branch HPL lease agreement covering 27,393m² for 20 years for PT WAL's construction of vegetable oil refinery and stockpiling warehouse. Until the end of the agreement period, PT WAL hasn't done any construction and has only built the retaining wall. Since PT WAL didn't immediately carry out the development, the Company sought to have the leased land returned or withdrawn. For the Company's action, PT WAL filed a lawsuit against the Company to Surabaya District Court. The lawsuit in the first court was won by the Company.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- b) Perusahaan menggugat PT Wahana Artha Luhur ("PT WAL") dengan No. Perkara. 662/Pdt.G/2009/PN.SBY. (lanjutan)

Upaya hukum lanjutan telah dilakukan beberapa kali, yang terakhir dengan hasil Putusan Peninjauan Kembali dengan register No. 470 PK/PDT/2012 tanggal 23 Oktober 2013 yang mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT WAL dari situs Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perusahaan telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut, yang terakhir dengan mengundang PT WAL melalui media massa Koran Nasional, namun PT WAL tidak pernah menghadiri undangan pertemuan tersebut. Karena tidak adanya respon dari PT WAL, pada tanggal laporan keuangan tanah tersebut disewakan Perusahaan kepada PT Nilam Utara.

- c) Perusahaan mengundurkan diri dari keikutsertaan kepemilikan PT Lamin Aspalindo Tiga ("Lamin").

PT Lamin merupakan ventura bersama antara PT Lamindo Sakti Inti dan Perusahaan. Namun, Lamin baru melakukan satu transaksi penjualan sejak pendiriannya. Melalui konsultan hukum Zaidun & Partners, Perusahaan telah melakukan uji tuntas dari segi hukum (*Legal Due Diligence*). Berdasarkan hasil uji tuntas tersebut, Perusahaan telah menerbitkan Surat Kuasa No. KP.0503/166/HOFC-2018 tanggal 17 Desember 2018 dan No. SP.0835/KP.0503/HOFC-2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang pembubaran Lamin. Sampai tanggal laporan keuangan, Perusahaan masih menunggu jawaban dan kehadiran PT Lamindo Sakti Inti untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka pelepasan kepemilikan Perusahaan atas PT Lamin.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- b) The Company filed lawsuit against PT Wahana Artha Luhur ("PT WAL") Case number 662/Pdt.G/2009/PN.SBY. (continued)

Following that, several legal efforts have been made, with the latest result being the Judicial Review Decision with register No. 470 PK/PDT/2012 dated October 23, 2013 which granted the Judicial Review proposed by PT WAL as stated in the Supreme Court of Indonesia's Website.

The Company has attempted to resolve the lawsuit, with the latest effort by inviting PT WAL through advertisements in national newspapers. However, PT WAL had not responded to any of the meeting invitations. As there's no response from PT WAL, at the financial report date the Company leased the land to PT Nilam Utara.

- c) The Company withdrew from the ownership of PT Lamin Aspalindo Tiga ("Lamin").

PT Lamin is a joint venture between PT Lamindo Sakti Inti and the Company. However, Lamin has only made one sales transaction since its establishment. Through Zaidun & Partners as the legal consultant, the Company has conducted Legal Due Diligence. Based on the results of the Due Diligence, the Company issued Power of attorney No. KP.0503/166/OFC-2018 dated December 17, 2018 and No. SP.0835/KP.0503/HOFC-2018 dated December 17, 2018 on the dissolution of Lamin. Until the date of the financial statements, the Company is still waiting for PT Lamindo Sakti Inti's response and presence to carry out the General Meeting of Shareholders in order to release the Company's ownership of PT Lamin.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- d) Perusahaan (turut tergugat) dan Sdri. Widji (tergugat) digugat oleh Sdr. Yusuf Efendi dengan Perkara No. 13/Pdt.G/2013/PN.Sby.

Saudara Yusuf Efendi, sebagai Penggugat, mengaku sebagai ahli waris yang sah atas bangunan di Jalan Teluk Nibung Timur 8/25A Surabaya yang berdiri di atas Hak Pengelolaan (HPL) Pelabuhan. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menempati objek sengketa tanpa izin Penggugat, dan meminta kepada Perusahaan untuk mengubah izin penggunaan tanah yang sebelumnya atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat. Berdasarkan keputusan No. Pdt.G.13/PN.Sby tanggal 28 Agustus 2013, Pengadilan Negeri Surabaya menerima sebagian tuntutan Penggugat.

Perusahaan telah mengajukan banding atas putusan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengajuan banding Perusahaan diterima dan dikabulkan berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 279/PDT/2017/PT.Sby tanggal 9 Februari 2018, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Pdt.G.13/PN.Sby dibatalkan.

Atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan Relas Pemberitahuan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 5 Juli 2018. Sampai tanggal laporan keuangan, Perusahaan masih dalam proses pengajuan Kontra Memori Kasasi atas perkara ini.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- d) The Company (co-defendant) and Widji (defendant) were sued by Yusuf Efendi with Case No. 13/Pdt.G/2013/PN.Sby.

Yusuf Efendi, as the Plaintiff, claimed to be the rightful heir of the building on Jalan Teluk Nibung Timur 8/25A Surabaya which stands on Port Management Rights (HPL). The Plaintiff stated that the Defendant has occupied the object of the dispute without the Plaintiff's permission, and requested the Company to change the previous land use permit on behalf of the Defendant to be on behalf of the Plaintiff. Based on the decision No. Pdt.G.13/PN.Sby August 28, 2013, the Surabaya District Court granted a portion of the Plaintiff's demands.

The Company had appealed the decision to the Surabaya High Court. The Company's appeal was accepted and granted based on the Appeal Decision Notice Statement Number 279/PDT/2017/PT.Sby dated February 9, 2018, thus cancelling Surabaya District Court Decision Number Pdt.G.13/PN.Sby.

Upon the Surabaya High Court's decision, the Plaintiff filed an appeal to the Indonesian Supreme Court through Surabaya District Court with the Credential Declaration Statement Number 13/Pdt.G/2013/PN.Sby dated July 5, 2018. Until the date of the financial statements, the Company is still in the process of submitting the Cassation Memorandum Contra for the matter.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- e) Perusahaan digugat oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) dalam Perkara Perdata No. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby.

YLPK mendalilkan Perusahaan melakukan kebohongan dengan mencantumkan lingkup bisnis sebagai penyedia jasa air kapal pada *Annual Report* Tahun 2011. Atas dalil tersebut, YLPK tidak menuntut Perusahaan untuk membayar, namun untuk meminta maaf melalui media massa. Setelah melalui pemeriksaan di persidangan, atas gugatan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan YLPK untuk seluruhnya.

YLPK menyatakan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Surabaya pada 10 Maret 2015. Atas pengajuan banding tersebut Perusahaan telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Juni 2015 dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding No. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan surat Pengadilan Tinggi Surabaya No. 126/PDT/2016/PT.Sby Jo. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby, pada pokoknya memberi putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Pada tanggal laporan keuangan, Perusahaan masih belum menerima Relas Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

- f) Perusahaan (tergugat II) bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI") (Tergugat I) digugat oleh Masyarakat Korban Pengusuran di sekitar stasiun Kalimas dengan perkara No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby, No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, dan No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby.

(a). Abdullah/Dewi Nasiroh, dkk selaku Penggugat melawan PT KAI Daops VIII Surabaya selaku Tergugat I dan Perusahaan selaku Tergugat II dalam perkara perdata No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby;

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- e) The Company was sued by Consumer protection Foundation (YPLK) in Civil Case No. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby.

YLPK sued the Company for lying by stating that the scope of the business is as water services provider for ships in the 2011 Annual Report. For the lawsuit, YLPK didn't demand any payment from the Company, but an apology through the mass media. After the examination process in the court, the Surabaya District Court judges basically ruled that YLPK's claim was rejected in full.

YLPK filed an appeal on the decision to the Surabaya High Court on March 10, 2015. In response to that appeal, the Company submitted the Counter Memory of Appeal on June 29, 2015 with Receipt of Counter Memory of Appeal No. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby.

The Surabaya High Court's Panel of Judges, with Letter of Surabaya High Court No. 126/PDT/2016/PT.Sby Jo. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby, basically ruled a verdict that strengthened the decision of the Surabaya District Court. Until the date of the financial statements, the Company still hasn't received formal verdict statement from the Surabaya District Court.

- f) The Company (Defendant II) along with PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI") (Defendant I) were sued by the Victims of eviction near Kalimas station with case No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby, No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, and No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby.

(a). Abdullah/Dewi Nasiroh, et al as the Plaintiff against PT KAI Daops VIII Surabaya as Defendant I and the Company as the second defendant in the civil case No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby;

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

f) Perusahaan (tergugat II) bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI") (tergugat I) digugat oleh Masyarakat Korban Penggusuran di sekitar stasiun Kalimas dengan perkara No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby, No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, dan No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby. (lanjutan)

(b). Kadarwati alias Ibu Baginda selaku Penggugat melawan PT KAI Daops VIII Surabaya selaku Tergugat I dan Perusahaan selaku Tergugat II dalam perkara perdata No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby;

(c). Maslichah dan Soeselo, dkk selaku Penggugat melawan PT KAI Daops VIII Surabaya selaku Tergugat I dan Perusahaan selaku Tergugat II dalam perkara perdata No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Para penggugat dalam *register* perkara No. 901-903/Pdt.G/2014/PN.Sby merupakan korban penggusuran yang dilakukan oleh PT KAI Daops VIII di sekitar Stasiun Kalimas, Surabaya. Lokasi penggusuran tersebut rencananya akan digunakan dalam rangka kerjasama usaha pengangkutan petikemas melalui sarana kereta api antara PT KAI dengan Perusahaan. Atas gugatan tersebut dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, majelis hakim menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas permohonan banding dari Para Penggugat *register* perkara No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby sebagaimana relas No. 67/Pdt/2016/PT.Sby tanggal 13 April 2016. Perusahaan masih menunggu surat No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby dan No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

f) *The Company (Defendant II) along with PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI") (Defendant I) were sued by the Victim of eviction near Kalimas station with case No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby, No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, and No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby. (continued)*

(b). *Kadarwati aka Mrs. Baginda as plaintiff against PT KAI Daops VIII Surabaya as Defendant I and the Company as the second defendant in the civil case No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby;*

(c). *Maslichah and Soeselo, et al as the Plaintiff against PT KAI Daops VIII Surabaya as Defendant I and the Company as Defendant II in the civil case No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby.*

The plaintiffs in the case register No. 901-903/Pdt.G/2014/PN.Sby are victims of eviction conducted by PT KAI Daops VIII around Kalimas Station Surabaya. Location of eviction is planned to be used in the framework of cooperation by means of hauling container trains between PT KAI and the Company. Based on the lawsuit and through the inspection and checking in the court proceeding, the Panel Judge ruled the verdict which rejected all the plaintiffs' lawsuit.

At the request for appeal from Plaintiffs with registered case No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, Surabaya High Court Judge has ruled with the verdict substantially strengthening the Surabaya District Court decision No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby with letter No. 67/Pdt/2016/PT.Sby dated April 13, 2016. The Company is awaiting the verdict through letter No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby and No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- f) Perusahaan (tergugat II) bersama dengan PT KAI (tergugat I) digugat oleh Masyarakat Korban Penggusuran di sekitar stasiun Kalimas dengan perkara No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby, No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, dan No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby. (lanjutan)

Menurut informasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Surabaya ketiga perkara tersebut telah diputus dalam tingkat banding dengan amar putusan menguatkan putusan PN Surabaya tersebut. Pada tanggal laporan keuangan, perusahaan masih belum menerima Relas Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

- g) Perusahaan digugat Ang Agus dengan perkara No. 808/Pdt.G/2016/PN.Sby.

Ang Agus menggugat Perusahaan terkait sengketa perdata revitalisasi tanah di Jalan Kalimas No. 138, 158, dan 158A yang merupakan tanah HPL Perusahaan. Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan tanah tersebut sebagai tanah HPL Perusahaan.

Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan No. W14U/636/HK.02/01/2017 tanggal 18 Januari 2018, dengan hasil putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya.

Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Perusahaan telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 14 September 2018 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Kasasi No. 808/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 14 September 2018. Saat tanggal laporan keuangan, perkara sedang dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI.

- h) Perusahaan menggugat Sdr. Wawan Syarwhani dengan perkara No. 865/Pdt.G/2017/PN.Sby.

Wawan Syarwhani, sebagai tergugat, merupakan pensiunan pegawai Perusahaan yang mendiami beberapa rumah tinggal di Jalan Teluk Kumai, Surabaya, yang berdiri di atas tanah HPL Pelabuhan.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- f) The Company (Defendant II) along with PT KAI (Defendant I) were sued by the Victim of eviction near Kalimas station with case No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby, No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, and No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby. (continued)

Based on the Information System Tracking Lawsuit of Surabaya District Court (SIPP), The 3 registered cases have been ruled in the level of appeal with ruling that strengthened the decision of the Surabaya District Court. As at the reporting date, the Company has not received the formal letter from District Court of Surabaya.

- g) The Company was sued by Ang Agus case No. 808/Pdt.G/2016/PN.Sby.

Ang Agus sued the Company related to civil disputes for revitalization of land on Kalimas Road No. 138, 158, and 158A which lies on the Company's HPL Land. The Surabaya District Court granted that part of the lawsuit from the Plaintiff and stated that the HPL Land belongs to the Company.

The Plaintiff appealed to the High Court Surabaya with case No. W14U/636/HK.02/01/2017 dated January 18, 2018 with verdict that in principle strengthened the decision of Surabaya District Court.

The Plaintiff appealed to the Supreme Court through Surabaya District Court. The Company submitted contra memory cassation dated September 14, 2018 with receipt of counter motion No. 808/Pdt.G/2016/PN.Sby dated September 14, 2018. At the reporting date, the cassation document is still in the process of checking by the Supreme Court of Republic Indonesia.

- h) The Company filed a Lawsuit against Wawan Syarwhani with case No. 865/Pdt.G/2017/PN.Sby.

Wawan Syarwhani, the defendant, is a retired employee of the Company who lives in several houses on Jalan Teluk Kumai, Surabaya, which are situated on the Port's HPL land.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- h) Perusahaan menggugat Sdr. Wawan Syarwhani dengan perkara No. 865/Pdt.G/2017/PN.Sby. (lanjutan)

Tergugat menolak untuk membayar uang pemasukan kepada Perusahaan dengan alasan Perusahaan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan uang tersebut karena kewenangan atas HPL telah dialihkan kepada Otoritas Pelabuhan. Atas penolakan ini, Perusahaan menyampaikan gugatan kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar Wawan Syarwhani membayarkan ganti rugi material sejumlah Rp33.485 dan ganti rugi immaterial sejumlah Rp193.809. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Negeri Surabaya menolak gugatan Perusahaan.

Atas putusan tersebut, Perusahaan telah menyatakan banding, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 19 September 2018. Memori Banding atas perkara tersebut sudah dikirimkan oleh Biro Hukum Perusahaan selaku kuasa hukum Perusahaan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 18 Januari 2019.

Pada tanggal 26 Juni 2019, Perusahaan telah menerima Memori Banding dari kuasa hukum Wawan Syarwhani sebagaimana Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding perkara nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby. Dengan demikian sampai tanggal laporan keuangan kedua belah pihak masih mengajukan upaya hukum banding dan atas memori banding tersebut.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- h) The Company filed a Lawsuit against Wawan Syarwhani with case No. 865/Pdt.G/2017/PN.Sby. (continued)

The Defendant refused to pay the obligatory fee to the Company, reasoning that the Company didn't have the authority to levy the money as the authority over the HPL has been transferred to the Port Authority. Responding to the refusal, the Company submitted a lawsuit to the Surabaya District Court for Wawan Syarwhani to pay the Rp33,485 material compensation and the Rp193,809 immaterial compensation. Based on the results of the examination in the trial, the Surabaya District Court rejected the Company's lawsuit.

In response to the decision, the Company filed an appeal in accordance with the Deed of Appeal Number 865/Pdt.G/2017/PN.Sby dated September 19, 2018. The memory of appeal upon the matter had been sent to the Company's legal counsel which acted as the Company's Attorney to the High Court of Surabaya through the District Court of Surabaya with Memory Appeal Receipt Number 865/Pdt.G/2017/PN.Sby dated January 18, 2019.

On June 26, 2019, the Company received an Appeal of Memory from Wawan Syarwhani's attorney in accordance with Case Notification/Submission of Appeal Memory Case number 865/Pdt.G/2017/PN.Sby. Accordingly, as of the date of the financial statements, both parties had a legal effort to file an appeal and the memorandum of the appeal.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- i) Perusahaan, Badan Pertanahan Nasional Surabaya (Kantor Pertanahan II), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) digugat oleh Sdr. Ardiansyah dkk dengan perkara No. 315/Pdt.G/2018/PN.Sby.

Para Penggugat mengaku sebagai pemilik bekas rumah dinas di Jalan Teluk Tomini, Jalan Teluk Buli, dan Jalan Tanjung Layar, Surabaya, yang berdiri di atas tanah HPL Perusahaan yang bernilai Rp1.000.000. Para Penggugat berdalil bahwa Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan hak milik kepada Penggugat maupun memberikan rekomendasi peralihan tanah HPL menjadi hak milik.

Mediasi telah dilakukan atas perkara, namun mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator. Perkara kemudian dilanjutkan ke tahap sidang dengan Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hasil persidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan ditolak karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena perkara merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Atas putusan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan banding sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Terhadap Putusan Sela Nomor 315/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 6 November 2018.

Berkas perkara telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan telah teregistrasi pada tanggal 4 April 2019 sebagaimana surat Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya nomor W14-U/2845/HK.02/04/2019 tanggal 8 April 2019 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding PN Surabaya No. 315/Pdt.G/2018/PN.Sby.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- i) The Company, National Land Agency of Surabaya (Land Office II), and Minister of Public Works and Human Settlements (PUPR) were sued by Ardiansyah, et al with Case No. 315/Pdt.G/2018/PN.Sby.

The Plaintiffs claimed to be the owners of the former official residences on Teluk Tomini Street, Teluk Buli Street, and Tanjung Layar Street, Surabaya, standing on the Company's HPL land which value was Rp1,000,000. The Plaintiffs sued the Company for committing an unlawful act by neither granting the land's ownership to the Plaintiffs nor recommending the transfer of the land's ownership from HPL freehold land.

Mediation was carried out on the case, however the mediation was declared failed by the Mediator Judge. The case was then raised to a trial in Surabaya District Court.

Based on the result of the trial, the Panel of Judges concluded that the Surabaya District Court was not authorized to examine and rule the case, as the case was the absolute competence of the State Administrative Court (PTUN). In response to the decision, the Plaintiffs filed an appeal through their attorney in accordance with the Notice of Appeal Against Interlocutory Decision Statement Number 315/Pdt.G/2018/PN.Sby dated November 6, 2018.

Case files have been sent to the Surabaya High Court and were registered on April 4, 2019 as stated by the Surabaya Civil Court High Court Registrar number W14-U / 2845 / HK.02 / 04/2019 on April 8, 2019 concerning Reception and Registration of PN Appeal Case Files Surabaya No. 315 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- i) Perusahaan, Badan Pertanahan Nasional Surabaya (Kantor Pertanahan II), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) digugat oleh Sdr. Ardiansyah dkk dengan perkara No. 315/Pdt.G/2018/PN.Sby. (lanjutan)

Pada 29 Mei 2019, Perusahaan telah menerima Surat Pengadilan Tinggi Surabaya nomor W14-U/4582/HK.02/05/2019 perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara PN Surabaya No. 315/Pdt.G/2018/PN.Sby, yang menginformasikan bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam tingkat banding. Atas surat tersebut, Biro Hukum Perusahaan melakukan penelusuran melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya dan didapat informasi bahwa putusan perkara tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 315/Pdt.G/2018/PN.Sby yang dimohonkan banding. Perusahaan saat ini menunggu Salinan resmi putusan perkara tersebut dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk ditindaklanjuti.

- j) Perusahaan dan Badan Pertanahan Nasional Surabaya (Kantor Pertanahan II) digugat oleh Ir. H. Irmain dengan perkara No. 553/Pdt.G/2018/PN.

Penggugat berdalil bahwa Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan hak atas tanah kepada Penggugat dan memungut uang pemasukan atas penggunaan tanah HPL di Jalan Perak Timur, Surabaya senilai Rp1.000.000 oleh Penggugat.

Mediasi telah dilakukan atas perkara, namun mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator. Perkara kemudian dilanjutkan ke tahap persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan perkara tersebut dengan amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- i) The Company, National Land Agency of Surabaya (Land Office II), and Minister of Public Works and Human Settlements (PUPR) were sued by Ardiansyah, et al with Case No. 315/Pdt.G/2018/PN.Sby. (continued)

On May 29, 2019, the Company had received the Surabaya High Court Letter number W14-U/4582/HK.02/05/2019 regarding the Submission of Case File on Surabaya District Court with No. 315/Pdt.G/2018/PN.Sby which informed that the case had been decided by the Surabaya High Court on appeal. Upon this letter, the Company's Legal Bureau conducted a search through the Surabaya District Court's Case Tracking Information System (SIPP) and obtained information that the case decision strengthened the Surabaya District Court's decision number 315/Pdt.G/2018/PN.Sby for which an appeal was submitted. The company is currently waiting for an official copy of the case decision from the Surabaya District Court to be followed up.

- j) The Company and the National Land Agency of Surabaya (Land Office II) were sued by Ir. H. Irmain with case No. 553/Pdt.G/2018/PN.

The Plaintiff sued the Company for committing unlawful acts by not granting the land's ownership (freehold title) to the Plaintiff and levying an obligatory fee for the Plaintiff's use of HPL land on Perak Timur Street, Surabaya which value was Rp1,000,000.

Mediation was carried out on the case, however the mediation was declared failed by the Mediator Judge. The case was then raised to a trial stage. The Panel of Judges of Surabaya District Court handed down the verdict with the verdict statement that the Plaintiff's claim could not be accepted.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- j) Perusahaan dan Badan Pertanahan Nasional Surabaya (Kantor Pertanahan II) digugat oleh Ir. H. Irmain dengan perkara No. 553/Pdt.G/2018/PN. (lanjutan)

Atas putusan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan banding pada tanggal 8 Mei 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 121/Akta.Pdt.Banding/2019/PN.Sby jo Nomor 553/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 27 Mei 2019.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 481/PDT/2019/PT SBY menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.. Atas putusan ini, Ir. H. Irmain mengajukan proses Kasasi dan mengajukan Memori Kasasi, melalui Relas Pemberitahuan Kasasi Nomor 553/Pdt.G/2018/PN.Sby jo Nomor 481/PDT/2019/PT SBY tanggal 13 Desember 2019. Sampai tanggal laporan keuangan, Perusahaan masih menunggu proses Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- k) Perusahaan dan Badan Pertanahan Nasional Surabaya (Kantor Pertanahan II) digugat oleh PT Surya Segara Safety dengan perkara No. 599/Pdt.G/2018/PN.

Penggugat berdalil bahwa Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan hak atas tanah kepada Penggugat dan memungut uang pemasukan atas penggunaan tanah HPL senilai Rp500.000.000 oleh Penggugat.

Mediasi telah dilakukan atas perkara, namun mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator. Perkara kemudian dilanjutkan ke tahap sidang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan perkara tersebut dengan amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- j) The Company and the National Land Agency of Surabaya (Land Office II) were sued by Ir. H. Irmain with case No. 553/Pdt.G/2018/PN. (continued)

Upon the decision, the Plaintiff through his attorney stated an appeal on May 8, 2019 as the Relevant Notification of the Declaration of Appeal Number 121/Deed.Pdt.Banding/2019/PN.Sby jo Number 553/Pdt.G/2018/PN.Sby on May 27 2019.

Surabaya High Court's Decision Number 481/PDT/2019/PT SBY upheld the Surabaya District Court's Decision stating that the Plaintiff's claim was unacceptable. Based on this decision, Ir. H. Irmain filed the Cassation process and filed a Cassation Memory, through the Appeal of Cassation Notification Number 553/Pdt.G/2018/PN.Sby jo Number 481/PDT/2019/PT SBY dated December 13, 2019. Until the financial statement date, the Company is still waiting the cassation process to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

- k) The Company and the National Land Agency of Surabaya (Land Office II) were sued by PT Surya Segara Safety with case No. 599/Pdt.G/2018/PN.

The Plaintiff sued the Company for committing unlawful acts by not granting the land's ownership to the Plaintiff and levying an obligatory fee for the Plaintiff's use of HPL land, which HPL value was Rp500,000,000.

Mediation was carried out on the case, however the mediation was declared failed by the Mediator Judge. The case was then raised to a trial stage. The Panel of Judges of Surabaya District Court handed down the verdict with the verdict statement that the Plaintiff's claim could not be accepted.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- k) Perusahaan dan Badan Pertanahan Nasional Surabaya (Kantor Pertanahan II) digugat oleh PT Surya Segara Safety dengan perkara No. 599/Pdt.G/2018/PN. (lanjutan)

Atas putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan banding pada tanggal 5 Maret 2019. Dalam Putusan Nomor 347/pdt/2019/PT SBY, majelis hakim memutus sebagai berikut; a. Menerima permohonan banding dari para pemebanding semula penggugat; b. menguatkan putusan pada tanggal 21 Februari 2019 Nomor 599/Pdt.G/2018/PN.Sby yang dimohonkan banding tersebut.

Terhadap putusan banding tersebut, PT Surya Segara melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya kasasi dan memori kasasi ke Mahkamah Agung dimana, atas memori kasasi tersebut, Biro Hukum Perusahaan telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 30 Desember 2018.

- l) Perusahaan dan PT Pro Energy mengajukan somasi kepada PT Dinar Putra Mandiri.

PT Pro Energy dan Perusahaan adalah kreditur dari PT Dinar Putra Mandiri yang berencana melakukan gugatan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang kepada PT Dinar Putra Mandiri, di mana PT Dinar Putra Mandiri berutang sebesar Rp878.158.

Berdasarkan UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa gugatan kepailitan dapat dikabulkan apabila terdapat minimal 2 kreditur dan salah satunya telah jatuh tempo. Atas dasar aturan tersebut, maka PT Pro Energy bekerja sama dengan Perusahaan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk mengajukan gugatan pailit terhadap PT Dinar Putra Mandiri.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- k) The Company and the National Land Agency of Surabaya (Land Office II) were sued by PT Surya Segara Safety with case No. 599/Pdt.G/2018/PN. (continued)

Upon the decision, the Plaintiff through their attorney stated an appeal on March 5, 2019. In Decision Number 347 / pdt / 2019 / PT SBY, the panel of judges decided as follows; a. accepting the appeals from appellants who was previously the original plaintiff; b. Confirming the decision on February 21, 2019 Number 599 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby for the appeal was submitted.

Regarding the appeal decision, PT Surya Segara through its attorney has filed an appeal and cassation memory effort to the Supreme Court where, based on this appeal, the Company's Legal Bureau has filed a counter appeal to the appeal on December 30, 2018.

- l) The Company and PT Pro Energy filed a Subpoena to PT Dinar Putra Mandiri.

PT Pro Energy and the Company are creditors of PT Dinar Putra Mandiri that planned to file a bankruptcy and/or suspension of obligation for payment of debts, for which PT Dinar Putra Mandiri owed Rp878,158.

Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payments of Debts, it is stated that bankruptcy lawsuits can be granted if there are at least 2 creditors and one of them is due. On the basis of this law, PT Pro Energy cooperates with the Company at Tanjung Emas Port Semarang to file a bankruptcy lawsuit against PT Dinar Putra Mandiri.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- l) Perusahaan dan PT Pro Energy mengajukan somasi kepada PT Dinar Putra Mandiri. (lanjutan)

Perusahaan telah memberikan kuasa kepada Muhammad Tri Shaoky, SH dan rekan untuk mewakili kepentingan Perusahaan dalam perkara tersebut. Kuasa hukum perusahaan telah mengajukan somasi kepada PT Dinar Putra Mandiri. Perkara ini telah diperiksa pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register 101/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga Jakarta Pusat.

Setelah dilakukan pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan PKPU.

- m) Perusahaan mengajukan gugatan intervensi kepada PT Sinar Centra Cipta atas perkara No. 273/G/2017/PTUN-JKT.

PT Sinar Centra Cipta menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas rencana reklamasi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang diduga memakai sebagian lahan Penggugat. Atas gugatan tersebut, Perusahaan mengajukan gugatan intervensi terhadap PT Sinar Centra Cipta dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 31 Januari 2018 karena lokasi kegiatan dan pengembangan pelabuhan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di bawah pengelolaan Perusahaan.

Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan PT Sinar Centra Cipta tidak dapat diterima karena PT Sinar Centra Cipta tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut. Atas putusan tersebut, PT Sinar Centra Cipta mengajukan upaya banding pada 1 Oktober 2018.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- l) The Company and PT Pro Energy filed a Subpoena to PT Dinar Putra Mandiri. (continued)

The Company has authorized Muhammad Tri Shaoky, SH and partners to represent the Company in the case. The company's legal counsel has filed a subpoena to PT Dinar Putra Mandiri. This case has been examined at the Central Jakarta District Court with the registration number 101 / Pdt. Sus-PKPU / PN. Niaga Central Jakarta.

After the trial examination, the Commercial Court Judge Panel handed down a verdict which essentially rejected the PKPU lawsuit.

- m) The Company filed an intervention lawsuit against PT Sinar Centra Cipta ("SCC") for Case No. 273/G/2017/PTUN-JKT.

PT Sinar Centra Cipta ("SCC") sued the Ministry of Environment and Forestry for the reclamation plan at the Tanjung Emas Port in Semarang which allegedly used some of the Plaintiff's land. In response to this lawsuit, the Company filed an intervention lawsuit against PT Sinar Centra Cipta and the Ministry of Environment and Forestry through the Jakarta State Administrative Court on January 31, 2018 considering that the location of port activities and development stipulated in the State Administrative Decree was under the Company's jurisdiction.

The Panel of Judges ruled that the lawsuit filed by PT Sinar Centra Cipta was rejected because PT Sinar Centra Cipta did not have a legal standing to file the lawsuit. On this decision, PT Sinar Centra Cipta submitted an appeal on October 1, 2018.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- m) Perusahaan mengajukan gugatan intervensi kepada PT Sinar Centra Cipta atas perkara No. 273/G/2017/PTUN-JKT (lanjutan)

Atas putusan banding tersebut, PT SCC menyatakan kasasi pada tanggal 26 Februari 2019. Perusahaan telah mengajukan kontra memori kasasi melalui kuasa hukumnya, Siregar Setiawan Manalu Partnership, atas perkara 273/G/LH/2018/PTUN-JKT tanggal 22 Maret 2019. Perkara ini telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi dengan nomor perkara 283K/TUN/LH/2019 tanggal 24 Juli 2019. Namun sampai tanggal laporan keuangan, Subdit Legal sebagai Kuasa Hukum Perusahaan telah mengajukan Peninjauan Kembali pada awal bulan Januari 2020.

- n) Perusahaan digugat oleh Sdr. Tjokro Herwanto Teddy atas perkara No. 823/Pdt.G/2017/PN.Sby.

Penggugat merupakan pengguna tanah Pelindo III di Jalan Kalimas Baru Nomor 117 Surabaya. Perjanjian Penyerahan Penggunaan bagian tanah HPL antara Penggugat dan Pelindo III (Tergugat) telah berakhir. Namun, Penggugat tidak bersedia mengembalikan tanah milik Tergugat (Pelindo III). Karena penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong kepada Pelindo III, maka Pelindo III melakukan pembongkaran bangunan sebagai tindak lanjut dalam perjanjian apabila perjanjian telah berakhir. Tanah tersebut saat ini telah digunakan oleh polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Saat ini sudah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 823/Pdt.G/2017/PN.Sby, yang diputus pada tanggal 9 Mei 2018 dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menyatakan Pelindo III tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- m) The Company filed an intervention lawsuit against PT Sinar Centra Cipta for Case No. 273/G/2017/PTUN-JKT (continued)

In response to the appeal decision, PT SCC declared a cassation on February 26, 2019. The Company filed a cassation memorandum contra through their attorney, Siregar Setiawan Manalu Partnership, for Case 273/G/LH/2018/PTUN-JKT on March 22, 2019. This case has been decided by the Supreme Court of the Republic of Indonesia at the cassation level with case number 283K/TUN/LH/2019 dated July 24, 2019. However, until the date of the financial statements, the Legal Sub-Directorate as Legal Counsel of the Company has filed a Judicial Review in early January 2020.

- n) The company was sued by Br. Tjokro Herwanto Teddy on case No. 823 / Pdt.G / 2017 / PN.Sby.

The Plaintiff is a land user of Pelindo III on Jalan Kalimas Baru Number 117 Surabaya. The Handover Agreement for the use of HPL land between the Plaintiff and Pelindo III (Defendant) has expired. However, the Plaintiff is not willing to return the land owned by the Defendant (Pelindo III). Because the plaintiff did not fulfill his obligation to surrender land in an empty condition to Pelindo III, Pelindo III undertook demolition of the building as a follow-up to the agreement if the agreement had ended. The land is currently being used by Tanjung Perak Harbor police.

Currently there is a Surabaya District Court Decision No. 823 / Pdt.G / 2017 / PN.Sby, which was decided on May 9, 2018 with the decision of the Surabaya District Court Refusing the Plaintiff's Lawsuit in its entirety and Stating Pelindo III did not commit an acts against the law.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- n) Perusahaan digugat oleh Sdr. Tjokro Herwanto Teddy atas perkara no. 823/Pdt.G/2017/PN.Sby. (lanjutan)

Atas putusan tersebut Sdr. Tjokro Herwanto Teddy mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor register 658/PDT/2018/PT.Sby., dan atas pengajuan tersebut Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dimohonkan banding tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, antara lain menyatakan PT Pelindo III melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib melakukan penggantian sebesar Rp10.000.000.

Atas putusan tersebut Biro Hukum Perusahaan telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI sebagaimana Akta Permohonan Kasasi 823/Pdt.G/2017/PN.Sby Jo. 658/PDT/2018/PT.Sby tanggal 2 April 2019. Perkara saat ini belum diberikan salinan putusan kasasi, namun Biro Hukum Perusahaan telah mendapat info melalui SIPP bahwa Perusahaan dinyatakan menang dalam Perkara ini dan dapat dinyatakan *inkracht*.

- o) Perusahaan digugat oleh Ang Shuantie John dan PT Upaya Ekspor atas Perkara nomor 1223/Pdt.G/2018/PN.SBY.

Dalam gugatannya, para Penggugat mendalilkan bahwa Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan secara sewenang-wenang melakukan perencanaan pengosongan gudang miliknya di Jalan Kalimas Baru No.128 dan 140, Surabaya.

Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya mengakui bahwa gudang tersebut adalah miliknya dan menyatakan bahwa Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam amar Putusannya, Majelis Hakim memutuskan bahwa Gugatan ini Tidak Dapat Diterima dengan Alasan Nebis in Idem dengan Perkara Nomor No.507/Pdt.G/2016/PN.Sby. yang telah berkekuatan hukum tetap.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- n. The company was sued by Br. Tjokro Herwanto Teddy on case no. 823 / Pdt.G / 2017 / PN.Sby. (continued)

For the decision, Sdr. Tjokro Herwanto Teddy filed an appeal to the Surabaya High Court with the registration number 658 / PDT / 2018 / PT.Sby., And for the submission, the Surabaya High Court handed down the verdict which essentially canceled the decision of the Surabaya District Court being appealed and granted the Plaintiff's claim for some, among others, stating that PT Pelindo III committed an illegal act and was required to make a compensation of Rp10,000,000.

Based on this decision, the Company's Legal Bureau has filed an appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia in accordance with the Deed of Cassation Application 823 / Pdt.G / 2017 / PN.Sby Jo. 658 / PDT / 2018 / PT.Sby dated April 2, 2019. The case has not yet been given a copy of the cassation decision, but the Company's Legal Bureau has received information through SIPP that the Company has been declared victorious in this Case and can be declared final and legally binding.

- o) The company was sued by Ang Shuantie John and PT Usaha Ekspor for Case number 1223 / Pdt.G / 2018 / PN.SBY.

In their lawsuit, the Plaintiffs argued that the Company had committed an illegal act by arbitrarily carrying out an emptying of a warehouse that belongs to them at Jalan Kalimas Baru No.128 and 140, Surabaya.

The Plaintiffs requested that the Surabaya District Court recognize that the warehouse was his property and stated that the Company had committed an illegal act.

In its ruling, the Panel of Judges ruled that this lawsuit could not be accepted on the grounds of Nebis in Idem with Case No.507 / Pdt.G / 2016 / PN.Sby. which has permanent legal force.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- o) Perusahaan digugat oleh Ang Shuantie John dan PT Upaya Eksport atas Perkara nomor 1223/Pdt.G/2018/PN.SBY. (lanjutan)

Terhadap putusan ini, Penggugat melakukan upaya hukum banding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 259/Akta.Pdt.Banding/2019/PN.Niaga Jo. Nomor 1223/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 25 September 2019 dan telah menyampaikan memori bandingnya.

- p) Perkara Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-L/2018.

Guna meningkatkan produktivitas bongkar muat petikemas di Terminal Multipurpose L Say Maumere, terhitung sejak tahun 2017, Pelindo 3 telah menetapkan kebijakan stack 100%. Akan tetapi, kebijakan tersebut dianggap sebagai aktivitas monopoli oleh Investigator KPPU.

Dalam laporannya, Investigator KPPU menganggap bahwa kebijakan stack 100% yang diterapkan oleh Pelindo 3 melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf b, Pasal 19 huruf a dan b UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menindaklanjuti putusan KPPU, Pelindo 3 telah mengajukan upaya keberatan melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Terhadap keberatan tersebut, dalam Putusan 905/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Sby Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan dengan amar lengkap yaitu Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, serta Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 15/KPPU-L/2018 tanggal 23 Agustus 2018.

Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, KPPU telah menyatakan kasasi namun hingga saat ini Biro Hukum Perusahaan belum menerima salinan memori kasasi.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- o) The company was sued by Ang Shuantie John and PT Usaha Eksport for Case number 1223 / Pdt.G / 2018 / PN.SBY.Sby. (continued)

With respect to this decision, the Plaintiff undertook an appeal in accordance with the Notification of the Declaration of Appeal Number: 259 / Deed.Pdt.Banding / 2019 / PN.Niaga Jo. Number 1223 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby dated September 25, 2019 and has submitted its appeal memory.

- p) Business Competition Case Number 15 / KPPU-L / 2018.

To increase container loading and unloading productivity at L Say Maumere's Multipurpose Terminal, starting from 2017, Pelindo 3 has set a stack policy of 100%. However, the policy is considered a monopoly activity by KPPU Investigators.

In its report, KPPU Investigators consider that the 100% stack policy implemented by Pelindo 3 violates the provisions of Article 17 paragraph (1), Article 17 paragraph (2) letter b, Article 19 letter a and b of Law 5/1999 concerning Prohibition of Monopolistic and Unfair Business Competition.

Following on the KPPU's decision, Pelindo 3 has filed an objection through the Surabaya District Court. Against this objection, in Decision 905 / Pdt.Sus-KPPU / 2019 / PN.Sby, the Judge of the Surabaya District Court handed down the verdict in complete terms, namely Receiving and granting all objections filed by the Petitioners' Objection, and canceling all Decisions of the Business Competition Supervisory Commission No. 15 / KPPU-L / 2018 dated August 23, 2018.

With regard to the decision of the district court, the KPPU has declared an appeal but to date the Company's Legal Bureau has not yet received a copy of the cassation memory.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- q) Perusahaan digugat oleh Liliyana Poernama Wijaya dengan Nomor Register Perkara 11/Pdt.G/2019/PN.Bjm.

Penggugat mendalilkan menguasai sebidang tanah seluas 2.819 m² yang terletak di Jl. RE Martadinata, Kel. Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin yang didasarkan pada kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.127/Telawang tanggal 12 April 2011, surat ukur Nomor 16/TLWG/G/2001. Berdasarkan hasil pengukuran bersama diketahui bahwa tanah Penggugat berada didalam wilayah tanah Hak Pengelolaan PT Pelindo III berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 tanggal 10 September 1996.

Dalam gugatannya, penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memutus Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bangunan dan tanah, menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mendirikan pagar diatas tanah objek sengketa.

Putusan dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan bahwa Pelindo III menang yang pada pokoknya Status HGB nomor 4 tanggal 28 Juli 1965 hapus demi hukum dan status kembali milik negara atau pemilik tanah yaitu PT Pelindo III (Persero), serta Menyatakan HGB No. 127/Telawang tanggal 12 April 2001 cacat hukum dan tdk mempunyai kekuatan hukum.

Pelindo III dinyatakan menang pada tingkat banding dan saat ini Liliyana telah mengajukan Kasasi.

- r) Perusahaan digugat oleh Sopian Nomor Register Perkara 250/Pdt.G/2017/PN.Mtr.

Terdapat klaim dari Sopian atas sebagian area di Gilimas, yakni seluas kurang lebih 8000 m². Sopian mengaku telah menguasai dan mengelola area tersebut sejak lama, dan mengajukan bukti bayar SPPT-PBB dan juga sporadik dari pejabat setempat.

Adapun area tersebut saat gugatan diajukan ke Pengadilan sudah berupa daratan hasil reklamasi yang dilakukan Pelindo.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- q) The company was sued by Liliyana Poernama Wijaya with Case Register Number 11 / Pdt.G / 2019 / PN.Bjm.

The Plaintiff argues that she controlled a plot of land of 2,819 m² located on Jl. RE Martadinata, Kel. Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, Banjarmasin based on ownership of Building Rights Certificate No. 127 / Telawang dated April 12, 2011, letter of measurement Number 16 / TLWG / G / 2001. Based on the results of the joint measurements it is known that the Plaintiff's land is located within the territory of PT Pelindo III's Management Rights (HPL) based on Management Right Certificate Number 1 dated September 10, 1996.

In their lawsuit, the plaintiff requested that the Banjarmasin District Court decide that the Plaintiff is the rightful owner of the building and the land, stating that the Defendant committed Unlawful Acts because she had erected a fence on the disputed object's land.

The verdict of the Banjarmasin High Court stated that Pelindo III won, in essence, HGB Status number 4 dated July 28, 1965, voided by law and regained state or landowner status, namely PT Pelindo III (Persero), and Declared HGB No. 127 / Telawang dated April 12, 2001 was legally flawed and had no legal force.

Pelindo III was declared victorious at the appeal level and currently Liliyana has submitted an appeal.

- r) The Company is sued by Sopian on Register Case 250/Pdt.G/2017/PN.Mtr.

There are claims from Sopian for a portion of the area in Gilimas, which covers an area of approximately 8000 m². Sopian claimed to have controlled and managed the area for a long time, and submitted proof of payment of SPPT-PBB and also sporadic from local officials.

The area when the lawsuit was submitted to the Court was in the form of land reclamation by Pelindo.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- r) Perusahaan digugat oleh Sopian Nomor Register Perkara 250/Pdt.G/2017/PN.Mtr. (lanjutan)

Dalam perspektif PT Pelindo III, area yang di klaim oleh Sopian dahulu merupakan perairan (sudah pernah dirapatkan dan tinjau lapangan bersama antara Sopian, Pelindo 3, BPN dan KSOP setempat), dimana area perairan tersebut tidak dapat dilakukan penggantian.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, memutuskan bahwa Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

PT Pelindo III (Persero) yang bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi NTB telah mengajukan upaya hukum Banding. Namun Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, PT Pelindo III telah mengajukan upaya hukum Kasasi yang amar putusannya ialah Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III, serta Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 154/Pdt/2018/pt MTR tanggal 07 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Mtr tanggal 06 Juni 2018.

Pelindo III dinyatakan menang dan Perkara dinyatakan *inkracht*.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- r) The Company are sued by Sopian on Register Case 250/Pdt.G/2017/PN.Mtr. (continued)

In the perspective of PT Pelindo III, the area claimed by Sopian was a water area (had been discussed and visited by Sopian, Pelindo 3, BPN and the local KSOP), where could not be given compensation for the water area.

The Panel of Judges at the Mataram District Court, decided that the Panel of Judges granted the Plaintiff's claim in part.

PT Pelindo III (Persero) in collaboration with the State Attorney at the NTB High Prosecutor's Office has filed an appeal. However, the West Nusa Tenggara High Court decided to uphold the District Court's Decision.

With regard to the decision of the Court of Appeal, PT Pelindo III has filed for a cassation whose decision was to grant an appeal by the President Director of PT Pelabuhan Indonesia III, and cancelled the Decision of the Mataram High Court Number: 154 / Pdt / 2018 / pt MTR dated November 7 2018 which corroborates the Decision of the Mataram District Court Number 250 / Pdt.G / 2017 / PN Mtr dated June 6, 2018.

Pelindo III was declared victorious and Case was declared final and legally binding.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Entitas Anak

TPS

Mulai Desember 2018, Perusahaan sedang menjalani kasus hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya atas kasus tindak pidana pencucian uang. Kasus ini melibatkan dana sebesar Rp14.640.000 yang telah disita oleh Kejaksaan. Pada 31 Desember 2019 kasus ini masih berjalan. Perusahaan telah mencadangkan dana sebesar Rp14.640.000 milyar yang disajikan pada "Piutang lain-lain" (Catatan 8). Perusahaan telah memprovisikan piutang ini seluruhnya,

Pada tanggal 4 November 2019, terdapat putusan bahwa Perusahaan tidak bersalah. Namun, Kejaksaan sedang mengajukan kasasi atas kasus tersebut ke Pengadilan Tinggi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, kasus ini masih berjalan.

42. LAWSUIT (continued)

Subsidiary

TPS

Starting December 2018, the Company was alleged with money laundering corporate crime which case is being registered at Surabaya District Court. The case involves a total fund of Rp14,640,000 which was confiscated by the Prosecutor. As of December 31, 2019, the case is still on going. The Company recorded a provision for the Rp14,640,000 that were presented at "Other Receivables" (Note 8). The Company already made a full provision for this receivable.

On November 4, 2019, there is verdict awarded to the Company that it is not guilty. However, the Prosecutor appealed for cassation for the case to Supreme Court. As of December 31, 2019, the case is still on going.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

43. INFORMASI SEGMENT

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

43. SEGMENT INFORMATION

Information concerning the Group's business segments is as follows:

31 Desember 2019/December 31, 2019						
	Operasi kepelabuhanan/ Port operation	Jasa lainnya/ Other services	Total sebelum eliminasi/ Total before elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	8.283.187.215	2.363.975.776	10.647.162.991	-	10.647.162.991	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	1.171.828.409	2.109.914.940	3.281.743.349	(3.281.743.349)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen	9.455.015.624	3.602.535.922	13.057.551.546	(3.281.743.349)	10.647.162.991	Total segment operating revenues
Beban operasi	(9.496.002.035)	(1.690.548.342)	(11.186.550.377)	3.280.571.379	(7.905.978.998)	Operating expenses
Beban operasi lainnya - neto	481.194.669	(725.571)	480.469.098	207.478	480.676.576	Other operating expenses - net
Laba usaha					3.221.860.569	Operating income
Pendapatan keuangan	278.970.587	1.264.671	280.235.258	(132.617.733)	147.617.525	Finance income
Beban keuangan	(844.009.673)	(3.535.484)	(847.545.157)	132.606.071	(714.939.086)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	1.560.437.110	27.026.292	1.587.463.402	(1.582.381.982)	5.081.420	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					2.659.620.428	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(64.994.112)	(6.689)	(65.000.801)	-	(65.000.801)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan					2.594.619.627	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax
Kini	(524.814.705)	(20.920.832)	(545.735.537)	-	(545.735.537)	Current
Tangguhan	74.815.861	5.313.525	80.129.386	-	80.129.386	Deferred
Laba tahun berjalan					2.129.013.476	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	37.278.619.769	563.687.490	37.842.307.259	(7.086.392.686)	30.755.914.573	Segment assets
Liabilitas segmen	21.954.511.186	254.884.487	22.209.395.673	(2.500.344.601)	19.709.051.072	Segment liabilities

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

43. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

43. SEGMENT INFORMATION (continued)

		31 Desember 2018/December 31, 2018					
	Operasi kepelabuhanan/ Port operation	Jasa lainnya/ Other services	Total sebelum eliminasi/ Total before elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total		
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues	
Pendapatan operasi eksternal	9.860.876.991	917.896.425	10.778.773.416	-	10.778.773.416	External operating revenues	
Pendapatan operasi antar segmen	2.463.187.961	403.615.560	2.866.803.521	(2.866.803.521)	-	Inter-segment operating revenues	
Total pendapatan operasi segmen	12.324.064.952	1.321.511.985	13.645.576.937	(2.866.803.521)	10.778.773.416	Total segment operating revenues	
Beban operasi	(9.062.101.697)	(1.280.769.084)	(10.342.870.781)	2.866.263.849	(7.476.606.932)	Operating expenses	
Beban operasi lainnya - neto	(737.961.988)	209.058	(737.752.930)	3.829.292	(733.923.638)	Other operating expenses - net	
Laba usaha					2.568.242.846	Operating income	
Pendapatan keuangan	278.679.346	1.331.792	280.011.138	(136.817.527)	143.193.611	Finance income	
Beban keuangan	(946.280.735)	(2.036.161)	(948.316.896)	139.906.778	(808.410.118)	Finance costs	
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	1.099.345.431	-	1.099.345.431	(1.130.321.880)	(30.976.449)	Equity in income of associates and joint control entity - net	
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					1.872.049.890	Income before final tax and corporate income tax	
Beban pajak final	(48.544.590)	-	(48.544.590)	-	(48.544.590)	Final tax expense	
Laba sebelum pajak penghasilan badan					1.823.505.300	Income before corporate income tax	
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax	
Kini	(583.254.015)	(13.958.157)	(597.212.172)	-	(597.212.172)	Current	
Tangguhan	156.101.167	3.008.252	159.109.419	-	159.109.419	Deferred	
Laba tahun berjalan					1.385.402.547	Income for the year	
Posisi keuangan						Financial position	
Aset segmen	36.273.733.897	417.979.390	36.691.713.287	(6.185.997.700)	30.505.715.587	Segment assets	
Liabilitas segmen	22.555.853.166	148.603.745	22.704.456.911	(2.554.055.121)	20.150.401.790	Segment liabilities	

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

44. PERUBAHAN PADA LIABILITAS

44. CHANGES IN LIABILITIES

	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Arus kas/ Cash flows	Mutasi selisih kurs/ Foreign exchange movement	Perubahan pada nilai wajar/ Change in fair value	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	14.937.140.900	(353.295.614)	557.813.117	2.310.620	14.028.342.789	Bank loans and other financial institution
Utang sewa pembiayaan	62.813.193	(62.813.193)	-	-	-	Obligation under finance lease
	1 Januari 2018/ January 1, 2018	Arus kas/ Cash flows	Mutasi selisih kurs/ Foreign exchange movement	Perubahan pada nilai wajar/ Change in fair value	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
Pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	11.302.711.758	2.861.382.374	769.080.630	3.966.138	14.937.140.900	Bank loans and other financial institution
Utang sewa pembiayaan	63.257.235	(444.042)	-	-	62.813.193	Obligation under finance lease

45. AKTIVITAS NON-KAS

45. NON-CASH ACTIVITIES

Aktivitas non-kas yang mendukung laporan arus kas pada setiap tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Non-cash activities supporting the cash flows at each reporting dates are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Penambahan aset tetap melalui utang sewa pembiayaan	-	(444.042)	Acquisitions of fixed assets through finance lease
Penambahan aset tetap melalui penambahan utang	91.199.135	301.569.459	Acquisitions of fixed assets through addition on payable
Penambahan aset tetap melalui uang muka	270.262.947	479.006.089	Acquisitions of fixed assets through advance

46. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

46. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Operasi Kelompok Usaha telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus Covid-19 yang telah menyebar ke negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Efek virus Covid-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk efek terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Efek masa depan dari wabah virus Covid-19 terhadap Indonesia dan Kelompok Usaha masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran wabah yang berkepanjangan dapat berdampak besar pada perekonomian Indonesia dan Kelompok Usaha secara khusus. Namun, dampak di masa depan juga akan tergantung pada efektivitas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

The Company operation has and may continue to be adversely impacted by the outbreak of Covid-19 that has since spread to many countries including Indonesia. The effects of Covid-19 to the global and Indonesian economy include adverse effect to economic growth, decline in capital markets, depreciation of foreign currency exchange rates and disruption of business operations. The future effects of the outbreak of Covid-19 to Indonesia and the Group are unclear at this time. A significant rise in the number of Covid-19 infections or prolongation of the outbreak could have severe impact on Indonesian economy and the Group in particular. However, future effects will also depend on the effectiveness of policy responses issued by the Government of the Republic of Indonesia.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2019
(Expressed in Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2018</u>	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2.451.531.825	3.157.211.565	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	14.000.000	47.202.500	<i>Short-term investment</i>
Piutang usaha – neto			<i>Trade receivables – net</i>
Pihak ketiga	218.389.474	217.557.584	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	554.404.005	681.642.438	<i>Related parties</i>
Piutang lain-lain - neto			<i>Other receivables – net</i>
Pihak ketiga	25.675.393	20.997.759	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	146.309.770	175.067.434	<i>Related parties</i>
Pendapatan masih akan diterima	82.432.788	187.727.487	<i>Accrued revenues</i>
Persediaan		233.097	<i>Inventories</i>
Pajak dibayar dimuka	4.693.914	19.315.010	<i>Prepaid taxes</i>
Beban dibayar dimuka	61.551.910	85.179.016	<i>Prepaid expense</i>
Aset lancar lainnya	33.691.709	1.938.172	<i>Other current assets</i>
TOTAL ASET LANCAR	<u>3.592.680.788</u>	<u>4.594.072.062</u>	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Investasi saham	1.971.804.934	1.859.141.746	<i>Investment in shares of stock</i>
Investasi lain-lain	24.081.576	10.141.595	<i>Other investments</i>
Properti investasi - neto	98.658.789	98.762.702	<i>Investment properties – net</i>
Aset tetap - neto	13.922.978.426	13.292.164.365	<i>Fixed assets - net</i>
Aset pajak tangguhan	380.410.549	226.738.463	<i>Deferred tax assets</i>
Aset takberwujud - neto	5.162.785.112	4.366.423.950	<i>Intangible assets - net</i>
Estimasi tagihan pajak	139.314.816	309.041.239	<i>Estimated claims for tax refund</i>
Aset tidak lancar lainnya	1.517.413.907	2.029.820.476	<i>Other non-current assets</i>
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	<u>23.217.448.109</u>	<u>22.192.234.536</u>	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET	<u>26.810.128.897</u>	<u>26.786.306.598</u>	TOTAL ASSETS

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2019
(Expressed in Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS			LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang usaha			Trade payables
Pihak ketiga	524.903.182	793.638.634	Third parties
Pihak berelasi	717.826.563	580.980.458	Related parties
Utang lain-lain			Other payables
Pihak ketiga	27.726.862	39.302.757	Third parties
Pihak berelasi	639.302.503	414.615.398	Related parties
Utang pajak	95.892.797	88.213.757	Tax payables
Beban akrual	648.992.514	567.647.069	Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka jangka pendek	261.727.516	280.565.487	Short-term unearned revenue
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:			Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	162.163.278	351.140.707	Bank loans
Liabilitas jangka pendek lainnya	2.429.816	4.138.896	Other current liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	3.080.965.031	3.120.243.163	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar:			Long-term liabilities - net of current maturities:
Utang bank	81.764.281	256.387.236	Bank loans
Surat berharga yang diterbitkan	13.784.415.230	14.329.612.957	Securities issued
Liabilitas imbalan kerja	2.041.865.964	1.489.465.781	Employee benefits liabilities
Pendapatan diterima dimuka jangka panjang	324.273.918	320.024.091	Long-term unearned revenue
Liabilitas jangka panjang lainnya	1.695.790	1.702.004	Other non-current liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	16.234.015.183	16.397.192.069	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS	19.314.980.214	19.517.435.232	TOTAL LIABILITIES

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2019
(Expressed in Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
TOTAL LIABILITAS (pindahan)	19.314.980.214	19.517.435.232	TOTAL LIABILITIES (brought forward)
EKUITAS			EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham			Share capital - par value Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal dasar - 3.200.000 saham, modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 1.018.953 saham	1.018.953.000	1.018.953.000	Authorized capital - 3,200,000 shares, subscribed and paid up amounting to 1,018,953 shares
Selisih atas perubahan ekuitas entitas anak dan dampak transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(490.957.156)	23.856.830	Difference from changes in equity in subsidiaries and effects of transaction with non- controlling interest
Saldo laba:			Retained earnings:
Ditentukan penggunaannya	6.984.070.440	6.452.323.112	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	(1.156.060.178)	(1.633.477.739)	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	1.139.142.577	1.407.216.163	Other comprehensive income
TOTAL EKUITAS	7.495.148.683	7.268.871.366	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	26.810.128.897	26.786.306.598	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Pendapatan operasi	6.359.834.842	6.176.468.648	<i>Operating revenue</i>
Pendapatan konstruksi	744.691.217	595.966.568	<i>Construction revenues</i>
Beban operasi	(5.803.612.661)	(5.334.969.587)	<i>Operating expenses</i>
Beban konstruksi	(744.691.217)	(584.410.625)	<i>Construction expenses</i>
Pendapatan operasi lainnya - neto	1.178.884.819	150.935.652	<i>Other operating income - net</i>
LABA USAHA	1.735.107.000	1.003.990.656	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	205.087.141	220.270.853	<i>Finance income</i>
Beban keuangan	(713.716.476)	(810.225.158)	<i>Finance costs</i>
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	1.226.477.665	414.036.351	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX
Beban pajak final	(53.735.288)	(39.029.899)	<i>Final tax expense</i>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	1.172.742.377	375.006.452	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN BADAN			CORPORATE INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT
Kini	-	-	<i>Current</i>
Tangguhan	64.314.224	148.531.783	<i>Deferred</i>
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN BADAN	64.314.224	148.531.783	CORPORATE INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	1.237.056.601	523.538.235	INCOME FOR THE YEAR

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Items that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbangan pasti	(423.033.977)	909.231.030	Remeasurements of defined benefit plans
Efek pajak tangguhan pengukuran kembali program imbangan pasti	105.758.494	(227.307.758)	Deferred tax effect - remeasurement of defined benefit plans
Perubahan cadangan aset revaluasi	65.602.530	82.618.580	Changes in asset revaluation reserves
Efek pajak tangguhan - perubahan cadangan aset revaluasi	(16.400.633)	(20.654.645)	Deferred tax effect - changes in asset revaluation reserves
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(268.073.586)	743.887.207	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	968.983.015	1.267.425.442	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Modal saham/ Share capital	Selisih atas perubahan ekuitas Entitas Anak dan dampak transaksi dengan kepentingan nonpengendali/Difference from changes in equity of Subsidiaries and effects of transactions with non-controlling interest	Saldo laba/Retained earnings		Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income		Total ekuitas/ Total Equity	
			Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Surplus revaluasi aset tetap/Fixed assets revaluation gains	Pengukuran kembali program imbalan pasti/Remeasurements of defined benefit plans		
Saldo per 31 Desember 2017 (sebelum disajikan kembali)	1.018.953.000	23.856.830	5.422.979.954	(686.525.748)	1.097.156.060	(433.827.105)	6.442.592.991	Balance as of December 31, 2017 (before restated)
Efek perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan	-	-	-	-	-	-	-	Effects of changes in accounting policies and errors
Saldo per 31 Desember 2017 (disajikan kembali)	1.018.953.000	23.856.830	5.422.979.954	(686.525.748)	1.097.156.060	(433.827.105)	6.442.592.991	Balance as of December 31, 2017 (as restated)
Laba tahun berjalan	-	-	-	523.538.235	-	-	523.538.235	Income for the year
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	-	-	681.923.273	681.923.273	Remeasurement of employee benefit liability
Pengukuran kembali revaluasi aset tetap	-	-	-	-	61.963.935	-	61.963.935	Remeasurement of fixed assets revaluation
Dividen tunai	-	-	-	(441.147.068)	-	-	(441.147.068)	Cash dividend
Pembentukan cadangan umum	-	-	1.029.343.158	(1.029.343.158)	-	-	-	Appropriation for general reserve
Saldo per 31 Desember 2018	1.018.953.000	23.856.830	6.452.323.112	(1.633.477.739)	1.159.119.995	248.096.168	7.268.871.366	Balance as of December 31, 2018
Laba tahun berjalan	-	-	-	1.237.056.601	-	-	1.237.056.601	Income for the year
Disagio saham TPS	-	(514.813.986)	-	-	-	-	(514.813.986)	
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	-	-	(317.275.483)	(317.275.483)	Remeasurement of employee benefit liability
Pengukuran kembali revaluasi aset tetap	-	-	-	-	49.201.897	-	49.201.897	Remeasurement of fixed assets revaluation
Dividen tunai	-	-	-	(227.891.712)	-	-	(227.891.712)	Cash dividend
Pembentukan cadangan umum	-	-	531.747.328	(531.747.328)	-	-	-	Appropriation for general reserve
Saldo per 31 Desember 2019	1.018.953.000	(490.957.156)	6.984.070.440	(1.156.060.178)	1.208.321.892	(69.179.315)	7.495.148.683	Balance as of December 31, 2019

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan dan non-pelanggan	6.657.973.660	6.051.453.560	Cash received from customers and non-customers
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(3.233.184.875)	(3.361.570.134)	Payment to contractors, suppliers and others
Pembayaran kepada karyawan	(1.163.214.570)	(896.877.766)	Payment to employees
Penghasilan bunga	205.087.141	220.270.853	Interest received
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.466.661.356	2.013.276.513	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dividen	713.024.318	880.451.063	Receipt of dividend
Perolehan aset tetap dan aset takberwujud	(2.403.542.740)	(3.177.540.832)	Acquisition of fixed assets and intangible assets
Penerimaan dari penjualan aset tetap	3.193.977	2.176.449	Proceed from sales of fixed assets
Penempatan investasi jangka pendek	(27.939.981)	(44.202.500)	Placement of short-term investments
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.715.264.426)	(2.339.115.820)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman	500.000.000	6.901.500.000	Receipt of loans
Pembayaran pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	(853.295.614)	(4.040.117.626)	Payment of bank loans and other financial institution
Pembayaran beban bunga	(759.863.245)	(688.661.642)	Payment of interest
Pembayaran dividen	(227.891.712)	(441.147.068)	Payment of dividend
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(1.341.050.571)	1.731.573.664	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(589.653.641)	1.405.734.357	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(116.026.099)	70.337.709	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	3.157.211.565	1.681.139.499	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	2.451.531.825	3.157.211.565	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri Entitas Induk

Laporan keuangan tersendiri Entitas Induk disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK No. 4 (Revisi 2013) mengatur dalam hal entitas memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Entitas Induk yang mencatat investasi pada Entitas Anak berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto *investee*.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri Entitas Induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada Entitas Anak.

Sesuai dengan PSAK No. 4 (Revisi 2013), Entitas Induk mencatat penyertaan pada Entitas Anak dengan menggunakan metode biaya. Entitas Induk juga mengakui dividen dari Entitas Anak pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak menerima dividen ditetapkan.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2019 and
For the Year then Ended
(Expressed in Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of preparation of the separate financial statements of the Parent Entity

The separate financial statements of the Parent Entity are prepared in accordance with the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") No. 4 (Revised 2013), "Consolidated and Separate Financial Statements".

PSAK No. 4 (Revised 2013) regulates that when an entity elected to present the separate financial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a Parent Entity, in which the investments are accounted for on the basis of the directly owned interest rather than on the basis of the reports result and net assets of the investee.

Accounting policies adopted in the preparation of the Parent Entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in Subsidiaries.

In accordance with PSAK No. 4 (Revised 2013), the Parent Entity recorded the investments in Subsidiaries using cost method. The Parent Entity also recognizes dividends from Subsidiaries in profit or loss in its separate financial statements when its right to receive the dividends is established.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2019 and
For the Year then Ended
(Expressed in Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. INVESTASI SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
Perubahan investasi pada entitas anak dan asosiasi
adalah sebagai berikut:

2. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK

As of December 31, 2019 and 2018, The
movements of investments in childs and associates
are as follows:

31 Desember 2019/December 31, 2019						
Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Biaya perolehan 1 Januari/ Acquisition cost January 1	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Nilai tercatat 31 Desember/ Carrying value December 31		
Entitas Anak					Subsidiary	
PT TPS	99,50%	64.581.449	62.663.188	-	127.244.637	PT TPS
PT BJTI	96,84%	1.079.138.000	-	-	1.079.138.000	PT BJTI
PT PMS	98,23%	255.000.000	50.000.000	-	305.000.000	PT PMS
PT PHC	98,73%	140.200.000	-	-	140.200.000	PT PHC
PT PDS	90,00%	15.750.000	-	-	15.750.000	PT PDS
PT TTL	99,50%	134.325.000	-	-	134.325.000	PT TTL
Entitas Asosiasi					Associates	
PT JBT	17,58%	131.047.297	-	-	131.047.297	PT JBT
PT TPI	25,00%	37.500.000	-	-	37.500.000	PT TPI
PT Ambapers	40,00%	1.600.000	-	-	1.600.000	PT Ambapers
PT Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	-	(2.670.500)	-	PT Portek Indonesia
Total		1.861.812.246	112.663.188	(2.670.500)	1.971.804.934	Total

31 Desember 2018/December 31, 2018						
Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Biaya perolehan 1 Januari/ Acquisition cost January 1	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Nilai tercatat 31 Desember/ Carrying value December 31		
Entitas Anak					Subsidiary	
PT TPS	50,50%	64.581.449	-	-	64.581.449	PT TPS
PT BJTI	96,84%	1.079.138.000	-	-	1.079.138.000	PT BJTI
PT PMS	97,89%	255.000.000	-	-	255.000.000	PT PMS
PT PHC	98,73%	140.200.000	-	-	140.200.000	PT PHC
PT PDS	90,00%	15.750.000	-	-	15.750.000	PT PDS
PT TTL	99,50%	134.325.000	-	-	134.325.000	PT TTL
Entitas Asosiasi					Associates	
PT JBT	17,58%	131.047.297	-	-	131.047.297	PT JBT
PT TPI	25,00%	37.500.000	-	-	37.500.000	PT TPI
PT Ambapers	40,00%	1.600.000	-	-	1.600.000	PT Ambapers
PT Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	-	(2.670.500)	-	PT Portek Indonesia
Total		1.861.812.246	-	(2.670.500)	1.859.141.746	Total

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2019 and
For the Year then Ended
(Expressed in Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

3. Transaksi dengan pihak berelasi

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (entitas anak, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

a. Kas dan setara kas

3. Transactions with related parties

Details of significant accounts with related parties (subsidiaries, state owned entities unless otherwise indicated) are as follows:

a. Cash and cash equivalent

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Bank		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	77.533.188	89.882.583
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	46.617.679	10.680.203
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	16.885.719	27.587.256
Total	141.036.586	128.150.042
Dolar AS		
PT Bank Syariah Mandiri		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.489.799	129.290
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	731.355	2.364.628
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	37.483	2.878.370
Total	2.258.637	5.372.288
Deposito		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.000.000	8.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	14.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	19.000.000	-
PT Bank Tabungan Negara Tbk	-	10.000.000
Total	36.000.000	32.000.000

Bank
Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total
US Dollar
PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total
Deposits
Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara Tbk
Total

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2019 and
For the Year then Ended
(Expressed in Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

3. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

3. Transactions with related parties (continued)

a. Kas dan setara kas (lanjutan)

a. Cash and cash equivalent (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.398.600.462	1.787.880.374	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.901.000	543.037.500	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	797.523.251	515.929.068	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total	2.210.024.713	2.846.846.942	Total

b. Piutang usaha

b. Trade receivables

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	91.145.385	68.136.847	PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	86.568.472	72.145.981	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
PT Pertamina (Persero)	44.932.795	39.039.566	PT Pertamina (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	43.610.754	28.866.206	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Petrokimia Gresik	35.995.746	27.452.070	PT Petrokimia Gresik
PT Bahtera Adhiguna	11.163.377	10.859.277	PT Bahtera Adhiguna
PT Perikanan Nusantara (Persero)	9.373.897	6.920.612	PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	9.314.629	6.311.709	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 miliar)	377.536.370	421.910.170	Others (each below Rp5 billion)
Subtotal	709.641.425	681.642.438	Sub-total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(145.923.637)	-	Less: Allowance for impairment
Total	563.717.788	681.642.438	Total

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2019 and
For the Year then Ended
(Expressed in Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

3. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

3. Transactions with related parties (continued)

c. Piutang lain-lain

c. Other receivables

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut	52.267.802	52.267.802	Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation
PT Pengerukan Indonesia (Persero)	26.576.794	29.330.404	PT Pengerukan Indonesia (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 miliar)	120.710.558	93.469.228	Others (each below Rp5 billion)
Subtotal	199.555.154	175.067.434	Sub-total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(53.245.384)	-	Less: Allowance for impairment
Total	146.309.770	175.067.434	Total

d. Utang usaha

d. Trade payables

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
PT Pelindo Marine Service	219.324.084	84.732.106	PT Pelindo Marine Service
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	160.693.805	85.397.010	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Nindya Karya (Persero)	79.548.563	108.231.555	PT Nindya Karya (Persero)
PT Pelindo Daya Sejahtera	68.642.100	70.345.153	PT Pelindo Daya Sejahtera
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	63.429.111	39.749.150	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Terminal Teluk Lamong	34.436.376	24.733.025	PT Terminal Teluk Lamong
PT Berkah Industri Mesin Angkat	22.960.888	37.720.650	PT Berkah Industri Mesin Angkat
Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	17.512.404	15.878.580	Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	14.637.235	14.637.235	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	6.254.940	23.695.321	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
PT Pelindo Energi Logistik	5.054.575	11.340.036	PT Pelindo Energi Logistik
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	89.764	34.392.785	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp8 miliar)	25.242.718	30.127.852	Others (each below Rp8 billion)
Total	717.826.563	580.980.458	Total

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2019 and
For the Year then Ended
(Expressed in Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

3. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

3. Transactions with related parties (continued)

e. Utang lain-lain

e. Other payables

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
PT TTL	314.667.012	134.825.052	PT TTL
PT APBS	282.958.064	268.192.341	PT APBS
PT PHC	28.306.516	3.027.473	PT PHC
PT BIMA	11.585.278	4.826.043	PT BIMA
PT TCS	-	2.618.524	PT TCS
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	1.785.633	1.125.965	Others (each below Rp1 billion)
Total	639.302.503	414.615.398	Total

g. Pendapatan diterima dimuka jangka pendek

g. Short-term unearned revenue

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Uang panjar pelanggan	6.128.372	12.662.640	Advances from customer
Uang titipan	31.318.219	18.262.220	Fund retained
Total	37.446.591	30.924.860	Total